

KRONOLOGI SEJARAH SINGKAT PERMESTA

[Update Data terakhir tgl 18 Juli 2003]

INDEKS KRONOLOGI:

- * Masa pra-Permesta
- * Masa awal Permesta [Pembangunan]
 - Proklamasi Permesta 2 Maret 1957
 - Munas 1997
 - Soekarno berkunjung di Minahasa
- * Masa Pergolakan Permesta [Pemberontakan PRRI/Permesta]
 - Peristiwa pesawat Allan Pope
 - Peristiwa penembakan pilot Maukar
- * Masa usai Permesta [Rehabilitasi]
- * Masa Reuni eks-Permesta [neo-Permesta]

Masa pra-Permesta

20 Juni 1950

Wilayah Komando Tentara & Territorium VII [TT-VII] yang mencakup wilayah Indonesia Timur didirikan. Wilayah ini meliputi daerah 4 propinsi, yaitu Propinsi Sulawesi, Propinsi Nusatenggara / Sunda Kecil, Propinsi Maluku, Propinsi Irian Barat [masih dikuasai Belanda]. Pada tahun 1951, Letkol Alex Kawilarang menjadi Panglima Komando TT-VII selama beberapa bulan lamanya sampai bulan November, ketika tanggal 10 November ia secara resmi menjadi Panglima Komando TT-III/Siliwangi dengan pangkat Kolonel.

6 September 1950

Pembentukan Kabinet Natsir, kabinet pertama setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari Negara Republik Indonesia Serikat [RIS]. Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet, dan intinya adalah Masyumi. Kabinet ini menyerahkan mandatnya pada tanggal 21 Maret 1951.

27 April 1951

Kabinet Soekiman terbentuk di bawah Perdana Menteri Soekiman. Kabinet ini adalah suatu kabinet koalisi antara kedua partai terbesar waktu itu, yakni Masyumi dan PNI. Kabinet ini jatuh pula dan menjadi kabinet demisioner sejak tanggal 23 Februari 1952 sampai terbentuknya kabinet baru.

3 April 1952

Kabinet Wilopo terbentuk di bawah Perdana Menteri Wilopo [PNI], yang juga merupakan koalisi kedua partai terbesar, yaitu Masyumi dan PNI. Kabinet ini jatuh pada tanggal 3 Juni 1953, dan menjadi kabinet demisioner sejak saat itu.

15 April 1952

Kolonel Alex E. Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Territorium III/Siliwangi [Kesko Terr-III]. Komando pasukan khusus ini memakai baret merah mengikuti kesatuan komando Belanda. Ide pembentukan kesatuan komando ini timbul oleh pengalamannya melawan Pemberontakan RMS di Maluku. Saat itu ia bersama Letkol Slamet Ridjadi [Brigjen Anumerta] cukup mengalami kesulitan menghadapi RMS Baret Merah dan bercita2 mendirikan satuan komando semacam itu yang tangkas dan cepat. Kol. Kawilarang sangat menaruh perhatian yang besar pada latihan2 komando ini. Komandan Kesko Terr-III/Siliwangi adalah Mayor Mohammad Idjon Djanbi [seorang berkebangsaan Belanda yang dulunya bernama Visser], dengan markas komandonya di Batujajar - Jawa Barat.

Begitu pesatnya perkembangan dan keunggulan kesatuan ini sehingga pada tahun 1953 Kesko TT-III/Siliwangi ditimbangterimakan kepada Inspektat Infanteri MBAD. Namanya diubah menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat [KKAD], kemudian diubah lagi menjadi RPKAD [Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat], Palu RPKAD [Resimen Para Komando Angkatan Darat], kemudian Kopassandha [Komando Pasukan Sandhi Yudha], kemudian terakhir menjadi Kopassus [Komando Pasukan Khusus].

Kelak pada masa Pergolakan Permesta [Pemberontakan PRRI/Permesta] pada tahun 1958-1961, kesatuan ini menjadi tulang punggung untuk menumpas Permesta dimana saat itu Alex Kawilarang sebagai Panglima Besar pasukan Permesta, dengan demikian seluruh bekas anak buahnya berbalik menyerangnya sebagai lawan dalam pertempuran.

17 Oktober 1952

Momen yang dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober 1952, dilakukan oleh para perwira militer/TNI-AD yang merasa tidak puas akan kinerja pemerintahan RI saat itu, dimana pemerintah sangat mencampuri urusan dalam tubuh TNI dan menyingkirkan perwira2 yang tidak disukai mereka. KSAD - Kolonel A.H. Nasution, KSAP - Jenderal Mayor T.B. Simatupang, Panglima TT-III/Siliwangi Kolonel Alex Kawilarang menemui Presiden Soekarno di istananya di Jakarta, menuntut presiden untuk membubarkan Parlemen dan membentuk Parlemen baru. Hal ini menimbulkan kemarahan dari Presiden. Kemudian, KSAD menyatakan bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa itu dan mengajukan permohonan berhenti kepada Pemerintah. Juga Jenderal Mayor T.B. Simatupang mengundurkan diri, dan jabatan KSAP selanjutnya ditiadakan.

16 November 1952

Letkol J.F. Warouw [alias Joop Warouw] mendaulat Kolonel Gatot Subroto sebagai Panglima TT-VII akibat Panglima TT-nya berada di Kelompok 17 Oktober.

Kemudian ia menjadi pejabat sementara Panglima TT-VII tanggal 5 Januari 1953, dan pada tanggal 1 Agustus 1954 resmi sebagai Panglima TT-VII/Indonesia Timur dengan pangkat Kolonel.

Kepala Staf TT-VII/Wirabuana adalah dijabat oleh Letkol. H.N. Ventje Sumual, yang sebelumnya adalah Kasi-I Inspektorat Infanteri di Bandung.

Tahun 1955 Mayor D.J. Somba menjadi Assisten II/Personalia di TT-VII/Wirabuana, dan pada bulan Desember 1956 menggantikan Letkol H.V.Worang sebagai Komandan RI-24 di Manado.

Saat Joop Warouw inilah TT-VII diberi nama WIRABUANA [oleh Kolonel Ahmad Yani] dari bahasa Sansekerta yang artinya: negeri yang terang, dimana Wira = satria, terang, dan Buana = wilayah/daerah, karena wilayah ini adalah wilayah matahari terbitnya Indonesia, dan juga wilayah/daerah ini disiapkan untuk suatu wilayah militer.

20 Juni 1953

Wilayah Komando Tentara & Territorium VII resmi diberi nama WIRABUANA [oleh Kolonel Ahmad Yani] dari bahasa Sansekerta yang artinya: negeri yang terang, dimana Wira = satria, terang, dan Buana = wilayah/daerah, karena wilayah ini adalah wilayah matahari terbitnya Indonesia, dan juga wilayah/daerah ini disiapkan untuk suatu wilayah militer.

Hari ini diperingati KODAM VII/Wirabuana sebagai HUT-nya.

1 Agustus 1953

Setelah krisis 58 hari lamanya, Kabinet Ali-Wongso terbentuk dengan Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo [PNI] dan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro [Partai Indonesia Raya, PIR]. Dalam kabinet ini Masyumi tidak turut serta, tetapi Nahdlatul Ulama [NU] duduk di dalamnya.

Kabinet ini menyerahkan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955.

4 Februari 1955

Terbentuknya Yayasan Kelapa Minahasa [YKM] dengan tokohnya Jan M.J. PANTOUW [alias Noen], kemudian mengadakan perdagangan barter Kopra sebagai penyelundupan terselubung ke luar negeri yang memuncak pada bulan Februari - April 1956 dengan masuknya 6 buah kapal asing di pelabuhan Bitung yang mengangkut 25.000 ton kopra. YKM lalu melebarkan sayapnya sampai di Singapura.

Disamping itu, dua orang tokoh yang cukup berperan dalam perdagangan barter kopra di Minahasa yang dimulai oleh Letkol Hein Victor Worang [Komandan Resimen Infanteri 24 /RI-24 di Manado] dan penggantinya, Panglima KDM-SUT [sebelumnya Resimen Infanteri / RI-24] Mayor D.J. Somba. Namun nasib Mayor H.V. Worang selanjutnya setelah pihak pusat memantau aksi perdagangan barter tersebut adalah diganti bulan Desember 1956

dan ditawarkan Studi Lanjut ke luar negeri, kemudian ditugasi di Sumatera bagian Selatan.

12 Agustus 1955

Kabinet Burhanuddin Harahap terbentuk, yang merupakan kabinet koalisi dengan Masyumi sebagai intinya, sedangkan PNI menjadi partai oposisi.

29 September 1955

PEMILIHAN UMUM Pertama di Indonesia, untuk memilih anggota DPR, dengan sistem demokrasi liberal. Hasilnya Masyumi [60 kursi], PNI [58 kursi], NU [47 kursi], PKI [32 kursi] sebagai partai terbesar.

DPR hasil pemilihan umum beranggota 272 orang, yang dilantik pada tanggal 20 Maret 1956.

Sedangkan di Minahasa, partai yang mendominasi adalah PNI, PSI dan Parkindo.

28 Oktober 1955

Kabinet Ali-Wongso memutuskan untuk mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD, yang mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat yang dijabat sementara oleh Wakil Kepala Staf AD Kolonel Zulkifli Lubiz. Sebelumnya, KSAD yang lalu, Jenderal Mayor Bambang Sugeng mengundurkan diri, dan pelantikan penggantinya Kolonel Bambang Utojo sebagai KSAD pada tanggal 27 Juni 1955 diboikot oleh perwira2 Angkatan Darat. A.H. Nasution selanjutnya dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Mayor.

[pangkat Brigadier Jenderal belum dikenal dalam sistem perpangkatan TNI saat itu].

15 Desember 1955

Pemilihan Umum kali ini untuk pemilihan anggota-anggota Konstituante [Sidang Pembuat Undang2 Dasar]. Anggota Konstituante berjumlah 542 orang, yang dilantik pada tanggal 10 November 1956

3 Maret 1956

Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada DPR hasil pemilihan umum.

24 Maret 1956

Kabinet Ali II terbentuk, dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini merupakan kabinet pertama setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk. Partai pendukung Kabinet ini ialah PNI, Masyumi dan NU serta beberapa partai kecil lainnya. PKI sendiri tidak masuk dalam Kabinet karena masuknya komunis dalam Kabinet masih ditentang oleh beberapa pihak mengingat tindakan2 PKI di masa lalu, terutama Pemberontakan PKI di Madiun.

2 April 1956

RUU yang membatalkan seluruh perjanjian KMB secara unilateral yang diajukan Kabinet, disetujui secara bulat oleh DPR. RUU ini ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 8 Mei 1956. Inilah awal dari ketegangan baru antara Indonesia dengan pihak Belanda sejak KMB ditandatangani. Pembatalan persetujuan KMB secara sepihak oleh Indonesia pada prinsipnya didasarkan kepada sikap Belanda yang tidak mau menepati persetujuan KMB yang menyangkut soal Irian Barat.

14 Agustus 1956

Timbang terima Panglima TT-III/Siliwangi dari Kolonel Alex E Kawilarang kepada Kolonel Suprayogi, untuk selanjutnya bulan Desember tahun itu pergi ke Washington, D.C. menjadi Atase Militer pada Kedutaan Besar RI di sana.

Selama memimpin TT-III/Siliwangi, Kolonel Kawilarang bermasalah antara lain pernah menangkap meteri Ruslan Abdulgani karena dituduh korupsi.

17 Agustus 1956

Pembentukan Propinsi Papua Barat [Irian Barat] dengan ibukota di Soa Siu.

Gubernur yang pertama pada bulan September 1956 adalah Sultan Tidore - Zainal Abidin Syah. Propinsi tersebut meliputi wilayah yang masih diduduki Belanda dengan daerah2 Tidore, Oba, Weda, Patani, serta Wasile di Maluku Utara.

22 Agustus 1956

Kolonel J.F. Warouw telah meletakkan jabatannya sebagai Panglima Komando TT-VII/Wirabuana dalam rangka pergantian pimpinan Komando Tentara & Territorium VII/Wirabuana.

23-26 Agustus 1956

Serah-terima Panglima TT-VII/Wirabuana - Indonesia Timur dari Kolonel J.F. Warouw kepada Letkol H.N. Ventje Sumual, Kepala Staf TT-VII/Wirabuana sebelumnya.

Kemudian Joop Warouw dipindahkan sebagai Atase Militer pada Kedubes RI di Peking - Cina.

8 September 1956

Komandan Batalyon 714 Kapten Dolf Runturambi memerintahkan untuk menahan kapal "Susane Skow" di pelabuhan samudera Bitung, karena surat2 yang tidak lengkap untuk menurunkan mobil2 dan mengangkutnya.

Hal ini didasarkan pada radiogram Panglima TT VII pertengahan Juni tahun itu - penahanan mana segera dilaporkan kepada Panglima TT VII Let.Kol. H.N.V. Sumual dan Komandan RI-24 Let.Kol. H.V. Worang.

Desember 1956

Mayor D.J. Somba sebagai Assisten II/Personalia di TT-VII/Wirabuana bulan Desember 1956 ini menggantikan Mayor H.V.

Worang sebagai Komandan Resimen Infanteri 24 [RI-24] di Manado, karena Worang saat itu terlibat upaya penyelundupan/barter kopra.

1 Desember 1956

Dwitunggal Soekarno-Hatta pecah dengan mundurnya Drs. Mohammad HATTA dari Wakil Presiden.

9 Desember 1956

KSAD Jenderal Mayor A.H. Nasution mengeluarkan pengumuman yang melarang perwira2 Angkatan Darat melakukan kegiatan politik.

24 Desember 1956

Laurens F. Saerang diangkat menjadi Kepala Daerah Minahasa definitif, dan merupakan kepala daerah termuda di waktu itu [1956-1958]. Ia bekas komandan kompi dalam Batalyon 3 Mei berpangkat Kapten. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses dalam perdagangan besi rongsokan sisa Perang Dunia II di Morotai. Pada saat Pergolakan Permesta di Sulawesi Utara pecah, ia kemudian membentuk Brigade Manguni serta memimpinya. Masa kepemimpinan resminya sampai tanggal 16 Juni 1958 dan digantikan Kapten Bert Supit [sampai tanggal 23 September 1958]. Meskipun demikian, pemerintahan sipil Permesta masih mengakui kepemimpinannya sebagai Kepala Daerah Minahasa [KDM] Permesta, yang tugas kesehariannya dijabat oleh Wakil KDM Pati Arie Mandagi sebagai pejabat KDM Permesta dan berkantor di desa Pinaras - Tomohon yang terletak di tengah hutan.

27 Desember 1956

Kongres Masyumi di Bandung yang berlangsung tanggal 22-29 Desember menyatakan menarik menteri2nya keluar dari Kabinet Ali II [dan kehilangan 57 suara dalam Dewan Perwakilan Rakyat].

31 Desember 1956

Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi [Panglima Besar Revolusi], menyatakan daerah Sumatera Selatan atau daerah TT-II dalam keadaan bahaya perang.

Januari 1957

Rencana TT-VII/Wirabuana diajukan kepada KSAD A.H. Nasution. Letkol M. Saleh Lahede [Kastaf TT-VII] dan Mayor Andi Muhammad Jusuf [Kastaf Resimen Hassanudin] membicarakan masalah2 di Indonesia Timur guna mengatasi masalah gangguan keamanan di wilayah Sulawesi [terutama DI/TII Kahar Muzakhar], dengan mengajukan alternatif jalan keluar, yaitu agar tanggung jawab keamanan daerah diserahkan sepenuhnya kepada putra daerah. Selain itu juga mereka berbicara mengenai keadaan politik & ekonomi di Indonesia Timur.

Awal Februari 1957

Gubernur Sulawesi - Andi Pangerang, dan rombongan berada di Jakarta untuk memperjuangkan realisasi rencana pembangunan di wilayahnya. Selain menghubungi berbagai pihak dan instansi selama sekitar satu bulan, juga Presiden Soekarno dan Bung Hatta mereka kunjungi.

3 Februari 1957

Sekitar 47 organisasi pemuda di Makassar mengadakan rapat. Mereka sepakat bahwa penyelesaian keamanan di Indonesia Timur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat harus bisa dilakukan melalui pelaksanaan pembangunan. Kemudian mereka membentuk organisasi yang mengkoordinasikan antar-organisasi pemuda yang ada dengan nama Dewan Pemuda Sulawesi, yang dipimpin presidium dengan badan pekerja untuk tugas harian.

Presidium: Nurdin Johan,
Mustafa Tari,
Abdul Chalik,
Mattulada,
Ismael Habi,
J.B. Rumbayan,
G.W. Bawengan

Sekjen: R.A. Daud

Seksi2: Indra Chandra,
Abdul Muis,
Husein Achmad,
Djihon Njompa,
Nahariah

10/18 Februari 1957

Terbentuknya Dewan Manguni di Sulawesi Utara, atas inisiatif Kapten G.K. Montolalu, dkk. Pimpinannya terdiri atas:

Ketua : Henk L. Lumanauw
Sekretaris: Jan Torar
Anggota : Hein Montolalu &
A.C.J. Mantiri [direktur Pelayaran Rakyat Indonesia
di Manado]

19 Februari 1957

Penyelenggaraan reuni tokoh2 tokoh PKRS 1946 di Kantor Pembangunan Daerah yang dihadiri ±19 orang. Kemudian mereka membentuk wadah perjuangan baru yaitu Pusat Konsentrasi Tenaga untuk Keselamatan Rakyat Sulawesi [disingkat Konsentrasi Tenaga] dengan Pengurus Sementara:

Ketua : Andi Burhanudin [Residen Makassar /
Ketua Umum Partai kedaulatan Rakyat]

Wakil Ketua : J.Latumahina

Sekretaris : Henk Rondonuwu [Ketua PKR]

Bendahara : Ny. Mathilda Towoliu-Hermanses

Komisaris : Achmad Siala [Dg.Masalle],
Intje Tadjuddin,
Abdul Muluk Makatita

21 Februari 1957

Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya yang dikenal sebagai "Konsepsi Presiden Soekarno" atau "Konsepsi Presiden" yang isinya adalah menolak sistem demokrasi parlementer secara Barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan menggantinya dengan sistem demokrasi terpimpin, perlunya suatu kabinet gotong royong yaitu Kabinet Kaki Empat dengan Nasakom-nya [Nasional, Agama, Komunis]. Bekas Wakil Presiden Drs. Moh.Hatta menyatakan bahwa ia tidak menyetujui konsepsi itu.

23 Februari 1957

Setelah mengadakan rapat oleh para perwira TT-VII/Wirabuana [dengan ketua panitianya Letkol M. Saleh Lahede] yang diikuti oleh a.l. Letkol O.E. Engelen, Letkol Andi Mattalata, Mayor Andi M. Jusuf, Mayor J.W. Gerungan, Mayor CPM Her Tasning, Mayor Sjamsuddin, Mayor Eddy Gagola, Kapten Bing Latumahina, Kapten Lendy R.Tumbelaka, Kapten John Ottay, Kapten Arie W. Supit, yang mengadakan rapat di kediaman Eddy Gagola untuk menyusun dan merumuskan rencana Perjuangan Semesta, lalu Panglima TT-VII/Wirabuana Letkol Ventje Sumual hari ini berangkat ke Jakarta untuk menjelaskan langkah2 yang akan diambilnya kepada teman2nya di MBAD terutama Korps Perwira SSKAD, terutama mengatasi keamanan daerahnya dengan pemberlakuan SOB/darurat perang.

1 Maret 1957

Pada petang hari, semua pejabat di Makassar yang bertolak ke Ibukota - Jakarta, yaitu rombongan Gubernur, delegasi Konsentrasi Tenaga dan Rombongan Panglima Letkol Sumual, tiba kembali di pesawat dengan menumpang satu pesawat. Setibanya di Makassar, diputuskan untuk mengadakan rapat sebelum rencana2 itu dilaksanakan. Rapat berlangsung hingga pukul 01:00 dinihari tanggal 2 Maret.

Masa Awal Permesta [Pembangunan]

2 MARET 1957

Jumat dinihari tanggal 2 Maret 1957, sejumlah pejabat, tokoh politik dan tokoh masyarakat di kota Makassar dijemput kendaraan yang dikawal militer [sekitar 49 tokoh & 2 wartawan] untuk menandatangani piagam yang telah disusun oleh Panitia Perwira TT-VII yang lalu, untuk berkumpul di gubernuran. Mereka hendak mengadakan rapat untuk persiapan sebuah proklamasi dari suatu hasrat luhur yang sudah sangat lama menggejolak. Malam telah merambat dini hari.

Pukul 3 dinihari rapat dibuka oleh Panglima TT-VII/Wirabuana Letkol H.N. Ventje SUMUAL yang kemudian membaca naskah Proklamasi SOB.

Inilah Proklamasi SOB [Staat van Oorlog en Beleg = negara dalam keadaan darurat perang] PERMESTA tersebut, yang memulai babak baru dalam sejarah Indonesia Bagian Timur:

Proklamasi SOB Permesta:

P R O K L A M A S I

Demi keutuhan Republik Indonesia, serta demi keselamatan dan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnya, dan Rakjat Daerah di Indonesia Bahagian Timur pada khususnya, maka dengan ini kami njatakan seluruh wilayah Territorium VII dalam keadaan darurat perang serta berlakunja pemerintahan militer sesuai dengan pasal 129 Undang - Undang Dasar Sementara , dan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1948 dari Republik Indonesia.

Segala peralihan dan penjesuaiannja dilakukan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dalam arti tidak ulangi tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa beserta kita dan menurunkan berkat dan hidajatNja atas umatNja,-

Makassar , 2 M a r e t 1957.-
Panglima Tentara & Territorium VII
ttd.

Letk : H.N.V. Sumual

Nrp : 15958

Proklamasi Keadaan SOB ini berdasarkan pasal 129 UUD Sementara yang memberikan keleluasaan kepada panglima militer di daerah memberlakukan SOB [keadaan darurat militer] dan Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1948 [Peraturan yang memberlakukan SOB sehubungan dengan Pemberontakan PKI Madiun tahun itu].

Selanjutnya Letkol M. Saleh Lahede selaku Kepala Staf TT-VII/Wirabuana - Indonesia Timur, membacakan Piagam Perjuangan Semesta, yang lebih dikenal sebagai Piagam PERMESTA, yang menjadi landasan pelbagai program pembangunan yang segera dilancarkan.

Pukul 07:00 keluar pengumuman pertama Letkol Sumual sebagai Kepala Pemerintahan Militer mengenai organisasi2 kepemimpinan dibantu dua staf.

Staf pertama: sebuah staf militer

[yang terdiri atas staf TT-VII/Wirabuana yang ada],

Staf kedua: sebuah staf Pemerintahan yang dipimpin oleh

Letkol M. Saleh Lahede sebagai Kastaf,

Mayor Eddy Gagola sebagai Wakil Kastaf,

& Sekretariat yang dipimpin Kapten W.G.J.Kaligis.

Hubungan dengan seluruh daerah di wilayah Wirabuana [Indonesia Timur] tetap terpelihara, sekalipun menjelang pertengahan 1957, beberapa daerah telah dipengaruhi oleh pemerintah pusat serta MBAD.

Melalui jaringan pemerintah daerah serta organisasi pemuda, wanita, mahasiswa dan pers, Permesta merencanakan pembangunan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penerangan2 melalui pers dan RRI dilancarkan segera setelah upacara di Gubernuran itu.

Sejak itu berkumandang semboyan "Sekali Dua Maret, Tetap Dua Maret" yang diciptakan oleh Letkol Saleh Lahede, dan singkatan Permesta untuk Piagam "Perjuangan Semesta" diciptakan dan dipopulerkan oleh G. Kairupan, seorang pejabat Kantor Penerangan. Kedua semboyan itu senantiasa terdengar melalui RRI Makassar, Manado, dan Ambon.

3 Maret 1957

Rapat di Balai Perwira oleh Tim Asistensi Staf Pemerintahan Permesta yang dipimpin oleh Letkol M. Saleh Lahede [yang terbagi atas 10 seksi]. Dalam rapat ini dijelaskan bahwa tindakan 2 Maret bertujuan utama untuk mengatasi kekacauan di wilayah itu.

Hari ini juga Letkol Sumual sebagai Panglima TT-VII/Wirabuana & Kepala Pemerintahan Militer Indonesia Timur mengirim laporan tertulis kepada KSAD di Jakarta mengenai tindakan 2 Maret tersebut yang tetap mengakui Jakarta sebagai pemimpin yang sah. Ia juga melaporkan bahwa ia telah meningkatkan ketiga wilayah hukum Resimen Infanteri TT-VII/Wirabuana menjadi Komando Daerah Militer [KDM], yaitu KDM Sulutteng

dengan Mayor D.J. Somba sebagai komandan, KDM Maluku/Irian Barat dengan Mayor Herman Pieters sebagai komandan, KDM Nusa Tenggara dengan Mayor Minggu sebagai komandan; sedangkan Sulawesi Selatan dirangkap oleh Gubernur Andi Pangerang dengan pangkat Letkol Tituler. Keempat tokoh ini juga merangkap sebagai Gubernur Militer di masing2 daerah sesuai dengan ketentuan SOB [Staat von Oorlog en Beleg = Keadaan Darurat Perang].

4 Maret 1957

Rapat yang dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual dengan seluruh stafnya [yang hadir ±120 perwira & bintara]. Ia menekankan bahwa tindakan 2 Maret sama sekali bukan tindakan kudeta.

Hari ini juga, KSAD Mayjen A.H. Nasution menginstruksikan kepada Letkol R. Sudirman [yang memimpin 9 batalyon dari Divisi Brawijaya di Sulawesi yang diperbantukan untuk menumpas pemberontakan DI/TII], untuk tidak perlu mengambil tindakan apapun terhadap Letkol Sumual dan Gerakan Permesta-nya.

5 Maret 1957

Pemerintah Pusat mengirimkan utusan menemui Letkol Sumual di Makassar guna membicarakan masalah Permesta.

7 Maret 1957

Doktrin Eisenhower [dari Presiden AS waktu itu- Dwight Eisenhower] dijadikan UU oleh Senat Kongres AS sebagai sikap politik anti-komunis. Doktrin ini membawa AS untuk terlibat lebih jauh lagi dalam perpolitikan Indonesia untuk menjatuhkan komunis dengan memberi bantuan senjata kepada pihak2 yang meminta mereka untuk melawan komunisme internasional. [Permesta pada masa Pergolakan akhirnya menerima bantuan senjata tersebut, namun semuanya dibeli dengan cara barter].

8 Maret 1957

Terbentuknya Dewan Pertimbangan Pusat Permesta yang dipimpin Residen Andi Sultan Daeng Raja.

10 Maret 1957

Rapat umum di Lapangan Karebosi Makassar yang diselenggarakan oleh Tim Assistensi Staf Pemerintahan Permesta dan DPP Permesta untuk menyambut Piagam Permesta, yang dihadiri oleh sekitar 100.000 orang dari berbagai lapisan masyarakat.

12 Maret 1957

Mahkama Agung RI menyatakan bahwa Konsepsi Presiden tentang Kabinet Kaki Empat tidak menyalahi Undang2 Dasar [Konstitusi].

14 Maret 1957

Satu setengah jam setelah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo [dan Kabinet Ali II nya] menyerahkan mandatnya, maka Presiden Soekarno menyatakan bahwa seluruh wilayah teritorial Republik

Indonesia "DALAM KEADAAN DARURAT PERANG" [SOB=Staat van Oorlog en Beleg] .

Salah satu sebab utama dari keadaan ini adalah karena Proklamasi SOB yang telah dikumandangkan Panglima TT-VII/Wirabuana dalam wilayah Indonesia Timur, yang adalah komando daerah terluas di Indonesia saat itu [mencakup setengah wilayah NKRI] yang seharusnya hanya boleh dikumandangkan oleh presiden suatu negara.

15-22 Maret 1957

Rapat para Panglima Territorium dan SUAD di Istana Merdeka yang dihadiri semua panglimanya kecuali Letkol Achmad Husein yang berhalangan. Dalam rapat itu, KSAD Mayjen A.H. Nasution memutuskan untuk membubarkan TT-VII/Wirabuana dan membaginya menjadi 4 KDM [Kodam] terpisah seperti yang telah dilakukan Letkol Ventje Sumual sebelumnya, walaupun KSAD menyatakan menyetujui Piagam Permesta.

Sementara KSAD A.H. Nasution berunding dengan Letkol Ventje Sumual secara formal, Kolonel Sukendro, Asisten I [Intelijens] KSAD melancarkan operasi intelijennya. Para perwira bawahan dipecah-belah, emosi kesukuan dibakar, tindakan palsu dilontarkan. Banyak orang yang menjadi bingung dan guncang. Persatuan di antara para perwira berbagai suku bangsa itu mulai retak.

20 Maret 1957

Panglima TT-VII/Wirabuana Letkol Ventje Sumual mengeluarkan rencana pembagian wilayah TT-VII/Wirabuana dari 4 propinsi menjadi 6 propinsi:

1. Sulawesi Selatan/Tenggara --> ibukota Makassar
2. Sulawesi Utara/Tengah --> ibukota Manado
3. Maluku --> ibukota Ambon
4. Irian Barat --> ibukota Soasiu
5. Nusa Tenggara Barat --> ibukota Singaraja
6. Nusa Tenggara Timur --> ibukota Kupang

21 Maret 1957

Seluruh anggota Tim MBAD Korps Perwira SSKAD [sebuah korps reuni siswa SSKAD] mengadakan rapat yang menilai bahwa masalah pergolakan daerah mempunyai aspek sangat penting yang justru diabaikan dan dianggap sepele oleh KSAD Mayjen A.H. Nasution dalam keputusan dan tindakannya. Hasil rapat ini kemudian menimbulkan kemarahan KSAD Mayjen A.H. Nasution. Petisi 45 orang perwira tersebut dipaksa untuk mencabut pernyataan tersebut. Hanya 10 orang yang bertahan atas petisi tersebut.

April 1957

Sesuai dengan Piagam Permesta, Dewan Pertimbangan Pusat [DPP] Permesta menyusun delegasi untuk bertemu dengan para pejabat di Jakarta. Henk Rondonuwu bertindak sebagai ketua delegasi

dengan Andi Burhanuddin, Achmad Siala, dan Ny. Towoliu-Hermanses sebagai anggotanya. Delegasi ini ternyata bisa bertemu dengan Presiden Soekarno dan Bung Hatta, tetapi tidak sempat bertemu dengan Kabinet yang saat itu telah demisioner menyusul berita Peristiwa Proklamasi Permesta - 2 Maret di Makassar tersebut. Kepada Presiden, delegasi DPP mengusulkan agar 70% anggota Dewan Nasional yang akan dibentuknya itu terdiri atas wakil2 daerah. Selain itu sangat diharapkan agar Dwitunggal kembali rujuk untuk memimpin bangsa Indonesia selanjutnya. Delegasi juga menyampaikan undangan kepada Presiden dan Bung Hatta untuk menghadiri Kongres Bhinneka Tunggal Ika yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 1957 mendatang.

Dalam kesempatan ini, tentu saja delegasi mengalami hambatan dari pihak yang kurang senang dengan perkembangan di Indonesia Timur. Malah beberapa tokoh asal daerah Sulawesi menerima surat kaleng yang mengancam jiwa mereka.

9 April 1957

Presiden Soekarno mencoba membentuk kabinet baru setelah Kabinet Ali II meletakkan jabatan pada tanggal 4 Maret yang lalu. Setelah Suwirjo [dari PNI] gagal membentuk kabinet, maka Soekarno mengajak KSAD Mayjen A.H. Nasution ke Cipanas - Bogor untuk bersama2 membentuk kabinet itu.

Kabinet Darurat Ekstraparlementer ini tidak tergantung pada dukungan partai2. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri-nya seorang tokoh tak berpartai - yaitu Ir. H. DJUANDA.

Kabinet Djuanda ini diberi nama Kabinet Karya dan di dalamnya duduk dua orang anggota Angkatan Bersenjata.

Program Kabinet Karya disebut pancakarya, yaitu:

1. membentuk Dewan Nasional
2. normalisasi keadaan Republik Indonesia
3. melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4. perjuangan Irian Barat
5. mempergiat pembangunan

Kedudukan Djuanda juga pada hakikatnya tidak terlalu kuat. Yang menentukan perkembangan yang sesungguhnya di pusat adalah Presiden Soekarno [Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi] dan KSAD Mayjen A.H. Nasution.

Mei 1957

Gerakan Pembersihan Permesta diadakan terhadap orang2 komunis di Minahasa, kemudian mereka ini dikarantinakan di Gorontalo.

6 Mei 1957

Presiden Uni Soviet, Vorosylov, pemimpin Komunis Internasional berkunjung di Indonesia sampai tanggal 19 Mei 1957, memastikan bahwa Komunis Internasional mendukung Soekarno, antara lain dengan mengirim persenjataan dan menumpas Permesta yang anti-Nasakom, anti-Komunis.

8-12 Mei 1957

Kongres Bhinneka Tunggal Ika untuk memenuhi Piagam Permesta, dengan panitia yang dipimpin oleh Henk Rondonuwu, dihadiri oleh utusan dari 30 kabupaten se-Indonesia Timur, wakil2 dari kodya Makassar, tokoh2 asal Papua, para anggota DPP Permesta, wakil2 daerah di DPR [di Jakarta] dan Konstituante [di Bandung], yang mana seluruhnya berjumlah sekitar 1500 orang [merupakan pertemuan terbesar pertama di Indonesia Timur waktu itu]. Undangan juga dikirim kepada para pejabat di Jakarta & para gubernur se-Indonesia. Presiden Soekarno yang sebelumnya menyanggupi akan hadir, ternyata tidak hadir. Bung Hatta mengirimkan prasarannya melalui rombongan pimpinan adat Sumatra Barat, namun rombongan tersebut ditahan di Bandar Udara Kemayoran oleh KMKB Jakarta. Beberapa rombongan dari Ibukota Jakarta yang akan ke kongres tersebut juga ditahan. Para delegasi tersebut dibagi dalam seksi2 yang pada dasarnya didasarkan pada Piagam Permesta.

Dalam rancangan mengenai pembangunan yang dirumuskan dalam kongres, ditetapkan adanya rencana jangka pendek dan jangka panjang.

Rencana jangka pendek terutama bertujuan menggerakkan industri rakyat seperti penggaraman, modernisasi alat penangkap ikan, pengolahan sabuk kelapa, benang tenun, penggergajian kayu, pembuatan genteng, alat2 dari kulit, pembuatan perahu, pabrik sabun, penyelaman mutiara, berbagai minyak cengkeh, dan tembakau rakyat.

Rencana jangka panjang meliputi pembangunan pembangkit tenaga listrik, pabrik2 tekstil, minyak kelapa, semen, kapal, belerang, rokok, assembling kendaraan bermotor, pertambangan nikel di Pomala dan Sanggalopi, besi di Sumbawa, aspal di Buton, emas, perak, niel, bauksit, asbes, minyak tanah, dan lain sebagainya.

Rencana lain yang dihasilkan Kongres Bhinneka Tunggal Ika dari Seksi Pertahanan, berjudul "Dokrin Pertahanan Wilayah Indonesia Bagian Timur". Ditinjau dari segi strategi militer, Indonesia Bagian Timur menduduki posisi penting untuk perjuangan Irian Barat. Selain itu, diperlukan juga kewaspadaan agar konflik antara Blok Timur [komunis] dan Blok Barat tidak menjalar ke wilayah ini sehubungan dengan letaknya yang berbatasan dengan negara2 yang terikat dengan Blok Barat [Filipina dan Australia]. Untuk itu, sangat diperlukan satu komando untuk seluruh Wilayah Indonesia Timur. Sebab itu TT-VII/Wirabuana harus dipertahankan [Wilayahnya mencakup 4 propinsi: Sulawesi, Maluku, Kep.Sunda Kecil, Irian Barat]. Dari segi ekonomi, dokrin pertahanan tersebut mengandalkan pembangunan ekonomi yang bermaksud agar daerah ini mandiri [selfsupporting], dalam hal ini bahan2 vital yang akan juga membuka lapangan kerja baru.

14 Mei 1957

Direktur CIA, Allan Dulles dalam rapat National Security Council [NSC] Amerika Serikat melaporkan bahwa proses disintegrasi di Indonesia telah terjadi, dimana hanya Pulau Jawa saja yang masih dikendalikan oleh pemerintah pusatnya. State Departement AS mengirim Gordon Mein, Wakil Direktur kantor Urusan Pasifik Barat Daya, ke Jakarta untuk meneliti kebenaran berita disintegrasi tersebut. Dua hari di Jakarta, Gordon Mein mengirim laporan, membantah teori disintegrasi tersebut.

20 Mei 1957

Panglima TT-VII Letkol Ventje Sumual secara resmi mengadakan perjanjian pinjaman darurat sebesar Rp.100.000.000 dengan Bank Indonesia Cabang Makassar, sebagai dana pembangunan Indonesia Timur.

Pada hari ini juga dikeluarkan perintah kepada semua Daerah Tingkat II di wilayah Wirabuana [enam propinsi] untuk membentuk Panitia Pembangunan Daerah yang diketuai oleh kepala daerah dengan 10 anggota [tokoh2 Ormas, partai dan militer]. Panitia ini bertugas melaksanakan perbaikan pembangunan di daerah berdasarkan semangat gotong-royong, seperti perbaikan jalan2 dan sebagainya yang langsung dapat dipahami dan dirasakan faedahnya oleh rakyat banyak. Untuk itu, setiap kabupaten di Indonesia Timur menerima jatah 2 juta rupiah untuk proyek2 pembangunan yang direncanakan daerah2 bersangkutan.

Misalnya Sulawesi Selatan PLTD [Pusat Listrik Tenaga Diesel] Makale, Tana Toraja, dibangun dengan dana Permesta. Demikian pula pasar2 seperti di Matoangin [Ujungpandang], Markas Resimen 23 di Pare-pare, pusat latihan infanteri di Bilibili, depot batalion di Malino, dan Markas Resimen Hasanuddin di Jalan Lanto Daeng Pasewang.

Kemudian, setiap propinsi diwajibkan menyusun rencana pembangunan lima tahun sesuai dengan ketetapan dalam Piagam Permesta dan keputusan Kongres Bhinneka Tunggal Ika. Dana pembangunan diperoleh melalui ekspor kopra wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan beberapa tempat lain. Seperti ditentukan dalam Piagam, daerah2 yang tidak memiliki komoditi ekspor, ditunjang daerah2 lainnya, sehingga pembangunan bisa dilaksanakan secara merata.

26 Mei 1957

KDMSST [Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan/Tenggara] dengan Panglimanya Letkol Andi Mattalata & Kastaf Mayor CPM Hairuddin Tasning, diubah menjadi Kodam XIV/Hassanudin terpisah dari jajaran TT-VII Wirabuana oleh Mabes TNI-AD.

27 Mei 1957

Komando Daerah Militer [KDM] XVI/Udayana terbentuk, terpisah dari jajaran TT-VII/Wirabuana - Indonesia Timur.

6 Juni 1957

Briefing KSAD Mayjen A.H. Nasution kepada semua perwira TT-VII/Wirabuana yang akan dibubarkan di kediaman Gubernur Sulawesi dibatalkan kemudian dan diganti dengan rapat tertutup yang hanya dihadiri oleh Panglimanya Letkol Ventje Sumual, Kastaf TT-VII/Wirabuana Letkol M. Saleh Lahede, KSAD Mayjen A.H. Nasution, Kolonel Ahmad Yani serta Kolonel Dahlan Djambek. Dalam pertemuan tertutup ini, ia mengingatkan kembali akan pengkhianatan PKI di Madiun pada tahun 1948: "Kalau tuan2 ingin digantung PKI, silahkan, tetapi kami di Indonesia Timur menolak."

Dalam rapat itu juga Letkol Ventje Sumual mengusulkan membentuk Komando Antar Daerah Indonesia Timur [KOANDAIT] yang akan mengkoordinasikan keempat KDM di eks TT-VII/Wirabuana. Usul ini diterima KSAD. Sebagai panglima KOANDAIT ditetapkan adalah Letkol Ventje Sumual sendiri. Namun sebelum upacara serahterima dan pembubaran TT-VII 8 Juni mendadak KSAD mengumumkan bahwa KOANDAIT yang akan dibentuk akan dipimpinnya sendiri dan Letkol Ventje Sumual hanya akan menjadi kepala staf saja.

[NB: KOANDAIT ini menjadi cikal bakal Kowilhan/Komando Wilayah Pertahanan].

8 Juni 1957

Serah terima & pembubaran TT-VII/Wirabuana serta KDPSST [Komando Daerah Pengamanan Sulsel/Tenggara] dilaksanakan di Lapangan Karebosi Makassar.

Pembubaran TT-VII/Wirabuana dan pembentukan empat KDM yang terpisah di Indonesia Timur merupakan pukulan berat bagi Permesta.

10 Juni 1957

Letkol Ventje Sumual memerintahkan Letkol Saleh Lahede untuk mengumpulkan para eks. perwira TT-VII pendukung Permesta untuk mengadakan rapat di kediaman Saleh Lahede Jl. Sam Ratulangi Makassar. Hadir dalam rapat itu para Perwira seperti Mayor Andi M. Jusuf, Mayor CPM Her Tasning, Letkol Andi Mattalata, Mayor Dee Gerungan, Kapten Bing Latumahina, Letkol O.E. Engelen, Mayor Eddy Gagola, Kapten Lendy R. Tumbelaka, Mayor Sjamsuddin, dan Kapten Arie W. Supit.

Para perwira tersebut banyak yang mengusulkan agar Permesta bertahan terus, kalau perlu dengan cara kekerasan. Rapat itu ditutup dengan perjanjian akan merahasiakan keputusan itu agar tidak disabot rombongan KSAD. Namun malam itu juga, Mayor Andi M. Jusuf & Mayor CPM Her Tasning membocorkan keputusan rahasia tersebut ke rombongan KSAD di Gubernurnan Sulawesi.

[Waktu itu ada isu di kalangan rombongan KSAD bahwa Permesta telah mengarahkan meriam ke tempat tinggal rombongan KSAD, sehingga dipersiapkanlah sebuah panser untuk 'menjaga segala kemungkinan' penyerangan].

Karena secara formal Staf TT-VII telah dibubarkan, dengan demikian, juga Staf Pemerintah Militer yang dipimpin Saleh Lahede, maka sebelum meninggalkan Makassar menuju Manado, Ventje Sumual membentuk Dewan Tertinggi Permesta sebagai pucuk pimpinan Permesta. Susunan Dewan adalah sebagai berikut:

Ketua : Letkol H.N. Ventje Sumual
Wakil Ketua : Letkol M. Saleh Lahede
Sekretaris : Kapten Bing Latumahina
Anggota : antara lain Letkol dr.O.E. Engelen,
Ny.Mathilda Towoliu-Hermanses,
Makaraeng Mandarungi,
Mochtar Lintang,
J.M.Hutagalung,
J. Mewengkang,
Jan Engelbert Tatengkeng,
Laodo Manoarfa,
Abdul Muluk Makatita.

20 Juni 1957

Sulawesi Utara/Tengah menjadi sebuah propinsi oleh Pemerintah Militer Permesta.

23 Juni 1957

Dalam sebuah rapat di Kinilow, Letkol Ventje Sumual mengumumkan kesediaannya untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk mempertahankan dirinya sebagai Panglima TT-VII/Wirabuana, ia mengumumkan kesediaan memenuhi keinginan masyarakat itu.

Namun ia menandakan, gerakan Permesta bukanlah gerakan separatisme. Penyelesaian yang wajar dengan pemerintah pusat, tetap tujuannya.

Sepanjang sejarah Permesta, lambang2 kebangsaan Indonesia seperti bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang Bhineka Tunggal Ika, serta hari Proklamasi, tetap dijunjung tinggi dan bermakna seperti wilayah2 lain di Indonesia. Perayaan hari Proklamasi 1957, umpamanya tidak kurang meriah daripada tahun2 sebelumnya.

Rapat umum yang diselenggarakan di lapangan Sario [Manado], dihadiri sekitar 40.000 orang, dilanjutkan dengan resepsi di Gubernurnan. Gubernur Manoppo, Panglima Sumual dan Mayor D.J. Somba memberi sambutan yang meyakinkan.

20 Juni 1957

Di Sulawesi Utara-Tengah diproklamirkan Propinsi Sulawesi Utara, dihadiri Letkol Ventje SUMUAL, Mayor D.J. SOMBA, Kolonel Dahlan DJAMBEK, dll. Konferensi dinas yang diselenggarakan di Kotamobagu itu dihadiri oleh Letkol H.N. Ventje Sumual dan stafnya, Kolonel Dahlan DJAMBEK, dll. Malah Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, yang beristrikan orang Minahasa - Dorah Sigar, yang ketika itu berada di Manado juga menghadirinya.

Dalam rapat itu diputuskan, mengangkat H.D. Manoppo, seorang residen Bolmong [sekaligus raja Bolaang Mongondow] yang banyak pengalaman dalam masalah pemerintahan daerah, sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah. Wilayahnya dibagi dalam enam kabupaten dan satu kotamadya yaitu:

1. Kotamadya Manado
2. Kabupaten Minahasa
3. Kabupaten Gorontalo
4. Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kabupaten Sangir Talaud
6. Kabupaten Sulawesi Tengah
7. Kabupaten Tanah Toraja

5-9 Juli 1957

Kongres Pemuda Indonesia Timur digelar.

Ide Kongres itu lahir setelah Bhinneka Tungga Ika di Ujungpandang, Mei 1957. Ketika itu, Ketua Badan Musyawarah Dewan Pemuda Indonesia Timur, R.A. Daud, mengusulkan para pemuda harus juga mengadakan kongresnya sendiri. Pelaksanaannya diserahkan kepada Komando Pemuda Sulawesi Utara oleh tokoh2 yang pernah bergabung dalam Dewan Manguni di Manado sebelum 2 Maret 1957.

Kongres Pemuda Indonesia Timur ini dilangsungkan di Tondano, dengan Jan Torar sebagai Ketua Panitia. Berbagai organisasi pemuda pelajar dan mahasiswa seluruh Indonesia Timur mengirimkan wakil2nya ke Tondano, malah wakil2 tersebut diambil dari wilayah tingkat II dan mendapat bantuan pemerintah setempat.

Salah satu keputusan penting dalam Kongres Pemuda Indonesia Timur ini adalah pembentukan suatu wadah tunggal yang dinamakan Komando Pemuda Permesta [KoP2] dengan suatu pimpinan utama dan beberapa departemen, seperti Departemen Pengerahan Tenaga, Pertahanan, Pendidikan dan Kebudayaan, Ekonomi dan Sosial, Keuangan, Agama dan Umum. Untuk periode pertama Kongres memilih Jan Torar yang memimpin Departemen Pengerahan Tenaga untuk menjadi Pemimpin Umum KoP2. Pimpinan lainnya adalah P.M. Tos [Departemen Pertahanan], Badar Alkatiri [Departemen Agama], Assegaf [Departemen Sosial Ekonomi], Abdul Chalil [Departemen Umum].

Ketika timbul konflik senjata pada 1958, sejumlah besar anggota KoP2 di wilayah Sulawesi Utara dan Tengah dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi anggota pasukan Permesta. Sebelum itu, kegiatan KoP2 adalah membantu pemerintah daerah masing2 mengerahkan tenaga dan dana untuk melancarkan pembangunan di daerah2. Hasil yang dicapai organisasi pemuda ini secara swadaya, misanya seperti pembangunan berbagai gedung2 yang dijadikan kantor Gubernur Daerah Sulawesi Utara sampai sekarang 80 buah - dan jalan cukup membanggakan.

Selain itu di Sulawesi Selatan terbentuk Parlemen Pemuda Permesta Wirabuana dengan pimpinan Matulada.

Pada tanggal 11 November 1957, Letkol Ventje Sumual, sebagai pimpinan tertinggi Permesta, menggabungkan organisasi2 pemuda itu menjadi Dewan Tertinggi Pemuda Permesta dengan kedudukan di Makassar.

23 Juli 1957

Persetujuan Kinilow antara Pemerintah Pusat dan Pimpinan Permesta

Dalam pertemuan yang bersifat ramah-tamah yang diadakan di Pesanggrahan Kinilow, pada tanggal 23 Juli 1957 antara Pemerintah Pusat yang diwakili

[1] Menteri Kehakiman G.A. Maengkom,
[2] Menteri Perindustrian Ir. F. Ingkiriwang,
[3] Duta Besar RI di Canada L.N. Palar,
[4] Anggota Konstituante Arnold Mononutu di satu pihak, dan Penguasa Militer Sulawesi Utara dan Stafnya di lain pihak, maka yang disebut pertama dengan maksud membuka kesempatan guna membicarakan persoalan2 pokok sebagai yang tercantum dalam Piagam Permesta, dengan ini menyatakan menyetujui hal2 tersebut di bawah ini:

1. Surat Keputusan Panglima/Penguasa Militer TT VII/ Wirabuana No. Kpts. 0139/36/1957 tentang pembagian Indonesia Bagian Timur dalam enam provinsi otonom sebagai yang dimaksud dalam Surat Keputusan No. Kpts. 0149/36/1957 dan Surat Keputusan No. 0141/36/1957.
2. Anggaran Belanja Provinsi Sulawesi Utara diterima langsung oleh Provinsi tersebut mulai pada hari pembentukannya.
3. Routine bergrontingen daerah2 Tingkat II serta verticale diensten yang belum lagi diterima segera akan dikirimkan oleh pemerintah pusat.
4. Penyelenggaraan impor dan ekspor sejak 2 Maret 1957 di dalam wilayah Sulut tetap berlaku sehingga adanya penyelesaian terakhir dari pada persoalan2 antara pemerintah pusat dan daerah2.
5. Pemerintah Pusat menjamin perhubungan laut dan udara interinsulair.
6. Pemerintah Pusat akan melenyapkan segala kesulitan2 yang dialami oleh Sulut dalam perdagangan intersulair.
7. Pembentukan Universitas di Sulawesi Utara.

Demikianlah keputusan Pemerintah Pusat dalam menyatakan menyetujui hal2 yang disebut di atas, lepas dari pada persoalan2 pokok sebagai yang tercantum dalam Piagam Perjuangan Semesta Wilayah TT-VII Wirabuana.

Dikeluarkan di: Kinilow

Pada tanggal: 23 Juli 1957

Mengetahui: Panglima/Penguasa Militer TT-VII/Wirabuana

Tertanda: G.A. Maengkom

Ir. F. Ingkiriwang

A. Mononutu

Demikianlah resmi pernyataan kedua pihak untuk kepentingan umum [khalayak ramai]. Selain itu, kesimpulan akhir pembicaraan kedua belah pihak adalah, Misi akan mengajukan kepada Pemerintah Pusat hal2 sebagai berikut:

1. Gubernur2 Militer Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi Utara segera dilantik.
2. Letkol Sumual dilantik sebagai Panglima Komando Indonesia Timur.
3. Staf Komando Indonesia Timur ditentukan atas usul Panglima.
4. Stabilitas Angkatan Darat harus dicapai melalui musyawarah kolegal dengan ketentuan bahwa musyawarah yang dimaksud sudah harus dimulai dalam waktu satu bulan sesudah Misi tiba di Jakarta.

Rombongan Misi Pemerintah Pusat ke Sulawesi Utara itu terdiri atas Menteri Kehakiman G.A. Maengkom, Menteri Perindustrian F. Inkiriwang, Duta Besar RI di Kanada Lambertus N. Palar, anggota Konstituante Arnold Mononutu.

Pada saat yang sama, Gubernur Sulawesi Utara H.D. Manoppo sedang menghadiri Konferensi Gubernur se-Indonesia di Jakarta. Ia mendapat kepastian dari beberapa menteri di Jakarta, bahwa pembentukan propinsi di Sulawesi Utara adalah maksud pemerintah pula.

Sebelum mengadakan pembicaraan dengan Dewan Tertinggi Permesta, misi Maengkom mengadakan peninjauan ke pelbagai daerah. Mereka menyaksikan sendiri, pembangunan wilayah ini memang benar2 berhasil. Di mana2 rakyat menyambut mereka dengan gembira. Rapat2 umum diselenggarakan di berbagai tempat untuk memberikan kesempatan kepada rombongan dari pusat itu untuk menjelaskan kepada rakyat tentang maksud tujuan kedatangan mereka.

Kemudian Misi Pemerintah Pusat itu kembali ke Jakarta serta melaporkan hasil perundingan tersebut. Namun tampaknya Pemerintah Pusat [Kabinet Djuanda] seolah2 tidak mempedulikan isi dari persetujuan tersebut.

Dari seluruh daerah di Indonesia Timur, wilayah Sulawesi Utaralah yang paling giat membangun. Ini terutama berkat hasil kopra yang demikian besar di daerah ini. Penanganan ekspor kopra di wilayah ini dikendalikan suatu badan koordinasi yang dipimpin J.M.J. Pantow. Dari dana yang terkumpul itu, setiap bupati kepala daerah mendapat sejumlah dana untuk melaksanakan pelbagai proyek menyangkut pembuatan jalan, jembatan, sekolah2 dan sebagainya.

Sudah sejak Juni 1957, rakyat berbondong2 melaksanakan pelbagai proyek dengan semangat mapalus [gotong-royong]. Lebih dari 100 orang desa Tompasso, Amurang, Radey, Sapa, Tengah, Pakuweru dan Pakuure berhasil membangun jalan 6 km yang menghubungkan desa2 itu. Jalan antara Manado dan Tomohon

sepanjang 25 km pun mulai ditingkatkan dan diperlebar. Dengan bantuan TNI, rakyat berhasil membangun jalan yang menghubungkan m Kinalawiran dan Tompasso Baru di Minahasa Selatan. Desa2 Liningaan, Kinaweruan dan Tumani berhasil membangun sebuah bendungan di Sungai Ranoyapo untuk mengairi sekitar 100 hektar lahan pertanian. Rakyat Tonsea dengan pimpinan Bupati juga berhasil merehabilitasi jalan di wilayah itu sepanjang 120 km. Di Tombasian, rakyat bermapalus membangun pelbagai proyek seperti rumah sakit umum, gedung SMP, gedung SD, saluran air, serta jalan2 baru yang menghubungkan desa itu dengan desa2 sekitarnya. Di desa Pinangsungkulan, sebuah bank desa berhasil dibangun. Dan masih banyak lagi proyek2 yang tidak seluruhnya dapat dilaporkan dalam pers setempat.

Tidak saja Kabupaten Minahasa mendapat alokasi dana untuk pembangunan. Juga Kabupaten Bolaang Mongondow memperlihatkan kegairahan yang luar biasa pada 1957. Demikian pula Kabupaten Sangir Talaud. Setiap distrik mendapat kesempatan membangun jalan baru atau merehab jalan2 lama, serta membangun dan merehab gedung2 sekolah, poliklinik dan lainnya. Di Sulawesi Tengah, pembangunan berjalan lancar di sekitar kota Poso, Banggai sampai Kabupaten Makale, Rentepao di Tanah Toraja. Sulawesi Utara mampu mengerahkan sekitar 10.000 tenaga kerja untuk pembangunan. Terutama pembangunan jalan arteri yang menghubungkan Manado dan Bitung. Jalan antara Manado dan Gorontalo lewat Kotamobagu mulai dirintis Permesta dengan menggunakan tenaga2 pemuda yang tergabung dalam KoP2 itu. Pemerintah Militer senantiasa menyediakan pelbagai peralatan seperti truk, bulldoser, semen, aspal, dan lain2nya untuk pelbagai proyek yang spontan direncanakan penduduk desa.

Agustus 1957

John M. Allison, Duta Besar Amerika di Jakarta dalam bulan ini, mengingatkan dalam satu laporan rahasia bahwapergolakan di Indonesia bukan soal anti komunis lawan komunis semata2. Pembangkangan oleh pemimpin2 di daerah2 disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah Pusat dan adanya perasaan masyarakat di Pulau Jawa yang merasa diri mereka lebih [superior] dibanding penduduk di daerah2.

16 Agustus 1957

Pidato radio Letkol H.N. Ventje Sumual dalam rangka menyambut Hari Proklamasi 17 Agustus 1957 membuat pihak umum di Jakarta mengetahui sikapnya. Dalam pidato tersebut Sumual menyerukan mutlaknya diusahakan adanya situasi tenang, baik di ibukota negara maupun di daerah2, sebagai prasyarat berlangsungnya Musyawarah Nasional bulan September yang akan datang. Ia juga menganjurkan agar penyelenggaraan Munas itu diselenggarakan kepada pihak2 yang dapat diandalkan, termasuk pihak Angkatan Darat. Selain itu, Sumual juga menjeaskan beberapa masalah mendasar yang menyangkut fungsi dan tugas pemerintah, serta peran

Permesta. Menurut pendapatnya, "Kemakmuran rakyat adalah wewenang tertinggi suatu negara."

Dalam hal ini, Permesta telah memberi contoh nyata, seperti tampak dalam usaha2 pembangunan serta swadaya masyarakat yang dibangkitkannya. Ia juga menilai, pembentukan Permesta serta tindakan2nya didasarkan pada prinsip yang luas, yaitu 'legal idealisme'.

17 Agustus 1957

Perayaan hari Proklamasi 1957 di Sulut tidak kurang meriah daripada tahun2 sebelumnya.

Rapat umum yang diselenggarakan di lapangan Sario [Manado], dihadiri ±40.000 orang, dilanjutkan dengan resepsi di Gubernurnan. Gubernur H.D. Manoppo, Panglima Letkol Ventje Sumual dan Mayor D.J. Somba memberi sambutan yang meyakinkan.

31 Agustus 1957

Negara Malaya / Malaysia menyatakan kemerdekaannya dari Inggris. Pemerintah Malaya yang telah merdeka secara resmi tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, tetapi tidak dapat menghalangi hubungan pribadi antara beberapa tokoh dari daerah bergolak dengan golongan2 tertentu di Malaya.

3 September 1957

Trauma akibat jatuhnya Cina ke tangan Komunis begitu pahit bagi Amerika Serikat sehingga hari ini tim antar-Departemen Tentang Masalah Indonesia dibentuk oleh State Departement & CIA [c.q. Kepala Desk Indonesia-Malaysia CIA, J.B. Smith] tanpa mengikutsertakan Duta Besar AS di Jakarta John M. Allison.

8 September 1957

Pertemuan tiga Panglima daerah bergolak di Palembang [Letkol Barlian, Letkol Achmad Husein, Letkol Ventje Sumual] bersama staf sekitar 30 orang dan hasil perundingan tersebut dirumuskan dalam Piagam Palembang yang ditandatangani oleh semua yang hadir [namun naskah yang disebarluaskan ternyata hanya mencantumkan nama2 Letkol A. Husein, Letkol Barlian, Letkol H.N.V. Sumual].

Piagam Palembang yang intinya berisi:

- [1] Rukunnya/pulihnya kembali Dwitunggal Soekarno-Hatta,
- [2] penggantian kepemimpinan Angkatan Darat,
- [3] pembentukan Senat,
- [4] otonomi daerah [desentralisasi],
- [5] pelarangan terhadap komunisme.

Kelima masalah ini merupakan intisari rencana [tuntutan] dari Dewan Banteng, Dewan Garuda, pemikiran Kolonel Maludin Simbolon dan Permesta.

10-14 September 1957

Munas [Musyawarah Nasional] diadakan di Gedung Proklamasi, Jl.Proklamasi No.56 Jakarta.

10-14 September 1957

Munas [Musyawarah Nasional] diadakan di Gedung Proklamasi, Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta yang dipimpin Presiden Soekarno. Delegasi dari Sulawesi Utara adalah Komandan KDM Sulut Mayor D.J. SOMBA, Letkol H.N. Ventje SUMUAL [penasihat delegasi], Gubernur H.D. Manoppo, Sabu, Sam Kesaulya, Bija, A.C.J. Mantiri.

Delegasi dari Sulawesi Selatan adalah Gubernur/Gubernur Militer Kol. Tituler Andi Pangerang, Letkol M. Saleh Lahede [penasihat delegasi], Mayor Andi Muhammad Jusuf, Henk Rondonuwu, Andi Burhanudin [Residen Makassar].

Munas ini membicarakan 3 masalah:

- [1] Pemulihan kembali Dwitunggal Soekarno-Hatta,
- [2] Pelaksanaan pembangunan Nasional,
- [3] Perubahan pimpinan Angkatan Darat.

Sedangkan masalah "larangan terhadap komunisme" tidak diangkat untuk dibicarakan dalam Munas ini.

Hasil keputusan Munas ini adalah:

- [a] masalah Dwitunggal, setuju untuk dipulihkan kembali
- [b] pembangunan, segera akan diadakan Munas
- [c] masalah AD ditangani oleh Panitia-7 [Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Dr. J. Leimena, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Azis Saleh, Mayjen A.H. Nasution]

17 September 1957

Menteri Kehakiman G.A. MAENGGOM yang memimpin Misi Pemerintah Pusat ke Sulawesi Utara/Minahasa dan menemui tokoh2 Permesta untuk penyelesaian secara damai masalah Permesta, hari ini mengadakan rapat umum di Lapangan GMIM Pinaesaan Langowan guna menjelaskan maksud misi pemerintah pusat ini. Turut berbicara dalam rapat itu yaitu Panglima TT-VII Wirabuana Letkol H.N. Ventje SUMUAL.

23 September 1957

Universitas Permesta didirikan di Manado, yang merupakan salah satu proyek yang penting Permesta. Pada mulanya, digunakan sebuah bangunan di Kawasan Sario.

Rektor pertamanya, Mayor Dolf Runturambi, yang memegang jabatan Kepala Staf Gubernur Militer Sulawesi Utara Tengah. Universitas Permesta ini akhirnya digabungkan dengan Universitas Pinaesaan menjadi Universitas Sulawesi Utara [UNISUT, kemudian menjadi UNSRAT] tanggal 17 September 1961.

Juga PTPG [Perguruan Tinggi Pendidikan Guru] di Tondano, mendapat perhatian istimewa. Gedung2 baru serta perpustakaan dibangun di sini. Para mahasiswa pun mendapat tunjangan pendidikan yang memuaskan.

28 September 1957

Mayor Daniel J. Somba menjadi Komandan Komando Daerah Militer Sulawesi Utara [KDM-SUT].

30 September 1957

Presiden Soekarno berkunjung ke Minahasa didampingi oleh tokoh nasional Ruslan Abdulgani dan Duta Besar AS untuk Indonesia John M. Allison serta diterima oleh Gubernur Militer

[KDM/Kodam Minahasa] Overste D.J. Somba.

Beliau berkunjung di Universitas Permesta Manado serta mengadakan kuliah umum serta dialog terbuka dengan para mahasiswa, kemudian berkunjung ke Tomohon dan Tondano dengan mobil jeep terbuka, serta menghadiri perayaan HUT Sinode GMIM ke-23 di Gereja SION Tomohon dan berpidato: "...bahwa Ketuhanan itulah sendi utama Republik Indonesia. Demikian Tuhan adalah pegangan kita".

Jamuan makan HUT GMIM tersebut dilaksanakan di Kantor Sinode GMIM dan dihadiri oleh Duta Besar Amerika Serikat dan Letkol D.J. Somba.

Situasi dan kondisi saat itu sedang memanas, antara Pusat dengan Permesta, sehingga peristiwa ini mendapatkan keuntungan tersendiri bagi Permesta, dan menambah dukungan moril bagi Permesta, menumbuhkan keyakinan pada masyarakat umum bahwa gerakan Permesta adalah sah2 saja oleh pemerintah pusat.

1 Oktober 1957

Rencana rahasia RRC di Peking [Beijing] untuk menguasai seluruh kepulauan di Pasifik dan Asia Tenggara sampai Pakistan hingga tahun 1968.

11 November 1957

Letkol Ventje Sumual menggabungkan organisasi2 pemuda Permesta menjadi Dewan Tertinggi Pemuda Permesta yang berkedudukan di Makassar.

25 November 1957

Musyawarah Nasional Pembangunan [MUNAP] dilaksanakan di Jakarta. Tujuannya terutama adalah membahas dan merumuskan usaha2 pembangunan sesuai dengan keinginan daerah2. Letkol H.N. Ventje SUMUAL mengikuti MUNAP [Musyawarah Nasional Pembangunan] di Jakarta yang dipimpin Presiden Soekarno ini. Ia dan beberapa perwira daerah bergolak sempat ditangkap sebelum mengikuti MUNAP akibat Peristiwa Cikini yang terjadi tanggal 30 November [yang menuduh pihak Daerah Bergolak sebagai dalangnya] namun segera dibebaskan. Kemudian Letkol Ventje Sumual melaporkan esensi Proklamasi Permesta 2 Maret 1957. MUNAP ini tidak dihadiri oleh Letkol Achmad HUSEIN dari KDM Sumatera Tengah yang memimpin pemerintah sendiri di Sumatera Barat dengan Dewan Bantengnya. MUNAP ini berakhir tanggal 4 Desember tahun itu.

30 November 1957

Terjadinya Tragedi Nasional: Peristiwa Cikini.

Aksi spontanitas penggranatan sebagai percobaan pembunuhan

terhadap Presiden Soekarno di Perguruan Cikini yang dituduhkan oleh orang2 tertentu [terutama PKI] untuk mendiskreditkan dan memfitnah Daerah2 Bergolak sebagai dalangnya.

Beberapa tokoh politik dan militer di Ibukota mulai menyingkir ke daerah2 yang dianggap aman dari fitnahan dan aksi kekerasan [dari golongan komunis] akibat dari Tragedi Cikini ini. Mereka antara lain Mr. Sjarifuddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, Kolonel Zulkifli Lubiz, Kolonel Dahlan Djambek, dan lain2. Letkol Ventje Sumual dan beberapa perwira yang sedang mengikuti Musyawarah Nasional Pembangunan [Munap] sempat ditahan namun segera dibebaskan dan diijinkan untuk mengikuti lanjutan Munap tersebut.

Desember 1957

Komando Daerah Militer [KDM] XIII/Merdeka - Sulawesi Utara/Tengah dibentuk, terlepas dari jajaran TT-VII/Wirabuana yang dibubarkan KSAD TNI.

Pembubaran TT VII/Wirabuana dan pembentukan empat KDM yang terpisah di Indonesia Timur, merupakan pukulan berat bagi Permesta. Hal ini menyebabkan perkembangan kegiatan Permesta di berbagai daerah, kecuali Sulawesi Utara, mengalami kemunduran. Para Panglima KDM yang sebelumnya menyetujui gagasan Permesta, telah mengubah haluan, kecuali Letkol D.J. Somba dan Letkol Minggu.

"Operasi Intelijen" Sukendro untuk memecah belah para perwira pro Permesta ternyata berhasil; selain itu, para Panglima KDM juga otomatis mendapat kenaikan pangkat menjadi Letnan Kolonel.

Desember 1957

Barnabas Banggur, seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Makassar [kemudian menjadi Pengacara di Jakarta] - kembali ke kampung halamannya, Flores, untuk mengkoordinasikan para pemuda setempat. Dengan dana yang disediakan Permesta, mereka berhasil membangun sebuah gedung Pemuda Permesta yang digunakan pertama kalinya untuk menyelenggarakan suatu Kongres Pemuda setempat pada Desember 1957. Gedung ini berdiri dengan megah di pinggir pantai Kota Ende, ibu kota Kabupaten Ende [Flores Tengah], dan digunakan sebagai gedung pemerintahan daerah. Juga dibangun dermaga di Larantuka yang digunakan pihak Misi Katolik untuk menyimpan/menyandarkan kapal2 motor mereka. Untuk pembangunan Flores bagian Barat yang dikenal sebagai Daerah Swapraja dengan ibu kota Ruteng, Permesta menyumbangkan beberapa ribu sak semen untuk membantu pembangunan rumah pegawai, pegawai negeri, guru2 yang berpenghasilan rendah yang bertempat tinggal di Kota Ruteng.

Penyerahan ribuan sak semen itu disaksikan Penguasa Militer setempat [Flores] Fredy Lumanauw, Kepala Pemerintahan Swapraja Manggarai [KPS], P. Salasa dan Barnabas Banggur yang saat itu masih mahasiswa.

Permesta mempersiapkan pula pembentukan provinsi Nusa Tenggara Timur dengan singkatan NTT. Pembentukannya direalisasikan Pemerintah Pusat, Desember 1958, dengan Gubernur pertamanya Lalamentik, dan pemekaran kabupaten menjadi 12 buah.

Bersamaan dengan persiapan pembentukan Provinsi NTT, Permesta juga mempersiapkan pemekaran pembentukan daerah tingkat II/Kabupaten, antara lain, Daerah Flores yang sebelumnya hanya satu Kabupaten, direncanakan dan direalisasikan menjadi 5 Kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Manggarai dengan Ibu kota Ruteng
2. Kabupaten Ngada dengan Ibu kota Bajawa
3. Kabupaten Ende-Lio dengan Ibu kota Ende
4. Kabupaten Sika dengan Ibu kota Maumere
5. Kabupaten Flores Timur dengan Ibu kota Larantuka

Realisasi pemekaran Propinsi Nusatenggara baru dilakukan tahun 1958 oleh pemerintah pusat, dengan membaginya menjadi Daerah Swantara Tingkat Pertama: Bali, Nusatenggara Barat/NTB, dan Nusatenggara Timur/NTT.

7 Desember 1957

Hari ini terbentuk pula Persatuan Wanita Permesta Wirabuana dengan Ny. Mathilda Towoliu-Hermanses sebagai ketua. Anggota pengurus lainnya, antara lain, Ny. E.Sigar, Ny. Fachruddin, Ny. Sam Kesaulya, Ny. Saleh Lahade, dengan Ny. Andi Burhanuddin, Ny. R. Warouw, dan Ny. Depu sebagai penasihat.

Pada hari ini juga, di daerah Poso - Sulawesi Utara [Tengah], dua peleton TNI dengan senjata lengkap masuk hutan menentang kelompok Permesta. Tindakan ini diikuti pula oleh sejumlah anggota kepolisian, pimpinan pemerintahan sipil serta lebih kurang 2000 orang rakyat daerah tersebut. Tindakan ini juga karena tuntutan mereka agar supaya daerah Sulawesi tengah dijadikan Daerah Swantara Tingkat Pertama [Propinsi] tidak dikabulkan Permesta.

17 Desember 1957

Kedadaan darurat perang oleh Presiden ditingkatkan menjadi "KEADAAN BAHAYA PERANG" sehingga APRI [TNI] lebih leluasa mengambil tindakan2 tegas.

Januari - Juni 1957

Kopra yang diekspor dari wilayah Minahasa selama periode bulan Januari-Juni 1957:

- Antar pulau sejumlah 13.972 ton
- Ke luar negeri 34.170 ton kopra
- * Barter kopra dengan beras per kilogram yang oleh Permesta perbandingannya adalah 1:1 kg, serta yang dibarter di Singapura ada sekitar 230.000 ton kopra

1 Januari 1958

Pimpinan Pemerintah di Manado menyatakan bahwa di Propinsi SUT [Sulawesi Utara] telah dibentuk jawatan2 tingkat propinsi mendahului sesuatu putusan dari Pemerintah Pusat di Jakarta. Pemerintahan Sulawesi Utara tersebut dipimpin oleh Gubernur H.D. Manoppo, bekas Residen Bolmong.

Pangkat Letnan Kolonel [Overste] resmi disandang oleh Daniel J. Somba selaku Komandan KDM-SUT terhitung bulan ini.

6 Januari 1958

Presiden Soekarno meninggalkan tanah air guna memulai perjalanan kunjungan kenegaraan ke berbagai negara seperti Jepang, India, dan negara Asia lainnya.

KSAD Mayjen A.H. Nasution memberikan ceramah di Magelang mengharapkan sebuah dual role untuk militer: baik untuk kekuatan militer [pertahanan negara] dan organisasi untuk pengembangan sosial kemasyarakatan [pertahanan kemasyarakatan]. Permulaan dari doktrin "Dwifungsi TNI" [Dwifungsi ABRI].

8 Januari 1958

PM Ir.Djuanda memerintahkan ADRI, ALRI, AURI dan Jawatan Pabean untuk menghentikan semua perdagangan barter. Daerah2 yang tidak memenuhi larangan perdagangan barter tersebut diancam akan diblokir.

9 & 13 Januari 1958

Pertemuan di Sungai Dareh Sumatera Barat yang dihadiri oleh para tokoh TNI di daerah Letkol Achmad Husein, Letkol Ventje Sumual, Kol. M. Simbolon, Kol. Dachlan Djambek, Kol. Zulkifli Lubiz, serta tokoh2 sipil [yang menyingkir akibat tekanan golongan komunis] seperti Moh. Natzir, Sjarif Usman, Burhanuddin Harahap, Sjafruddin Prawiranegara.

Saat itu Dewan Perjuangan [dewan yang menghadapi konflik intern TNI pusat-daerah] yang semula hanya terdiri atas Ahmad Husein, Sumual, Simbolon dan Barlian, disempurnakan dengan memasukkan tokoh2 politik sehingga susunan keanggotaannya menjadi sbb:

Ketua : Achmad Husein
Sekjen : Dahlan Djambek
Anggota : H.N.Ventje Sumual,
Maludin Simbolon,
Zulkifli Lubis,
Sjoeib,
Anwar Umar,
Mohammad Natsir,
Sjafruddin Prawiranegara,
Burhanuddin Harahap,
Sumitro Djojohadikusumo,
W.P. Nainggolan,

Nawawi,
S.P. Hutabarat,
A.N. Nusjirwan,
Amelz.

Letkol Ventje Sumual menjamin bahwa dapat mengirimkan suatu squadron pesawat asing dan kemungkinan besar Armada Ketujuh Amerika Serikat akan menyokong PRRI/ Permesta asal saja betul akan tercapai "apa yang dicita2kan" [terutama soal komunisme].

5 Februari 1958

Letkol Ventje Sumual pada pers di Tokyo menyatakan bahwa dia dan kawan2ya akan berjuang terus melawan kaum komunis dan semua kaki tangan mereka.

Di Tokyo juga dia sempat bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Letkol Sumual juga diberitakan bahwa ia telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles [yang baru usai menghadiri Konferensi SEATO di Manila], di Taipei - Taiwan.

10 Februari 1958

Ultimatum agar PM Djuanda dan kabinetnya mengundurkan diri oleh tokoh2 TNI di daerah yang bertemu di Sungai Dareh dengan nama Dewan Perjuangan yang dipimpin Letkol Achmad Husein pada pukul 10:00 mengumumkan keputusan sidang dewan tersebut:

"5 x 24 jam Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Djuanda; dan Presiden menugaskan Drs. Moh. HATTA dan Sri SULTAN HAMENGKUBUWONO IX untuk membentuk Zakine Kabinet".

Ultimatum ini disiarkan oleh 37 pemancar dan sender radio di Sumatera Barat.

Saat itu rombongan Letkol Ventje Sumual belum kembali dari luar negeri dalam rangka pembelian senjata.

Letkol Ventje Sumual mengirim kawat kepada Letkol D.J. Somba di Minahasa agar menunggu kedatangannya sebelum mengambil keputusan.

11 Februari 1958

Kabinet Djuanda menolak tuntutan Piagam Sungaidareh tersebut dan memerintahkan agar KSAD memecat Letkol Achmad Husein dan Kolonel Maludin Simbolon serta membekukan komando KDMSTT [Komando Daerah Militer Sumatera Tengah] dan menghentikan sama sekali hubungan darat maupun udara dengan Sumatra Tengah seperti yang telah dilakukan di Sulawesi Utara. KDM-SST kemudian ditempatkan langsung dibawah KSAD.

12 Februari 1958

Dua hari kemudian, Kota Padang dibom oleh AURI sebagai jawaban atas ultimatum tersebut.

14 Februari 1958

Pada Hari Doa Sedunia, 2 pesawat pembom AURI menghancurkan 4 buah pesawat pembom B-26 yang diawaki orang Taiwan yang belum sempat tinggal landas di Lapangan Kalawiran - Kakas pada sore hari, sementara itu 4 pesawat Mustang AURI lainnya melancarkan tembakan mitraliurnya di tempat2 yang dicurigai menjadi sarana2 vital Permesta.

Peristiwa ini membuat umat Kristen Oikoumene yang sedang mengadakan Ibadah Hari Doa Sedunia di Lapangan GMIM Pinaesaan Langowan dalam posisi tiarap.

15 Februari 1958

Seleksi kilat tentara2 pelajar CTP [Corps Tentara Peladjar - Permesta] dilaksanakan di beberapa daerah Minahasa. Antara lain di asrama Desa Sumarayar - kompleks kediaman Bupati/KDM Minahasa Laurens Saerang [pemimpin Brigade Manguni] dan memulai latihan kemiliteran dalam Kompi I Batalyon Manguni dengan Kapten Penjata Gustaf Rungkat sebagai Komandan Kompi.

Hari ini, kabinet tandingan PRRI [Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia] diumumkan di Bukittinggi - Sumatera Tengah pukul 22.30 sebagai jawaban atas ultimatum yang tidak dijawab pemerintah pusat, dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.

Susunan Kabinet PRRI adalah:

- Perdana Menteri & Menteri Keuangan : Mr. Sjafruddin Prawiranegara
- Menteri Luar Negeri : Kolonel Maludin Simbolon
- Menteri Dalam Negeri : Kolonel Dahlan Djambek
- Menteri Pembangunan & Pekerjaan Umum / Wakil Perdana Menteri : Kolonel Jacob Frederick [Joop] Warouw
- Menteri Pertahanan & Menteri Kehakiman : Burhanuddin Harahap
- Menteri Perhubungan/Pelayaran : Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo
- Menteri PP&K & Menteri kesehatan : Mohammad Sjafei
- Menteri Pertanian dan Perburuan : S. Sarumpait
- Menteri Agama : Mochtar Lintang
- Menteri Penerangan : Letkol. Mohammad Saleh Lahede
- Menteri Sosial : A. Gani Usman

Ketika tersebar berita bahwa Letkol Saleh Lahede dan Mochtar Lintang telah dijadikan menteri penerangan dan menteri agama PRRI, pihak Jakarta mendesak agar kedua orang itu menyatakan sikapnya. Dalam situasi itu, M. Saleh Lahede menerima undangan rapat dengan para perwira TNI di Makassar untuk membicarakannya. Dalam rapat itulah diputuskan agar Sulawesi Selatan tidak mengakui PRRI. Masalah gangguan keamanan Kahar Mudzakkhar merupakan prioritas utama di wilayah itu. Sekalipun tidak menerima keputusan ini, Saleh Lahede tidak bisa berbuat banyak.

16 Februari 1958

Soekarno yang kembali ke Jakarta dari luar negeri menyatakan "kita harus menghadapi penyelewengan pada 15 Februari 1958 di Padang itu dengan tegas dan dengan segala kekuatan yang ada pada kita."

Pada dasarnya Presiden Soekarno menyokong rencana PM Ir. Djuanda dan KSAD Mayjen A.H. Nasution untuk menggunakan kekerasan senjata. Kabinet Djuanda juga mengeluarkan perintah untuk menangkap Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Soemitro Djojohadikusumo.

Masa Pergolakan Permesta [Pemberontakan PRRI/Permesta]

17 Februari 1958

Rapat umum raksasa di Lapangan Sario Manado berlangsung, Letkol D.J. SOMBA selaku Panglima KDM-SUT [Komando Daerah Militer Sulawesi Utara-Tengah] dan Gubernur Militer Permesta di Minahasa mempertajam sikap dengan "memutuskan hubungan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta".

Kemudian oleh Pemerintah Pusat [dan tentu saja PKI], gerakan ini disebut sebagai "pemberontakan PRRI/Permesta".

Pada saat itu Letkol Sumual sedang berada di Manila.

Hari itu juga Pemerintah Pusat kemudian mengumumkan pemecatan dengan tidak hormat atas Letkol H.N. Ventje Sumual, Mayor D.J. Somba [Saat itu ia telah menerima kenaikan pangkat otomatis Overste/Letkol selaku Gubernur Militer/KDM, tapi belum ada kenaikan pangkat resmi] dan Mayor Dolf Runturambi.

Beberapa hari kemudian KSAD memerintahkan untuk menangkap Letkol D.J. Somba, Mayor Dolf Runturambi, Gubernur SUT H.D. Manoppo dan Jan Torar. Sejak saat itu, semua penduduk terutama kaum muda, yang semula dikerahkan memanggul alat pembangunan, tiba-tiba diminta berganti peran. Pendaftaran mulai dilakukan dimana-mana, baik untuk mendukung barisan pemuda maupun untuk

dinas militer Permesta. Latihan kemiliteran pun mulai tampak dimana2 . Para pemuda, tak terkecuali gadis2 , mulai raib dari kampung2. Mereka ikut mendaftarkan diri, lalu dikirim ke pusat2 latihan. [Kaum wanita Permesta tergabung dalam Pasukan Wanita Permesta/PWP dengan potongan rambut seperti Kowad/Polwan].

Pendidikan dan latihan secara militer dengan memakai senjata dipusatkan di daerah Mapanget, dilatih oleh para penasehat dari Korps Marinir AS. Pendidikan dengan latihan tempur dalam satuan kompi dan batalyon dilakukan di Remboken, Tompaso dan di daerah perbukitan Langowan. Latihan di sana dipimpin oleh seorang Mayor AD Filipina dengan beberapa perwira APRI [TNI] yang berpendidikan kompi.

Sejumlah penasehat militer Amerika Serikat diselundupkan ke Sumatera dan Minahasa. Berbagai macam persenjataan dikirimkan lewat kapal dan sejumlah pesawat terbang [antara lain pesawat pengangkut DC-3 Dakota, pesawat pemburu Mustang F-51, Beachcraft, Catalina dan pembom B-26 Invader yang berada di bawah Angkatan Udara Revolusioner / AUREV dengan sekitar 40 awak pesawatnya] juga ikut diperbantukan. Mereka melancarkan kegiatan tersebut dari Pangkalan Udara Militer Amerika Serikat di Clark Airfield, Filipina.

Kiriman pertama yang terdiri dari berbagai senjata ringan serta amunisi untuk pasukan infanteri segera dikeluarkan dan dibagi2kan. Beberapa pucuk mitraliur anti pesawat terbang segera dipasang di tempat2 strategis di sekitar daerah pelabuhan dan lapangan udara yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bersama kiriman persenjataan tersebut juga tiba beberapa instruktur asing, sehingga latihan2 pasukan baru dapat segera dimulai.

Permesta saat itu tidak pernah kekurangan senjata. Salah seorang pemasok peralatan militer Permesta dari luar negeri yaitu Daan E. Mogot mengakui bahwa dari Italia pernah mendapatkan tawaran kapal perang, tetapi tidak pernah bisa diambil karena alasan teknis. Demikian juga bantuan dana dan perbekalan, dengan mudah bisa didapatkan dari Taiwan, Jepang, Korea Selatan dan Filipina. Timbunan senjata dan perlengkapan militer terkumpul di Okinawa dan di Filipina. Orang2 PRRI dan Permesta, Filipina, Cina, Amerika Serikat dan para sedadu sewaan 'dari negara2 lain' juga telah siap di Okinawa dan di Filipina untuk membantu PRRI dan Permesta.

Sekitar satu peleton anggota RPKAD [sekarang Kopassus] yang berasal dari Minahasa yang sedang cuti pulang kampung terjebak Pergolakan. Pasukan Nicholas Sulu tersebut kemudian menjadi tulang punggung WK III di wilayah Tomohon. Selain itu ada juga sepasukan yang dipimpin oleh bekas anggota RPKAD bernama Lahe

yang merekrut pemuda2 di kampungnya dan membentuk Kompi Lahe yang terkenal kejam dan suka membantai [di daerah Motoling]. Sejumlah besar anggota Komando Pemuda Permesta [KoP2] di wilayah Sulawesi Utara dan Tengah dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi anggota pasukan Permesta. KoP2 atau yang lebih dikenal sebagai Kopedua ini dipimpin oleh Yan Torar. Sebelum itu, kegiatan KoP2 adalah membantu pemerintah daerah masing2 mengerahkan tenaga dan dana untuk melancarkan pembangunan di daerah2.

Sebagian lagi, khususnya pelajar dan mahasiswa, disusun dalam satuan Permesta dengan nama Corps Tentara Peladjar [CTP] dipimpin Jimmy Noya, seorang pemuda asal Ambon [Maluku]. Lambang Corps-TP dan Badge dengan dasar hitam garis lima merah diagonal tersebut hasil inspirasi dari film perang 'To Hell and Back' yang hanya bergaris tiga sebab kebetulan sewaktu tercetusnya Permesta hanya film perang itu saja yang diputar berulang2 di bioskop2 Manado. Arti warnanya adalah merah hitam berarti berani mati untuk mempertahankan 5 [lima] garis merah berarti Pancasila. Penciptanya adalah Krishna Sumanti [Kris] ex. CTP Manado Jimmy Boys.

Fenomena yang terjadi akibat situasi Pergolakan ini antara lain mewabahnya demam mistik. Kepercayaan terhadap kekuatan mistik Opo2 yang sangat diyakini leluhur orang Minahasa, kembali mengental. Kekebalan tubuh terhadap bacokan atau tembakan senjata merupakan hal yang paling laris dalam situasi yang siap bertempur tersebut. Orang pintar yang disebut Tonaas bermunculan di kampung2. Jimat2 tersebut ada yang berbentuk batu cincin, keris, sapu tangan, atau ikat pinggang jimat. Yang paling disukai dan dianggap hebat kesaktiannya adalah ikat pinggang jimat, berupa batu2 kecil ataupun akar2an yang telah dibungkus dengan kain merah, beruas2 yang disebut Sembilan Buku [Ruas]. Selain itu ada jimat penghilang tubuh serta jimat terbang yang juga menjadi 'dagangan' laris saat itu, dan ada juga jimat yang diberikan dalam bentuk air yang diminum atau dimandikan.

Tokoh2 sakti yang menjadi idola saat itu antara lain adalah Nok Korompis, Daan Karamoy, Goan Sangkaeng, Len Karamoy, Yan Timbuleng, serta banyak lagi orang sakti lainnya yang menjadi pimpinan Permesta ketika itu.

Salah satu akibat utama dari mistik ini adalah banyak menimbulkan perpecahan bahkan lucut-melucuti senjata, serta kudeta kekuasaan di antara sesama pasukan. Hal ini merupakan kelemahan fatal bagi keutuhan dan kekuatan Permesta, sebab seorang bawahan yang merasa dirinya sakti, bisa saja melawan atasannya].

18 Februari 1958

Letkol D.J. Somba dipecat dari dinas militer APRI [Angkatan Perang Republik Indonesia].

19 Februari 1958

KSAD Mayjen A.H. Nasution menyatakan bahwa Angkatan Darat mendukung Demokrasi Terpimpin.

Masa ini adalah untuk pertama kalinya Presiden Soekarno merasa berada dalam dukungan ideologis dari pimpinan tentara. Ini menjadi salah satu kedekatan yang istimewa antara Presiden Soekarno dengan KSAD Jenderal Mayor A.H. Nasution. Sugesti dari pihak militer jelas sangat berperan pada keputusan Soekarno, yang kendati sejak awal berusaha berbaik dengan para panglimanya di daerah.

Hari ini, Gunung Lokon mulai menampakkan kegiatannya dengan sebuah letusan kecil yang memuntahkan lapili di sekitar kawah. Kemudian letusan Lokon terjadi pada tanggal 4, 16-17 Maret, 3-4 Mei tahun ini juga. Kegiatan letusan Lokon ini berlangsung sepanjang tahun. Letusan ini dilanjutkan hingga berakhir pada tanggal 23 Desember 1959- tahun berikutnya. Selama tahun 1959 Lokon memuntahkan abu diselingi letusan kuat yang melontarkan batu. Hujan abu turun di sekitarnya. Dalam bulan Agustus, September dan November tahun 1959 tidak terjadi letusan. Konon, letusan Gunung Lokon ini dipercaya orang terjadi akibat peringatan dewa Minahasa [opo] berkaitan dengan mulainya prahara Pergolakan Permesta - perang saudara antara Pemerintah Pusat dengan gerakan Permesta di Minahasa.

20 Februari 1958

Perintah untuk melakukan operasi militer secara terbuka bergulir dari Jakarta pada tanggal 20 Februari 1958.

Keputusan ini diambil Jakarta sehubungan berakhirnya ultimatum pemerintah pusat kepada PRRI untuk menyerah. Maka hari itu, dua pesawat B-25 dengan penerbang Kapten Sri Muljono dan Mayor Soetopo mendapat perintah menyebarkan pamflet yang berisi himbuan agar PRRI menyerah. Sebelum menuju daerah tujuan, kedua pesawat mendarat di Astra Setra, Lampung agar tidak diketahui Letkol Barlian, Komandan Sumatera Selatan. Barulah esok paginya kedua pesawat terbang menyusuri pantai barat Sumatera. Setelah terbang sekitar hampir dua jam, mereka mulai memasuki pantai Padang dan menebarkan pamflet.

22 Februari 1958

Pada pagi hari, pesawat B-25 Mitchell AURI yang dikemudikan oleh Mayor [Pnb] Leo Wattimena dan Mayor [Pnb] Omar Dhani, menjatuhkan bom pada beberapa sasaran yang dianggap vital, antara lain studio RRI Manado [yang waktu itu adalah Studio Radio Permesta], Asrama Tentara, Markas Angkatan Darat Permesta di Jl. Sario, serta rumah mertua Ventje Sumual.

Sebab sebelumnya AUREV Permesta telah menjatuhkan Slogan dan phamplet dari pesawat yang berisi pernyataan "maaf Bung Karno, kami tidak butuh Komunisme", yang dijatuhkan di daerah Manado, Tomohon, Gorontalo, dan Palu.

26 Februari 1958

Letkol H.N.Ventje Sumual [NRP 15958] secara resmi dipecat dari TNI.

26-27 Februari 1958

RESOLUSI Konferensi Veteran Sulawesi Utara/Tengah yang dilaksanakan di Manado dan dihadiri oleh tokoh2 Veteran, wakil2 kelaskaran serta wakil dari daerah Luwuk Banggai, Posso, Palu/Donggala, Bolaang Mongondow, Minahasa, Manado, Sangir Talaud dan Gorontalo membahas secara mendalam pergolakan2 di tanah air pada saat itu, menyimpulkan keputusan sebagai berikut:

- A. 1. Mendukung sepenuhnya pernyataan KDM/Gubernur Militer SUT yang ditetapkan tanggal 17-2-1958.
2. Mengutuk tindakan Djuanda & KSAD terhadap pergolakan di Sumatera Tengah dan Sulawesi Utara.
3. Sehidup semati dengan tokoh2 Permesta seraya menentang keras perintah KSAD tentang pemecatan/penangkapan Somba cs.
- B. 1. Mendesak supaya semua anggota Veteran dipersenjatai kembali, untuk merealisasikan dan mempertahankan PERMESTA.
2. Supaya dibentuk kesatuan Veteran bersenjata yang dipimpin oleh Veteran.
3. Agar penyusunan kesatuan2 tersebut dipercayakan kepada Veteran, yang disesuaikan dengan ketentuan2 Gubernur Militer.
4. Supaya segera menempatkan tenaga2 Veteran pada segala bidang.

Atas nama Konperensi Veteran,

t.t.d. -

1. John F. Malonda [Ketua],
2. S.D. Wuisan,
3. Dj.A. Musmar,
4. A.F. Nelwan,
5. Theo Naj Joan,
6. H. D. Johannis,
7. W. Malele,
8. Kol. Tinangon,
9. R.R.Lumi,
10. Wim Gerungan,
11. John Somba,
12. Se81 Ali Sakibu,
13. Abd. Haris Renggah,
14. Anang Idjah,
15. F.S.U. Siwu,
16. Ibu Lasut-Monding,
17. Ibu Mewengkang-Tampi.

28 Februari 1958

Menurut harian Tan Kung Pau, Jan Pantouw berada di Hongkong hari ini.

Maret 1958

Dalam bulan ini, ada beberapa peristiwa penting: Ketika Padang diserang, KSAD Mayjen A.H. Nasution memerintahkan agar Letkol Saleh Lahede dan semua tokoh Permesta di Makassar ditangkap.

J.M.J. "Noen" PANTOUW diutus ke Amerika Serikat untuk mendapatkan dukungan moral dan materil bagi Permesta. Kemudian bertemu Letkol Ventje SUMUAL di Taipei serta tokoh2 Kuomintang.

Kolonel Alexander Evert Kawilarang [saat itu ia telah mendapat kenaikan pangkat otomatis Brigjen, namun belum ada pelantikan secara resmi] berhenti sebagai Atase Militer RI pada Kedubes RI di Washington, DC - AS, kemudian berhenti dari dinas ketentaraan, selanjutnya bergabung dengan Permesta. Dalam bukunya yang berjudul "A.E. Kawilarang, Untuk Sang Merah Putih" ia menuliskan:

"Bulan Maret 1958 saya menghadap Duta Besar Mukarto dan mengatakan, bahwa saya akan ke Sulawesi Utara. Sebelumnya saya sudah mengiriskan kawat ke KSAD, mengabarkan bahwa saya meletakkan jabatan saya, berhubung tidak setuju dengan tindakan Pemerintah Pusat di Jakarta. Sebelum saya keluar dari kantor KBRI itu, saya adakan dulu timbang terima. Keuangan saya bereskan dan saya serahkan seluruhnya. Begitu juga barang2 dan dokumen2 milik pemerintah RI yang ada pada saya, saya serahkan kepada yang harus menerimanya. Saya tinggalkan suasana hidup aman di Washington, DC dan saya tinggalkan ketenangan bekerja di kantor KBRI, menuju ke kehidupan yang bakal serba gelap dan tidak menentu. Untuk daerah memang nasi sudah jadi bubur. Deburan hati pula yang saya ikuti. Bentrokan intern Indonesia tentu dipergunakan oleh beberapa negara lain untuk manfaatnya sendiri.

Tiga tahun lebih terjadi konfrontasi bersenjata yang berakhir dengan Permesta kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Saya sendiri menganggap bahwa kehidupan saya sebagai tentara sudah berhenti sejak Maret 1958.

Sesudah kembali ke Jakarta tahun 1961, saya melihat hari depan sangat gelap untuk saya. Tetapi waktu itu saya melihat juga, bahwa untuk seluruh Indonesia hari depan sangat gelap.

Barulah sesudah peristiwa Oktober 1965 saya dan teman2 saya dapat bernapas lebih lega dan mulai kelihatan terang untuk tahun-tahun kemudian. Di tahun 1966 ada seorang dari surat khabar yang bertanya, "Apakah sudah direhabilitasi?" Saya jawab "Siapakah yang harus merehabilitasikan siapa?!"

Presiden Republik Korea, Syngman Rhee menyatakan bahwa Korea siap membantu PRRI dan Permesta di Indonesia dengan kekuatan Angkatan Darat, Laut dan Udaranya. Pers [terpimpin] Korea melancarkan berita2 tentang kemungkinan Republik Rakyat Cina mengirim "Tentara Sukarelawan" ke Indonesia.

Presiden Republik Cina-Taipei [Taiwan] Chiang Kai Shek pernah merencanakan untuk mengirimkan 1 resimen marinir dan 1 skuadron pesawat tempur untuk merebut Morotai bersama2 Permesta, namun Menteri Luar Negeri Republik Cina Nasionalis [Taiwan] Yen Kung Chau menentang gagasan itu. Cina Daratan [RRC Komunis] dikhawatirkan akan ikut serta membantu Pemerintah Pusat di Jakarta dan memiliki alasan untuk mengintervensi Taiwan.

Taiwan telah mengirimkan bantuan berupa sejumlah perwira menengah untuk melatih pasukan Permesta, persenjataan dan dua squadron pesawat tempur ke Minahasa untuk Angkatan Udara Revolusioner atau AUREV.

Bantuan Cina Taipei [Taiwan] kepada Permesta mengakibatkan pemerintah Indonesia mengambil tindakan terhadap WNI pro Kuomintang [WNI Keturunan Cina]. Sekolah2, surat2 kabar dan beberapa perusahaan Cina ditertibkan. Tokoh2 Cina yang pro Kuomintang ditahan, dicurigai mengadakan kegiatan subversif. Bulan Agustus 1958, militer mengambil alih bisnis yang dipegang oleh penduduk WNI asal Taiwan.

Di Singapura, sebagai pangkalan lalu lintas orang2 PRRI dan Permesta, telah ditawarkan oleh makelar2 berupa sejumlah helikopter2, kapal2 pendarat, dan tank2 pendarat kepada PRRI dan Permesta.

Singapura sendiri, pada akhir bulan Maret 1958 terkesan bahwa banyak partisan PRRI dan Permesta.

Permesta kemudian berhasil membeli pesawat pembom diantaranya 2 pesawat pembom jarak jauh B-29 berikut menyewa penerbang2nya dan mempergunakan pangkalan2 udara Amerika Serikat Clark Airfield di dekat Manila - Filipina.

Penerbang2 yang disewa itu terdiri antara lain anggota2 pasukan Jenderal Claire Chenault dari pasukan Flying Tigers bekas penerbang2 Perang Dunia II, dan penerbang2 dari Taiwan.

Direktur CIA, Allan Dulles [saudara Menteri Luar Negeri AS, John Foster Dulles], bersaksi di depan Senat Kongres Amerika, bahwa AS tidak "mencampuri urusan dalam negeri" Indonesia.

11-12 Maret 1958

Rapat rahasia Menlu negara SEATO [South East Asia Treaty Organization] di Manila diadakan dengan tokoh-tokoh PRRI. Dipertimbangkan untuk memberikan belligerent status kepada PRRI, status demikian memungkinkan daerah2 lain dapat memberikan bantuan terbuka kepada PRRI.

Menteri Luar Negeri Australia Robert Casey berpendirian lebih keras, menghendaki pesawat2 Australia beroperasi di Indonesia,

dan melakukan tindakan menghambat ekonomi Indonesia. Namun gagasan tersebut tidak disetujui Menteri Pertahanan Australia.

12 Maret 1958

Dalam merampungkan persiapan operasi di Sumatera menghadapi PRRI, Pangkalan Udara Tanjung Pinang dijadikan pangkalan induk pasukan APRI. Di pangkalan ini segala persiapan dilakukan untuk merebut Pekanbaru dan pangkalan udaranya. Menduduki pangkalan udara Pekanbaru menjadi prioritas utama APRI, sebelum memutuskan untuk menduduki Padang, Medan dan Palembang. Persiapan telah rampung, tanggal 10 Maret diputuskan sebagai D-day. Namun rencana ini ditunda dan operasi diundur selama 48 jam. Khusus selama Operasi Tegas di Sumatera, semua pesawat B-25 tidak dimuati bom. Setidaknya empat B-25 dan enam P-51 mengudara pagi itu. Tugasnya adalah membersihkan daerah penerjunan [DZ] bagi satu Batalion PGT [Pasukan Gerak Tjepat] dan satu Kompi RPKAD dari tentara APRI.

Beberapa jam sebelumnya, pada pukul 01.30 dini hari, sebuah pesawat PBY-5A Catalina mendahului operasi subuh itu untuk memantau situasi sekaligus melaporkan keadaan cuaca di daerah operasi. Sekitar pukul 4, pesawat Catalina berputar di atas Pangkalan Udara Simpang Tiga, Pekanbaru. Ada beberapa orang pasukan PRRI berkeliaran di sekitar landasan. Mereka tidak sedikitpun curiga ketika mendengar suara pesawat menderu di kegelapan malam. Begitu juga dengan penerbang Catalina, tidak menyadari adanya kegiatan di bawah. Barulah ketika tiba banyak lampu menyala, di sisi lain terlihat api unggun dihidupkan, seperti isyarat. Ternyata saat bersamaan, orang-orang PRRI tengah menunggu pasokan senjata dari CIA.

Sesuai dengan flight plan, pukul 06.00 ditentukan semua pesawat sudah harus berada di atas Pangkalan Simpang Tiga. Kemudian sekonyong-konyong pesawat P-51 disusul B-25 bergantian menghamburkan rentetan senapan mesin kaliber 12,7 ke pasukan PRRI yang tengah menunggu pasokan senjata dari CIA.

12 Maret 1958

Badan Pekerja Sinode GMIM dalam sidangnya mencetuskan sebuah seruan yang meminta agar kedua kubu [Permesta dan Pemerintah Pusat] segera meninggalkan dan menghentikan kekerasan dengan pemboman dan perang saudara antara 'kita dengan kita'. Seruan ini disampaikan selaku Badan Pekerja Sinode GMIM yang memegang pimpinan atas 400.000 jiwa Kristen di Minahasa sampai daerah Gorontalo, Donggala, Palu dan Parigi. Dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera [Sekum] BPS GMIM masing-masing A.Z.R. Wenas dan P.W. Sambow.

Ds. A.Z.R. Wenas memangku jabatan Ketua Sinode mulai tanggal 15 Mei 1956 bertepatan dengan terpilihnya Ds.M. Sondakh sebagai anggota DPR RI pada Pemilihan Umum, dan digantikan oleh Ds. R.M. Luntungan, namun juga R.M. Luntungan sudah menjadi Ketua GPI di Jakarta. Nanti pada tanggal 26 Mei 1957 dipilih dengan suara bulat selaku Ketua Sinode.

Bulan Agustus 1959 beliau ditunjuk oleh Presiden Soekarno

sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung [DPA] RI namun ditolaknya, juga oleh Sidang Sinode darurat tanggal 26-30 Oktober 1959

15 Maret 1958

Kolonel J.F. Warouw [alias Joop Warouw] sebagai Atase Militer RI di Peking [Beijing] Cina, dipecat dari dinas militer TNI. Keputusan ini mulai resmi berlaku tanggal 6 Mei 1958.

16 Maret 1958

Empat hari setelah menduduki Pekanbaru, dua B-25 dengan penerbang Mayor Soetopo dan Kapten Sri Muljono serta sebuah P-51 yang diterbangkan Kapten Udara Rusmin Nurjadin dikerahkan ke Medan untuk menghadapi pasukan PRRI pimpinan Mayor Boyke Nainggolan. Peristiwa yang terkenal dengan "Peristiwa Nainggolan" itu dibungkam setelah serangan udara disusul penerjunan prajurit PGT, RPKAD, dan Batalion 332 Siliwangi. Sebagian lainnya melarikan diri ke Aceh dan Tapanuli.

April 1958

Perebutan kembali Parigi dan Toboli di Sulawesi Tengah oleh Overste D.J. Somba dengan membawa Bn.Q pimpinan Mayor Lumingkewas, satu batalyon dari Brigade 999, satu peleton pasukan RPKAD [Kopassus] pimpinan Nicholas Sulu.

Sekitar 2/3 penduduk Poso masuk hutan karena takut pada pertikaian Pergolakan Permesta ini, dan kurang lebih 200 orang pemuda Poso menjadi anggota pasukan Permesta. Pos2 pasukan Permesta di daerah itu antara lain Poso, Tentena, Pendalo, Luwuk, Kolonedale, Parigi, Toboli, dan ada beberapa kota lainnya.

12 April 1958

Tiga pesawat pertama yang diperbantukan dalam pertahanan udara Permesta [dalam AUREV - Angkatan Udara Revolusioner] berupa pesawat B-26 Bomber [webmaster: B-25 ?] diberangkatkan dari US Clarck Airfield di Filipina.

13 April 1958

Permesta yang tidak ingin diserang lebih dulu menyerang pada pertengahan bulan dengan pesawat2 AUREV yaitu B-25 [pesawat Taiwan], pertama kali di Lapangan Mandai [sekarang Bandara Hasanuddin] Makassar pukul 5:35-5:51 pagi hari dibom oleh AUREV Permesta.

Sebelumnya, pengeboman di LU Mandai Makassar sebenarnya akan menggunakan 2 pesawat pembom B-26. Namun pesawat yang satunya, yang dikendalikan oleh penerbang berkebangsaan AS jatuh setelah mengadakan take off dari LU Mapanget. Peristiwa ini mengakibatkan gugurnya 2 pilot AS, dan seorang serdadu telegrafis Permesta.

Menyusul Pelabuhan Donggala, Balikpapan, Ambon, Ternate, dan tempat lainnya menjadi target gempuran. Kapal perang TNI AL RI Hangtuh satu dari empat korvet yang dihibahkan Belanda yang sedang buang sauh di pelabuhan Balikpapan, dibom hingga kemudian tenggelam.

Lalu pengeboman dilakukan di Balikpapan [4 x yaitu 16 April, 22 April, 28 April dan 19 Mei], Ambon dengan lapangan udara Pattimura [7 x, mulai 27 April, 28 April, 1 Mei, 8 Mei, 15 Mei, 18 Mei], Ternate [5 x], Morotai [3x], Bitung, Donggala, Gorontalo, dll.

Angkatan Udara Revolusioner [AUREV] Permesta dipimpin oleh KSAU Comodore Muda [Permesta] Petit Muharto Kartodirdjo, bekas Atase Militer AURI di Manila berpangkat Mayor AURI. Dan sebagai Wakil KSAU adalah Kapten AURI [Purn.] Hadi Sapandi, bekas komandan Squadron III - Pemburu di Cililitan [sekarang LU Halim Perdanakusumah] - Jakarta. Sebelum bergabungnya kedua orang etnis Jawa itu dengan PRRI/Permesta, AUREV dipimpin oleh Z. Raming yang menguasai Lapangan Udara Tasuka.

Markasnya terletak di sebuah rumah yang bernama "HUISE SABANG" di Jl. Sario Manado.

AUREV diperkuat oleh pesawat2 pembom B-26, Mustang, B-26 B, B-29, dan beberapa pesawat pengangkut tipe C, / P-51, Catalina, Lockheed, yang didatangkan dari luar negeri.

Lapangan Udara Mapanget diperkuat oleh "BAZOKA bolak-balik", Bar-bren, Panser-Wagen, Alertcraft, Doublelop [18 buah], 12.7, Watermantel dan senjata2 berdiameter 20mm. Pesawat2 pengangkut tipe C diserahkan kepada penerbang Taiwan yang berpangkalan di Lapangan Udara Tasuka [Kalawiran].

16 April 1958

Kota Balikpapan mulai diserang pesawat AUREV Permesta, dimana terjadi pengeboman dan penembakan atas obyek2 di lapangan udara yang menyebabkan sebuah pesawat terbang milik BPM mengalami kerusakan dan beberapa bangunan mengalami rusak berat.

Tanggal 22 April, Balikpapan juga diserang dua pesawat pemburu AUREV Permesta. Selanjutnya, Balikpapan juga diserang tanggal 28 April dan 19 Mei.

17 April 1958

Pagi itu, pukul 04.00, empat pembom B-25 berangkat dari Lanud Palembang menuju Lanud Pekanbaru. Hari itu juga terus dilakukan penerbangan2 formasi bersama pesawat P-51 yang disusun secara bergelombang dalam bentuk dua flights. Red Flight dan Blue Flight. Flight pertama bertugas melindungi pendaratan KKO di pantai Sumatera Barat dari kapal laut ALRI. Sementara Blue Flight melindungi penerjunan PGT dan RPKAD di Lanud Tabing. PGT dan RPKAD kemudian mulai diterjunkan dari beberapa pesawat Dakota. Sebagian pasukan PRRI yang melihat pasukan payung mulai berebutan turun, memilih lari masuk

hutan. Dengan cepat landasan Tabing dibersihkan dari ranjau dan paku yang sengaja ditebarkan PRRI.

Akhirnya perlawanan PRRI dapat dihentikan dan hari itu juga Padang dapat diduduki APRI,

namun sebuah B-25 nomor M-464 yang diterbangkan Pedet Soedarman tertembus dihantam peluru musuh.

Esoknya, sekitar pukul 11.30, pesawat B-25 yang diterbangkan Kapten Sri Muljono segera mendarat di Lanud Tabing dengan selamat.

29 April 1958

Morotai diserang oleh pesawat2 terbang Permesta sebanyak 3 kali [dan terakhir kalinya diserang tanggal 28/29 April], disusul pendaratan dengan kapal2 perang asing [2 buah] dan kapal pengangkut [2 buah] yang mengangkut satu batalyon Permesta dibawah pimpinan Mayor Nun Pantouw.

Dari pulau kecil ini Nun Pantouw menggeser pasukannya menyeberang ke Pulau Halmahera hingga menduduki Jailolo yang berada di bagian tengah Halmahera.

Melihat perkembangan ini, Pangdam XV/Pattimura Kolonel Herman PETERS segera mengadakan rapat khusus dengan seluruh staf inti Kodam. Dari Jakarta muncul permintaan laporan situasi terakhir dari Kepala Staf Angkatan Darat [KSAD] Jenderal Mayor A.H. Nasution, KSAL Laksamana Subyakto dan KSAU Laksamana Suryadi Suryadarma. Laporan yang sama juga diberikan ke istana atas permintaan Bung Karno.

Mei 1958

Dukungan Presiden Filipina Gracia dan Menteri Pertahanan Filipina Vargas untuk PRRI dan Permesta. Hal ini dikecam keras oleh Duta Besar Filipina di Jakarta, Jose Fuentabella. Begitu juga surat2 kabar Filipina, menuduh Menteri Luar Negeri Serano sebagai alat Amerika Serikat. Dalam menghadapi masalah pergolakan di Indonesia, Filipina dianggap terlalu banyak dikendalikan kedutaan Amerika Serikat di Manila.

Filipina juga telah mengirimkan bantuan berupa persenjataan dan 2 squadron pesawat tempur - yang dibeli Permesta dengan cara barter - ke Minahasa untuk Angkatan Udara Revolusioner atau AUREV.

Pada pertengahan bulan ini, pemerintah Amerika Serikat mengubah kebijakan politik terhadap Indonesia, namun pemerintah Filipina tidak diberitahu, sehingga Menteri Luar Negeri Serano menyesalkan sikap Amerika Serikat ini.

Dalam upaya dukungan pemerintah Filipina tersebut, tercatat nama wartawan Ninoy Aquino, tokoh pers yang terkemuka, ikut dalam operasi tersebut sebagai reporter/wartawan. Dalam sebuah pengakuannya, Ninoy Aquino menyatakan sikap pemerintah Filipina dan juga Amerika Serikat yang menerlantarkan/meninggalkannya dalam hutan2 di Minahasa karena pemerintah AS menarik diri segala operasinya di Indonesia akibat jatuhnya pesawat yang dikendalikan pilot Allan

Lawrence Pope, seorang anggota CIA, yang membongkar keterlibatan pemerintah AS dalam masalah dalam negeri Indonesia [kelak istrinya akan menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos pada dekade tahun 80-an dan tampil sebagai Presiden negara itu.]

4 Mei 1958

Bukittinggi sebagai ibukota PRRI diduduki oleh pasukan APRI.

5 Mei 1958

Pesawat2 tempur APRI membom posisi2 pasukan Permesta di pulau Jailolo.

8 Mei 1958

Kota Parigi berhasil dikuasai pasukan Overste D.J. Somba dan 1 batalyonnya, yang menggunakan 4 buah kapal pengangkut [dua diantaranya berbendera asing/Belanda] dilindungi oleh 2 pesawat Permesta [B-26 dan Mustang]. Dalam waktu beberapa hari, Permesta juga berhasil menguasai Toboli dan Kebon Kopi. Ikut juga dalam operasi tersebut yaitu Mayor Gerungan dan Mayor Palar.

Di Teluk Ambon, Kapal "Sonny" dihujani bom dari pesawat Bomber B-26 namun tidak kena.

10 Mei 1958

Empat buah Kapal Permesta yang digunakan untuk pendaratan di Parigi berhasil ditenggelamkan oleh pesawat2 APRI.

14 Mei 1958

Kekhawatiran pasukan "tentara pusat" bahwa pesawat B-29 akan dikerahkan Permesta dan CIA, bahwa kemungkinan akan terjadi dog fight. Untuk itulah, sembilan pesawat tempur yang terdiri dari empat B-25 [strafer dan bomber] serta lima P-51 digerakkan ke Indonesia Timur untuk menggelar operasi merebut keunggulan di udara pada tanggal 14 Mei 1958.

Target telah ditentukan: Pangkalan Udara Mapanget.

Secara keseluruhan, Mayor Udara Leo Wattimena ditunjuk sebagai flight leader dan Sri Muljono khusus leader pembom Letnan Udara I Pedet Soedarman, Kapten Udara Suwondo, dan Letnan Udara I Suwoto Sukendar.

Seperti juga di Sumatera, demi keamanan keberangkatan dilakukan dari pangkalan yang berbeda. Dari Pangkalan Laha sebuah B-25 [Suwoto Sukendar] diberangkatkan dengan kawalan dua P-51. Lalu dari Liang dua B-25 [Sri Muljono dan Pedet Soedarman], dikawal sebuah P-51. Dan terakhir dari Amahai sebuah B-25 [Suwondo] disertai dua P-51.

Tepat pukul 04.00 subuh, mereka rendezvous di atas Pulau Manggole. Dari titik pertemuan, secara formasi mereka akan menuju pantai timur Manado.

Rencana operasinya: Sortie pertama, semua pesawat secara bersamaan akan menggempur dua target, Mapanget dan Tasuka.

Teknisnya, setelah semua pesawat mendekati pantai Manado, kedua flight akan memecah menuju target masing2. Jika gelombang pertama sukses, semua pesawat harus segera kembali ke pangkalan semula untuk reloading. Selanjutnya bergegas menuju Morotai dan Jailolo dengan tugas serupa. Sebaliknya jika serangan pertama gagal, dalam arti tidak berhasil menghancurkan setidaknya setengah dari jumlah pesawat AUREV, diperintahkan untuk menjauhi Morotai dan Jailolo dan menghindari kejaran pesawat AUREV.

Dalam situasi seperti itu, penerbang harus terbang menjauh dan terbang menuju pangkalan lain untuk menyiapkan diri dan kembali berkumpul di tempat semula malam harinya. Barulah besoknya mereka akan kembali terbang menyerang Morotai.

Dalam briefing juga disepakati "Plan B". "Kalau tertembak, usahakan loncat di laut yang persis di depan Kota Manado, karena di situ sudah stand by pasukan intel yang siap sewaktu2 untuk menolong.

Setiap pembom diawaki oleh lima crew [pilot, co-pilot, bombardier, montir, dan radio telegrafis/gunner].

15 Mei 1958

Pesawat-pesawat Permesta yang terakhir berupa B-26, P-51, Catalina, Lockheed dihancurkan AURI di Lapangan Udara Mapanget di Manado.

Dalam operasi itu, tiga pesawat B-25 plus tiga P-51 milik AURI meleset ke arah Mapanget, dan sebuah pesawat B-25 [Suwondo] dikawal dua pesawat P-51 membom pangkalan udara Tasuka.

Serangan B-25 dan P-51 secara bergantian telah melumpuhkan setengah dari kekuatan AUREV yang diperkirakan diperkuat delapan pesawat P-51, B-26, Catalina, dan DC-3. Begitu juga di Tasuka, Suwondo menghancurkan landasan dengan baik.

Serangan mendadak itu tidak hanya menghancurkan pesawat diparkir di apron tapi juga tanki bahan bakar AUREV. Akibatnya dalam beberapa jam setelah serangan itu asap hitam membubung ke angkasa pertanda terjadi kebakaran hebat, dan tidak ada lagi pesawat AUREV yang selamat serta landasan Mapanget dipenuhi lubang.

Saat itu, J. Harry Rantung [kopral AURI di pangkalan Morotai yang kemudian bergabung dengan Permesta] dan Allan Laurence Pope [pilot berkebangsaan Amerika Serikat] dengan pesawat Pembom B-26 Invader lepas landas dari lapangan udara Mapanget dengan pesawat P-51 Mustang yang diterbangkan oleh seorang pilot berkebangsaan AS yang diketahui bernama Connie. Sasaran utamanya adalah Ambon.

Saat itu pesawat P-51 Mustang yang diterbangkan Letnan Udara I Nayarana Soesilo ditembak jatuh oleh senjata Penangkis Serangan Udara Permesta yang masih tersisa di sekitar landasan udara Morotai dalam operasi udara yang dipimpin Mayor Leo Wattimena.

Penerbang lainnya yang pesawatnya kena tembak adalah Letnan Udara I Loely Wardiman. Tidak seperti Nayarana, Loely masih

sempat melompat sebelum pesawatnya jatuh ke laut. Loely diselamatkan oleh pasukan Magenda yang sudah menguasai pulau2 di depan Kota Manado. Pesawat Pedet juga tertembak dalam second running dan bolong di beberapa tempat.

16 Mei 1958

Pendaratan rahasia oleh pasukan APRI di pantai Wori dekat Manado, oleh satu peleton RPKAD pimpinan Letnan I L.Benny Moerdani [yang kelak menjadi Panglima ABRI], dan peleton RPKAD pimpinan Letnan Soewono.

Tujuan dari pendaratan dan penyerbuan saat itu adalah lapangan udara Mapanget. Pertempuran di lapangan Mapanget menewaskan dua orang RPKAD yaitu Miskan, prajurit asal Madiun dan Sersan Mayor Tugiman, mantan anggota KNIL. Mayat pasukan RPKAD tersebut dimakamkan oleh Permesta secara militer. Sepuluh hari lamanya gerak pasukan pusat tersebut yang kemudian tertahan di sekitar Gunung Potong.

Saat pasukan pusat menduduki lapangan Mapanget itu kelak, diberi nama Lapangan Tugiman sementara waktu, untuk mengenang prajurit yang gugur tersebut.

18 Mei 1958

Allan Lawrence POPE, pilot sewaan /serdadu bayaran [soldier of fortune] Permesta [digaji sebesar USS 10.000,-] berkewarganegaraan AS dan merupakan anggota CIA, dengan disertai co-pilotnya, J.Harry Rantung yang berada di pesawat Pembom B-26, jatuh di Pulau Tiga Teluk Ambon oleh AURI dan ALRI.

Saat itu mereka serta sebuah P-51 Mustang yang dibawa oleh Connie [seorang pilot Amerika juga], sedang menjalankan aksi membom kota Ambon yang menewaskan 6 warga sipil dan 17 tentara tewas.

Saat itu satu armada yang didukung oleh beberapa kapal perang, kapal pengangkut, dan penyapu ranjau, yang dipimpin oleh Letkol Herman Pipers, komandan "Operasi Mena I", bergerak dari Pelabuhan Halong, Ambon, menuju Morotai untuk mendudukinya kembali dari pasukan pimpinan Mayor Permesta Nun Pantouw.

Pengakuan Harry Rantung mengenai peristiwa itu adalah sbb: Pagi hari itu sekitar pukul 06.00-07.00 memasuki pelabuhan Ambon, penangkis udara menyambut kedatangan B-26 tersebut. Allan Pope yang punya pengalaman tempur sejak dari Perang Korea, santai saja menuju sasaran. Sebuah bom dijatuhkan di lapangan terbang. Tembakan senapan mesin diarahkan ke kubu2 pertahanan yang tersebar di sekitar lapangan terbang dan pinggiran Kota Ambon. Pertempuran jadi ramai. Pope tanpa ampun menghantam obyek2 militer.

Harry Rantung, sebagai operator radio melapor ke Manado tentang operasi yang sedang berlangsung di Ambon. B-26 yang digunakan AS pada PD II itu masih lincah. Ketika pesawat berada pada ketinggian sekitar 10.000 kaki, Pope berkata bahwa di bawahnya ada satu konvoi kapal dan langsung dilaporkan ke

Manado. Manado kemudian menginstruksikan untuk diteliti. Atas instruksi Manado itu, Pope turun sampai pada ketinggian sekitar 4.000 kaki, dan terlihat bahwa titik2 itu adalah konvoi armada yang sedang melaju dalam kecepatan tinggi menuju utara. Pope melaporkan lagi ke Manado bahwa yang mereka lihat adalah satu konvoi armada kapal perang dan pengangkut RI. Untuk itu dia minta instruksi Manado. Hanya dalam waktu tidak cukup satu menit, datang instruksi dari Manado yang meminta agar armada yang sedang bergerak ke arah utara itu diserang. Tanpa banyak komentar, Pope turun pada ketinggian hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Allan Pope dengan pengalaman tempur yang cukup, langsung menukik dan menjatuhkan bom. Sasarannya Sawega. Namun meleset hanya beberapa meter dari buritan kapal. Berbarengan dengan jatuhnya bom, datang rentetan tembakan pengangkis udara dari kapal2 perang yang mengawal Sawega. Saat itu saya melapor ke Manado bahwa pertempuran sudah berkobar. "Kami sudah menyerang dengan bom, tetapi sayang meleset," lapor Harry ke Manado.

Sesudah menghamburkan peluru maut dari mulut pesawat ke atas geladak kapal, Pope berputar naik keatas. Saat itu mereka merasa ada goncangan keras. "Kita kena tembak, pesawat terbakar, segera lapor Manado," kata Pope. Api berkobar di bagian ekor pesawat. Manado sudah menerima laporan tentang tertembaknya B-26 itu dan menginstruksikan agar mereka berusaha untuk terbang ke arah Irian Barat. Dengan segala keahliannya, Pope berusaha mengendalikan B-26. Pope berusaha untuk berputar dan naik. Tetapi tidak bisa. Kobaran api semakin menjadi. Menghadapi situasi yang sangat gawat, Pope memerintahkan saya untuk terjun. Mereka jatuh di sebuah pulau kecil. Paha Pope robek.

Dari pinggangnya Pope mencabut pistol dan menyerahkan kepada saya. Kemudian dia membuka mulut, maksudnya agar Harry tembak. "No no", tolak Harry. Beberapa saat kemudian dua buah perahu karet merapat. Satu regu Marinir langsung mengepung. Pope dan Harry dibawa ke atas perahu karet. Dalam pemeriksaan awal, saya mengaku bernama Pedro, berkewarganegaraan Filipina. Akan tetapi saya tidak bisa menyembunyikan samaran. Soalnya di atas Sawega kebetulan ada seorang sersan AURI satu angkatan dengan saya di Morotai."

Dokumen di tangan Pope disita. Namun sebuah dompet yang berisi uang dan selebar foto istrinya dikembalikan. Dokumen itu berisi informasi yang fatal bagi perkembangan PRRI dan Permesta selanjutnya, karena Allan Pope sengaja membawa dokumen rahasia CIA. Dari dokumen yang ada diketahui bahwa Pope adalah seorang penerbang CAT [Civil Air Transport] dari Taiwan, dan punya kode 11 [sebelas] sebagai tentara sewaan yang digerakan CIA [Central Intelligence Agency] untuk mengacau Pasifik.

Kejadian ini membuat heboh dunia dan hal ini antara lain yang menyebabkan pihak AS [CIA] menarik diri dari operasi ini karena desakan agar tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu

negara.

Perubahan kebijakan Amerika Serikat tidak terlepas dari upaya keras dan pendekatan² yang dilakukan Duta Besar Amerika Serikat Howard Jones dan Atase Militer Kolonel George Benson di Jakarta, meyakinkan State Departement AS dan Pentagon. Mereka berhasil meyakinkan Washington bahwa satu²nya kekuatan masa depan yang bisa diandalkan melawan komunis di Indonesia justru berada ditangan para perwira di pemerintah Pusat. Hal ini membuat para pemimpin Permesta marah terhadap AS karena, pihak AS hanya mengutamakan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan kemitraannya terhadap gerakan Permesta yang se-'ideologi' [anti-komunis] dengannya.

20 Mei 1958

Morotai jatuh kembali ke tangan APRI [sekarang TNI] dalam operasi khusus AURI "Nunusaku" dibawah pimpinan Letkol Huhnholz dari Angkatan Laut.

Di Pulau Halmahera, Operasi Mena I [Mena berarti menang] di bawah pimpinan Kapten Suptandar berhasil merebut kembali Jailolo dari tangan Permesta. Jailolo merupakan kota cukup strategis di Halmahera dengan lapangan terbangnya yang pernah digunakan oleh Jepang pada PD II. Operasi tidak berjalan mulus. Medan terlalu berat hingga hampir tidak ada samasekali hubungan darat.

Letnan Thom Nusi, mantan Komandan Baret Merat RMS [Republik Maluku Selatan] yang memimpin satu kompi Pattimura Muda terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Permesta yang bertahan di atas bukit² kecil di pinggiran timur laut Jailolo. Walau pasukan Permesta dapat dipukul mundur hingga lari ke pedalaman Halmahera, beberapa orang anggota Nusi terluka. Karena medan sangat berat Kapten Suptandar, Komandan Operasi Mena I akhirnya naik kapal Bekaka ukuran 100 ton untuk bertolak menuju Desa Ibu yang terletak di pesisir barat Halmahera Tengah. Maksud Suptandar akan mengadakan gempuran dengan memotong dari pantai Desa Ibu. Perhitungannya dari Ibu untuk menjangkau pedalaman Halmahera lebih mudah. Akan tetapi pasukan bergerak ke arah pedalaman, hingga pasukan Suptandar mendapat perlawanan keras. Dua orang komandan peleton melapor bahwa medan sangat berat.

Menghadapi medan yang sangat berat itu, Kapten Suptandar didampingi beberapa orang staf dengan kapal Bekaka menuju Morotai yang telah diduduki. Tiba di Morotai, mereka langsung menuju markas AURI. Di lapangan berjejer beberapa buah pesawat tempur P-51 Mustang [cocor merah] dan pembom PBV-5A Catalina.

Beberapa hari kemudian, Radio Australia yang cukup populer di Maluku menyiarkan berita tentang munculnya Mayor Nun Pantouw dan pasukannya di Irian Barat yang waktu itu masih dijajah

Belanda. Penduduk Desa Kao [Teluk Kao] dan Desa Maba di pesisir timur Pulau Halmahera sebagai saksi mata mengatakan, pasukan Permesta turun dari hutan Halmahera tengah menuju Teluk Kao. Dengan perahu2 kecil mereka menyeberangi Teluk Kao, untuk selanjutnya memotong gunung tiba di Desa Maba. Dari Maba dengan menggunakan perahu menyeberang ke Irian Barat. Menteri Luar Negeri AS, John Foster Dulles mengadakan konferensi pers mengenai masalah Indonesia.

Sejumlah tokoh2 Permesta di Sulawesi Selatan hari ini ditangkap oleh Pemerintah Pusat.

Mereka diantaranya Letkol. M. Saleh Lahede [Kastaf TT-VII/Wirabuana], Mochtar Lintang, Anwar Bey, Naziruddin Rachmat, Kapten W.G.J. Kaligis, Letkol. dr. Oscar E. Engelen [Ketua Ikatan Perwira RI - Indonesia Timur], Kapten Bing Latumahina.

Setelah melewati proses pemeriksaan, mereka dipenjarakan di Madiun dan Jakarta. Sejumlah perwira lainnya juga dikeluarkan dari dinas militer.

22 Mei 1958

Pemerintah AS terpaksa menyetujui bantuan senjata dan ekonomi kepada Indonesia setelah bantuan operasi kepada Permesta ditarik akibat peristiwa jatuhnya pesawat yang dikemudikan AL Pope.

Salah satu alasannya adalah, bahwa di tubuh TNI di pusat, masih banyak perwiranya yang anti-komunis yang dapat diajak kerja sama.

23 Mei 1958

Daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sangir dan Morotai secara praktis sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk dikuasai oleh Pasukan Permesta - serta jatuh ke tangan Pemerintah Pusat di Jakarta.

23-27 Mei 1958

Kota Parigi, Toboli dan Kebon Kopi dikuasai kembali oleh pasukan gabungan APRI dari Divisi Brawijaya, Kapten Frans Karang, kesatuan Polisi dibawah pimpinan Inspektur Polisi Suaeb, dengan bantuan pesawat2 terbang AURI.

Operasi ini menewaskan 30 orang pasukan Permesta, dan 14 orang pasukan Permesta berhasil ditawan.

Tanggal 23 dan 27 Mei di daerah Situjuh dan Suliki terjadi teror terhadap kedua daerah tersebut, dimana terjadinya pembunuhan [pembantaian] massal oleh anggota pasukan Permesta.

27 Mei 1958

Peristiwa tertembaknya pesawat yang dikemudikan Allan Lawrence Pope hari ini diumumkan Pemerintah Pusat kepada pihak publik. Alasan diumumkan kepada publik baru pada haru ini yaitu dengan maksud untuk tetap menjaga kerahasiaan operasi di Morotai yang masih dalam tahap penuntasan.

16 Juni 1958

Pendaratan pertama kali pasukan APRI secara besar2an di pantai Kema Minahasa dalam Komando Operasi Merdeka dibawah pimpinan Letkol Inf. Roekminto Hedraningrat.

Kapten Bert Supit diangkat pemerintah pusat sebagai bupati / Kepala Daerah Minahasa [KDM] [menggantikan Laurens F. Saerang yang ikut Permesta] sampai tanggal 23 September 1958 dan digantikan E. Kandou.

26 Juni 1958

Pendaratan pasukan APRI dari pantai Wori di Teluk Manado dengan kapal perang jenis korvet, dibawah tembakan KRI "Rajawali" dibawah pimpinan Mayor [Overste?] John LIE dan beberapa peleton RPKAD dibawah pimpinan Letnan I Benny Moerdani serta Komandan B.T.P. KKO Mayor Tukiran. Gerakan pasukan APRI ini dihadang oleh Mayor John Ottay selaku Komandan KMKB [Komando Militer Daerah Kota] Manado didampingi Mayor Willy Yosep. Pukul 14.45 pasukan KKO masuk di kota Manado dari jurusan Kairagi/Airmadidi. Menjelang malam, pusat kota di Jl. Samrat berhasil diduduki pasukan gabungan APRI. Pasukan Gabungan APRI tersebut sebelumnya ditahan 4 hari 4 malam di Jembatan Megawati, pintu gerbang masuk ke kota Manado, yang direbut silih berganti oleh pasukan Permesta dan APRI.

Kemudian di tempat2 seperti daerah operasi TNI di Kalasei, Togas, Koha, Tateli, Buloh, Mokupa, Tanahwangko dan Lemoh, TNI maju dengan cepat dengan tembakan mortir atau kanon artileri sebagai pembuka.

Serangan Tentara Pusat ini merupakan gabungan dari Bn. 517/Brawijaya pasukan "M" dibawah pimpinan komandannya Mayor Suwarno dibantu oleh satuan2 Artileri dibawah pimpinan Letnan Tulus.

Setelah kota Manado jatuh, markas Panglima pasukan Permesta dipindahkan dari Sario ke Pineleng, kemudian dipindahkan lagi ke desa Sarongsong, Tomohon.

Juli 1958

Pertahanan pasukan Permesta di garis Manado-Tomohon diperkuat kubu2 yang berlapis2 mulai dari Warembungan sampai Tinoor. Situasi medan [topografi] sepanjang jalan raya yang menanjak ke kota Tomohon sangat mendukung suatu kekuatan defensif [Pengalaman pada waktu Perang Dunia II telah membuktikan hal ini. Gelombang serangan serdadu Jepang, dari arah Manado menuju Tomohon, sangat kewalahan menembus kubu2 pertahanan tentara KNIL waktu itu pimpinan Letnan Andries S. Purukan yang disapu oleh tembakan dari sarang mitraliur tersebut]. Bunker beton [pill box] sisa Perang Dunia II itu masih tetap utuh dan dimanfaatkan pasukan Permesta untuk membendung serangan TNI. Sudah berkali2 tentara Pusat mencoba untuk menembus garis

pertahanan pasukan Permesta ini. Tapi baru di Warembungan, gerak maju tentara pusat sudah terhambat perlawanan Permesta. Pesawat Mustang AURI maupun Bomber AURI hampir setiap hari terbang meraung2 di angkasa lalu memuntahkan tembakan senapan mesin dan menjatuhkan bom roketnya di tempat2 yang dianggap vital bagi pertahanan pasukan Permesta. Sese kali pesawat2 tersebut menjatuhkan selebaran pamflet [di lokasi pasukan Permesta dan lokasi pengungsian penduduk] yang menyerukan agar pasukan Permesta menyerah, serta membujuk rakyat agar tetap tenang dan berjanji tak lama lagi akan dibebaskan oleh pasukan APRI.

Serangan ke kota Tomohon akhirnya dialihkan ke arah Tondano lewat garis Airmadidi-Tanggari. Setelah selama seminggu diserang, barulah Tondano jatuh ke tangan APRI pada akhir bulan Juli.

Akhir bulan Juli, pengiriman persenjataan Permesta lanjutan, mulai berdatangan [membanjiri] dan melengkapi senjata2 pasukan Permesta yang lebih modern, yang didrop lewat darat maupun udara, yang mana belum pernah dimiliki APRI.

2 Juli 1958

Seruan Badan Pekerja Sinode GMIM disiarkan via Radio Permesta supaya perang saudara dengan pembunuhan dan penumpahan darah di tanah Minahasa yang tanah Kristen, yang telah berlangsung dalam waktu 14 hari terakhir, agar segera berakhir. Juga diserukan agar diusahakan jalan pertemuan dan perundingan untuk penyelesaian persoalan-persengketaan Pusat dan Daerah Minahasa. Seruan ini ditandatangani oleh Ketua BPS GMIM Ds. A.Z.R. Wenas dan Panitera [Sekum] P.W. Sambow. Beliau kelak sangat berjasa dalam penghubung dalam rangka Perdamaian antara Permesta dan Tentara Pusat.

12 Juli 1958

Hari ini terjadi letusan dari kawah Gunung Mahawu yang beristirahat sejak tahun 1904. Letusan ini terjadi selama 40 menit. Sebelumnya tampak angin kencang dengan kilat listrik. Semua lumpur dilontarkan hingga sejauh 3 km dari kawahnya.

28 Juli 1958

Perdana Menteri RI Ir. Djuanda dalam Sidang2 Pleno DPR DPR tanggal 28 Juli dan 16 Agustus, mengemukakan bahwa Pemerintah Pusat telah mengambil tindakan2 dan melakukan usaha2 untuk menumpas PRRI dan Permesta.

29 Juli 1958

[ralat tgl]

Rapat Staf Komando Permesta yang masih berada di Tomohon hari ini diadakan malam hari di desa Sarongsong, dibawah pimpinan Overste D.J. Somba yang saat itu baru tiba dari Sulawesi Tengah. D.J. Somba dalam slagorde baru pasukan Permesta telah

menjadi Panglima KDP II Minahasa. Anehnya Mayor Eddy Mongdong selaku Komandan Sektor III yang punya peran dan tanggung jawab besar untuk mempertahankan kota Tomohon, malam itu tidak tampak dalam rapat.

Kota Tomohon sendiri berstatus KDG [Komando Daerah Garnisun] dengan Komandannya Kapten Lantang yang bermarkas di dekat Kateluan Park - Tomohon.

Hari ini, terjadi lahar lumpur belerang panas dari kawah Gunung Mahawu yang memotong jalan antara Tomohon-Manado, melewati desa Kakaskasen dan mencapai Kali [Sosoan] Ranowangko serta melanda tempat pengungsian penduduk di lereng gunung tersebut. Korban saat itu adalah sepuluh orang luka2 dan seorang meninggal akibat lumpur panas tersebut.

Konon, letusan tersebut dipercaya orang akibat amarah dewa Minahasa [opolo] akibat pengkhianatan Mayor Eddy Mongdong [selaku Komandan KDP II Permesta di Minahasa serta Dan Sektor III wilayah sekitar Tomohon] terhadap Permesta.

10 Agustus 1958

Mayor Eddy MONGDONG, Komandan SWK III Lokon yang juga selaku Komandan Komando Daerah Pertempuran / KDP II Permesta di Minahasa] menyerahkan diri kepada APRI ["Tentara Pusat"]. Di Warembungan juga sekitar 200 orang anak buahnya menyerahkan diri.

13 Agustus 1958

Washington, D.C. mengadakan perjanjian ekonomi dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. Sejak saat itu, bantuan tenaga teknis dari Amerika Serikat di Minahasa serentak ditarik.

14 Agustus 1958

Propinsi Sunda Kecil dimekarkan menjadi Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur berdasarkan UU No.64/1958.

Pelaksanaannya nanti pada bulan Oktober 1958.

16 Agustus 1958

Tentara APRI pagi ini masuk dan menduduki kota Tomohon lewat Rurukan dengan leluasa yang dijemput oleh Dan SWK III/Lokon - Mayor Eddy Mongdong bersama pasukan inti pengawalnya KOMPI Lokon dengan Komandannya Piter Tumurang. Sebagian besar pasukan Mayor Eddy Mongdong menyerahkan diri kepada TNI lengkap dengan persenjataan yang ada. Pasukan APRI yang masuk kota Tomohon ini berasal dari Bn. 501/Brawijaya dibawah pimpinan Mayor Sumadi.

Di daerah Kasuang [perbatasan Tomohon dan Tondano] terjadi kontak senjata antara pasukan APRI dengan pasukan pengawal Kolonel Permesta Dolf Runturambi, Komandan RTP Ular Hitam yang juga Panglima KDP III Bolmong. Kontak senjata itu terjadi secara tiba2, ketika kedua pasukan berpapasan secara mendadak.

Pagi itu Kolonel Dolf Runturambi bersama pengawalnya sedang mengendarai kendaraan Jeep menuju Tondano, karena mengira waktu itu pasukan Permesta masih menguasai wilayah Tataaran sampai desa Koya.

Sebelumnya, di wilayah Sektor III Permesta beberapa hari sebelumnya, ada perintah bahwa semua pasukan Permesta menjelang hari Proklamasi 17 Agustus, harus mengenakan pita merah putih sebagai kode. Ternyata pita merah putih itu adalah kode kesepakatan antara Mayor Mongdong dan TNI sebagai tanda pengenalan pasukan Permesta yang akan bergabung dengan TNI. Karenanya semua pasukan Permesta yang masih setia, segera diperintahkan menanggalkan pita merah putih tersebut. Mayor Eddy Mongong ketika itu juga menjadi pusat caci-maki semua pasukan Permesta yang terpaksa harus meninggalkan kota Tomohon bergerak menuju daerah Selatan dan dicap sebagai pengkhianat Permesta yang menjual Tomohon, yang adalah kampung halamannya sendiri.

17 Agustus 1958

Perguruan Tinggi Manado [PTM] berdiri di bekas Universitas Permesta dengan 4 fakultas [Fakultas Hukum, Ekonomi, Sastra, & Tatapradja]. [Bulan Oktober berganti nama menjadi Universitas Sulawesi Utara Tengah/UNSUT, lalu tahun 1960 menjadi UNISUT kemudian pada tanggal 4 Juli 1961 menjadi UNSULUTENG, lalu berubah menjadi UNSRAT].

19 Agustus 1958

Langowan berhasil diduduki APRI dari kesatuan KKO pimpinan Mayor Ali Sadikin yang bertempur selama 21/2 hari [sebelumnya direncanakan akan memakan waktu 6 hari]. Bom2 milik Permesta seberat 50-100 kg yang bertaburan di Lapangan Tasuka, rumah2 dan di tepi jalan disita APRI. Juga berhasil disita sebuah truck, 2 oto pick up, 3 jeep dan sebuah sepeda motor milik Permesta.

25 Agustus 1958

Kawangkoan berhasil diduduki APRI dan Bn. 513/Divisi Brawijaya dipimpin Mayor Sudarmin setelah sebelumnya mengadakan pembersihan di daerah Remboken, Parepei, Pulutan & Tondegesan. Pasukan APRI pimpinan Mayor Kusworo yang bergerak ke arah Sonder, berhasil menemukan 25 peti peluru berbagai ukuran di rumah orang tua Overste D.J. Somba.

23 September 1958

Tanahwangko berhasil direbut pasukan APRI.

25 September 1958

Amurang digempur dari arah laut oleh pasukan KKO. Kemudian pasukan KKO pimpinan Mayor Ali Sadikin tersebut berhasil mendaratkan pasukannya dan menduduki kota Amurang.

Oktober 1958

Ada 3 golongan yang terbagi dalam visi dan misi Permesta:

[1] golongan yang ingin mempertahankan gagasan PRRI dan Permesta yang hanya menuntut sistem pemerintahan Indonesia. Golongan ini dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Sipil Permesta Kol.J.F. Warouw.

[2] golongan yang tidak jelas tujuannya
Golongan ini terutama Pasukan Triple Ninenya Jan Timbuleng, yang dulunya adalah PPK [Pasukan Pembela Keadilan] yang dikenal sebagai pasukan pengacau keamanan /GPK di daerah Minahasa sebelum Pergolakan Permesta.

[3] golongan yang menghendaki untuk menggabungkan diri kembali dengan APRI [Angkatan Perang RI].

Golongan ini [dipimpin oleh] Panglima Besar Permesta Alex Kawilarang.

Desember 1958

16 pesawat AUREV Permesta di Pangkalan AS Clark Airfield di Manila Filipina dipindahkan keluar dari sana oleh Amerika Serikat. Diantara pesawat terbang itu, terdapat juga B-29 Bomber, P-54 [Mustang], dan B-26 Invader.

4 Desember 1958

Ada 8 kali penerbangan gelap di atas Kalimantan Barat yaitu di atas Pangkalan Udara AURI Singkawang dan Kota Ledo dalam waktu 9 hari di ketinggian 3.000-7.000 kaki.

Peristiwa itu terjadi tanggal 4 Des [2x penerbangan], 5 Des [2x], 9 Des, 10 Des, 13 Des [2x].

15 Februari 1959

Reorganisasi susunan pemerintahan PRRI [dan juga Permesta] dimana Kolonel TNI [Purn] Alexander Evert KAWILARANG kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Perang dan sebagai Panglima Besar Permesta dengan pangkat Mayor Jenderal Permesta.

Februari 1959 [atau 2 Maret 1959?]

Serangan Umum besar2an pasukan Permesta serentak di Minahasa. Ada beberapa kota yang berhasil diduduki pasukan Permesta selama beberapa jam seperti Kawangkoan, Amurang, dll.

Mei 1959

Pada pertengahan bulan, APRI membangun serangan besar2an untuk merebut daerah Minahasa Selatan dengan menggempur Motoling dari arah Amurang, serta Ratahan dari jurusan Langowan yang akhirnya berhasil diduduki dan diperlengkapi dengan senjata berat terbaru buatan Ceko, Rocket Launcher 32 laras [yang oleh Permesta disebut "32 loop"] yang uji cobanya untuk menggayang Permesta.

Desa Liwutung [Markas Panglima KASAD Permesta berada di desa Towuntu di ujung desa Liwutung], Molompar, Mundung, Kuyanga, sampai Tombatu dibumihanguskan oleh Pasukan Permesta sebelum bergerak mundur. Kemudian Tombatu berhasil diduduki APRI.

Selama Pergolakan Permesta, tidak kurang 150 desa di daerah Minahasa mengalami taktik bumihangus oleh kedua belah pihak.

2 Juni 1959

Singapura memisahkan diri dengan Persekutuan Tanah Melayu / Malaysia. Singapura adalah basis [pangkalan] dan tempat persinggahan tokoh2 dan sejumlah pendukung Permesta dan yang menjadi titik terpenting dalam perhubungan dengan dunia luar. Di sini, para tokoh seperti Letkol Ventje Sumual sendiri, Mayor D.J. Somba, Kolonel Alex Kawilarang, Mayor Nun Pantow, Mayor Daan E. Mogot -[bukan Mayor Daan Mogot - pendiri Akademi Militer Tangerang yang gugur pada tahun 1946 melawan tentara Jepang]-, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, Mayor AURI Petit Muharto Kartodirdjo, Des Alwi [Atase Pers KBRI di Manila], E. Pohan, Kapten Lendy Tumbelaka, Mr Sjafruddin Prawiranegara, dan lainnya keluar masuk untuk mengadakan pertemuan dan hubungan dengan pihak asing guna mendukung gerakan PRRI dan Permesta.

5 Juli 1959

Dekrit Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945.

10 Juli 1959

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka Kabinet Djuanda [Kabinet Karya] dibubarkan terhitung hari ini. Kemudian dibentuk Kabinet Kerja I dengan Perdana Menterinya adalah Presiden Soekarno sendiri, sedangkan Ir. Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama.

Agustus 1959

Rapat di Singingon dipimpin Joop WAROUW akibat selisih pendapat soal rencana pembentukan sebuah negara terpisah RPI [Republik Persatuan Indonesia] menghasilkan 'Piagam Perjuangan - Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia' untuk mencegah rencana pembentukan RPI terlepas dari RI, yang isinya antara lain; pembelaan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pancasila, penyatuan kembali bangsa Indonesia, pelaksanaan hak otonomi regional, penyelesaian secara damai krisis Irian Barat melalui PBB, diakhirinya rezim Soekarno dan penghapusan komunisme internasional di Indonesia.

17 Agustus 1959

Sistem pemerintahan yang baru diperkenalkan oleh Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraannya dalam rangka HUT RI dengan nama "Manifestasi Politik" atau Manipol.

28 Agustus 1959

Mata uang Rupiah didevaluasi: Rp 1000,- menjadi Rp 100,-; banknotes lebih dari Rp 25,000 di- demonetized.

Militer mulai memindahkan etnis Cina dari pedesaan ke kota-

kota besar. Sebanyak 100.000 orang meninggalkan Indonesia menuju Republik Rakyat Cina dalam setahun kedepan; disamping 17.000 orang untuk Taiwan.

KSAD A.H.Nasution menggabungkan organisasi2 veteran dalam sebuah wadah dibawah kontrol militer [LVRI].

September 1959

Daerah Kotamobagu yang dipertahankan Resimen "Ular Hitam" dibawah pimpinan Komandan KDP I - Kolonel Permesta Dolf Runturambi akhirnya jatuh ke tangan tentara pusat / APRI.

Pengumuman Pemerintah Pusat mengenai jumlah korban akibat operasi militer penumpasan PRRI di Sumatra:

Dari pihak Pemerintah Pusat:

- tewas : 983 orang
- luka2 : 1.695 orang
- hilang dalam tugas : 154 orang

Dari pihak PRRI:

- tewas : 6.373 orang
- luka2/tertawan dlm pertempuran : 1.201
- menyerah : 6.057 orang

24 Oktober 1959

Kodam XIV/Hassanudin di Sulawesi Selatan resmi berdiri hari ini, setelah didirikan bulan Juni 1957 yang lalu, dengan Panglima Kodamnya adalah Kolonel Andi Muhammad Jusuf, yang dahulunya adalah Kepala Staf Resimen Hassanudin di Pare-pare.

2 November 1959

Ketua Sinode GMIM, A.Z.R. Wenas, bertemu dengan Panglima Besar Alex Kawilarang di desa Pangolombian, sebelah selatan kota Tomohon.

Beberapa ucapan Kawilarang yang disampaikan kepada Ketua Sinode GMIM adalah sbb:

1. Adakah Jakarta menyangka bahwa dalam satu jangka waktu yang pendek kami [Permesta] akan dapat ditaklukkan?

Jawabnya: "Ini tidak mungkin".

2. Kami nanti ditaklukkan dalam satu jangka waktu yang panjang?

Jawab Kolonel Kawilarang pula: "Ini juga pun tidak mungkin".

3. Indonesia sekarang ini telah hancur. Dengan berlangsungnya lebih jauh peperangan ini, ini diartikan "pasti bangkrutnya" Indonesia.

4. Dengan berlangsung lebih jauh peperangan saudara ini, mengakibatkan penderitaan maha hebat rakyat Indonesia seluruhnya. Maka dengan jalan ini Indonesia matang untuk Komunisme; dengan demikian tanpa bersusah payah berperang, Komunisme menang di Indonesia.

Kol. Kawilarang bertanya: "Adakah yang di atas ini barangkali yang dikehendaki oleh pemerintah di Jakarta?"

5. Maka untuk keselamatan Negara kita RI hendaknya pemerintah Jakarta untuk meninggalkan prestige-kwestienya yang hendaknya dihentikannya jalan kekerasan dan diadakan perundingan op gelijke voet.

6. Wij zijn niet overwonnen. Een betrekkelijk klein deel van de Minahassa is bezet door Pusat, het grootste gedeelte van de Minahassa is onder onze controle.

"Telah menduduki" bukan mengartikan "Telah menguasai".

Realiteit is, jalan2 ada dikuasai oleh Permesta. Verder het grootste deel van de Rakyat, zeker 90 prosent staat achter ons. Overwinnaar zijn impliceert het hart van de Rakyat te hebben gewonnen, en dit is niet het geval.

8. De andere Permesta-leiders spreken van een strijd tegen het communisme. Mag men zeggen dat de Javaanse soldaten die tegen ons worden ingeset allemaal communisten zijn? "Neen! Helaas door deze broederoorlog zijn de communisten in aantal toegenomen".

18. Wat komt er terrecht van Indonesie als straks de derde Wereldoorlog uitbreekt?

10 Desember 1959

Amnesti kepada Permesta diajukan oleh Komandan Operasi Merdeka, Letnan Kolonel Rukmito Hedraningrat. Amnesti yang dianjurkan oleh Komandan Operasi Merdeka itu ditanggapi oleh Joop Warouw:

"Bila kami menerima amnesti maka ini diartikan bahwa kami bersalah. Kami merasa bahwa kami tidak bersalah".

31 Desember 1959

Di Manado, Panglima Kodam 17 Agustus Kolonel Sunardjadi meminta Menteri Penerangan RI Arnold Mononutu supaya dapat memberikan pidato radio penutupan tahun 1959 dan menyongsong Tahun Baru 1960 kepada masyarakat Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Dalam pidato tersebut, ia mengemukakan dengan serius kepada para pimpinan Permesta agar menghayati penderitaan rakyat yang begitu besar akibat pergolakan Permesta, terutama masyarakat di Tanah Toar-Lumimut.

1 Januari 1960

Bekas pilot sewaan pesawat AUREV Permesta, Allan Lawrence Pope, mulai disidangkan Pemerintah Pusat.

Allan Pope kemudian dijatuhi hukuman mati dan kopilot J. Harry Rantung diganjar 15 tahun. Namun pemerintah AS berusaha keras untuk menyelamatkan Pope. Jaksa Agung AS Robert Kennedy diutus ke Jakarta menemui Presiden Soekarno. Dalam kunjungannya, Kennedy membawa surat Presiden Dwight D. Eisenhower yang isinya minta kebijaksanaan Soekarno agar Allan Pope bisa bebas. Disamping itu, istri Pope yang cantik diterbangkan dari AS untuk secara khusus menghadap Bung Karno. Konon, Bung Karno menerima dengan penuh keramahan. Kekaguman Bung Karno kepada wanita cantik, dimanfaatkan AS untuk membujuk sang presiden.

Satu ketika menjelang subuh pada Februari 1962, Harry dan Pope yang dalam status terpidana didatangi beberapa anggota CPM bersenjata lengkap dan meminta keduanya ikut. Pope diminta mengemasi milik pribadinya, sedangkan Rantung diperintahkan ikut saja tanpa perlu membawa apa2. Di luar penjara sudah menunggu sebuah panser. Mereka naik, sesaat kemudian kendaraan melaju kencang ke arah yang mereka tidak tahu. CPM tidak ngomong sepele katapun. Rantung buka mulut yang diarahkan ke Pope, "Kira2 ada apa, ya?" Pope yang terlihat tenang menjawab, "Saya tidak tahu, tapi saya kira mereka tidak berani berbuat apa2 kepada kita," kata Pope.

Dalam waktu setengah jam, panser berhenti dan diturunkan di Bandara Kemayoran. Di sana sudah menunggu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Howard Jones dan Atase Militer Kolonel George Benson di Jakarta dan beberapa staf kedubes AS di Jakarta. Sebuah pesawat Constellation sudah dipersiapkan. "Pasti kita akan jumpa lagi," kata Pope kepada Harry sambil berlalu ke dalam pesawat. Beberapa tahun kemudian, Harry Rantung mengaku pernah menerima undangan dari Pope yang bekerja di sebuah perusahaan penerbangan di California. "Saya diundang ke sana, semuanya gratis." ujar Harry Rantung

Usai pembebasan, Harry Rantung sempat bekerja sebagai petugas keamanan di kedutaan besar AS di Jakarta dan mendapat pensiun dari kedutaan.

Januari 1960

KSAU AUREV Komodore Muda Permesta Petit Muharto Kartodirdjo kembali ke Manado dari Singapura saat Belanda memulangkan tahanan Indonesia yang kebanyakan adalah aktivis Permesta dari Hongkong ke Minahasa. Petit datang ke Minahasa bersama tahanan tersebut meminta izin dari istrinya Siswani Siwi. Menurut Petit, Alex E. Kawilarang bersama pasukannya di hutan, yang juga meninggalkan keluarganya di luar negeri.

Dalam bulan Januari 1960, Petit kembali ke Minahasa dalam sebuah kapal penyelundup Belanda. Diantara para tahanan dalam kapal dia melihat Nufanto dan Lendy Tumbelaka. Beberapa tahanan sangat heran akan Petit, "Ia seorang etnis Jawa tapi bergabung bersama orang Manado".

Tahun ini, Kolonel Hein Victor Worang kembali ke Minahasa sebagai Perwira Menengah SPRI Menteri/KASAD dengan menjabat sebagai Ketua Team Penyelesaian/Penertiban Permesta.

17 Januari 1960

Pertemuan Ketua Sinode GMIM dengan Kol. J.F. Warouw di desa Remboken. Dalam pertemuan ini, Warouw mengemukakan bahwa perjuangan pemimpin2 Permesta bermaksud khusus mengoreksi akan beleid dari Pemerintah Pusat RI, menolak amnesti yang dianjurkan oleh Komandan Operasi Merdeka tanggal 10 Desember

1959 yang lalu, berhentinya sikap bermusuhan hanya mungkin bila tentara Jakarta ditarik dari Minahasa. Mereka juga tidak menghendaki penyelesaian persengketaan setempat melainkan penyelesaian secara keseluruhan Indonesia, dan juga ditegaskan bahwa PRRI dan Permesta menentang akan komunisme.

2 Februari 1960

Proklamasi Republik Persatuan Indonesia [RPI] yang ditunda dari tanggal 17 Agustus 1959.

Presiden merangkap Perdana Menteri RPI adalah Sjafruddin Prawiranegara dengan Wakil Perdana Menteri [Waperdam] adalah Muhammad Natsir. Dalam pasal 3 UUDnya disebutkan bahwa wilayah negaranya "meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945."

Tujuan RPI ini adalah untuk mempersatukan PRRI/Permesta dengan DI/TII Daud Beureuh di Aceh dan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Benderanya tetap merah-putih, namun ada sejumlah bintang di tengah yang setiap bintang melambangkan masing2 pemberontakan saat itu yang berada di bawah RPI. RPI ini ditentang dengan keras oleh Waperdam PRRI/ Kepala Pemerintahan Sipil Permesta [Kepala Pemerintahan PRRI di Sulawesi] Joop Warouw serta Panglima Besar Permesta Alex Kawilarang.

Dalam pengumumannya, Ketua Badan Pekerja Dewan Pimpinan Pusat [DPP] Permesta, Henk Rondonuwu menolak RPI ini. Meskipun RPI ini telah berdiri, namun di daerah gerilya Permesta sendiri seperti di perbatasan Minahasa - Bolaang Mongondow, masih dilaksanakan Upacara Peringatan HUT RI secara resmi dan dihadiri oleh tokoh2 militer dan sipil Permesta.

Masalah RPI ini berbeda dengan PRRI. Kalau PRRI hanyalah kabinet tandingan, maka RPI lebih merupakan negara dalam negara. Hal ini memperkuat anggapan sementara orang bahwa gerakan daerah ini adalah gerakan separatisme. Menurut pandangan para pemimpin PRRI dan Permesta, RPI yang lebih banyak merupakan gagasan tokoh2 politik, direncanakan sebagai taktik dalam perjuangan PRRI.

Usia RPI sejak direncanakan untuk kemudian diproklamasikan pada September 1960 adalah hanya 2 tahun.

Maret 1960

Seorang penasehat politik Joop Warouw, Prof.Mr. G.M.A.

Inkiriwang [juga sebagai Ketua Parlemen/Menteri Kehakiman Permesta] ditahan oleh Mayor Hans Korua, Komandan Batalyon 3/Brigade 999 pimpinan Jan Timbuleng.

Sejak itulah situasi menjadi semakin mencurigakan antara para perwira Permesta. Joop Warouw kemudian bertemu dengan Letkol Permesta J.M.J. 'Nun' Pantouw, perwira intel Panglima Sumual [Assisten I/Intelejen KSAD Permesta] dan Gerson Sangkaeng, Komandan Batalyon 2/Brigade 999. Hasil pertemuan itu, Nun Pantouw bersedia memberi bantuan satu satuan pasukan tambahan kepada Warouw untuk meninggalkan wilayah kekuasaan Jan Timbuleng yang diketahui beraliran kiri tersebut.

9 Maret 1960

Seorang Perwira AURI, Letnan Udara II Daniel Alexander Maukar [alias Daantje, alias Danny], menembaki kompleks tangki minyak BPM di Tanjung Priok, Istana Merdeka dan Istana Bogor dengan Pesawat MIG-17 yang hanya dilengkapi kanon 23mm pada siang hari sekitar pukul 11.30, kemudian mendaratkan pesawatnya di daerah persawahan Kadungoro, Leles [Garut, Jawa Barat] namun segera tertangkap.

Maksud Danny Maukar adalah untuk memperingatkan Soekarno yang sudah mulai "main mata" dengan PKI, serta menghendaki agar Pemerintah Pusat mau berunding dengan Permesta di Sulawesi. Rencana ini sebenarnya direncanakan untuk dilakukan pada tanggal 2 Maret 1960 sebagai hari peringatan Proklamasi Permesta, tapi gagal, juga rencana keesokan harinya tanggal 3 Maret, namun gagal lagi. Semua gerakan ini dilakukan oleh seluruh pejuang Permesta Sulut yang berada di Jakarta dengan sandi "Manguni" yang dikomandoi Ventje Sumual bersama2 Sam Karundeng dan Daniel Maukar.

27 Maret 1960

Gerakan yang dilakukan oleh beberapa anggota Pusat Kaveleri [a.l. Letnan Togas] di Bandung yang bermaksud untuk memaksa Pemerintah Pusat agar mengadakan perundingan dengan pihak Permesta di Sulawesi.

30 Maret 1960

Sistem pemerintahan daerah otonom Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sesungguhnya dimulai hari ini pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah RI No.5/Tahun 1960 yang menetapkan pembagian wilayah administratif Propinsi Sulawesi menjadi dua wilayah administratif masing2 Propinsi Sulawesi Utara-Tengah [Sulutteng] dan Propinsi Sulawesi Selatan-Tenggara [Sulseltra].

5 April 1960

Kepala Pemerintah Sipil Permesta/Kepala Pemerintahan PRRI di Sulawesi, Kol. J.F. "Joop" WAROUW, ditangkap dan ditahan oleh Batalyon 7/Brigade 999 pimpinan Kapten Robby Parengkuan. Dalam peristiwa itu, lutut Joop Warouw ditembak.

16 Juli 1960

Danny A. Maukar diseret dalam pengadilan Mahkamah Angkatan Udara dengan pengacaranya adalah Hadeli Hasibuan dan dijatuhi hukuman mati dalam keadaan perang.

17 Agustus 1960

Meskipun Republik Persatuan Indonesia [RPI] telah didirikan oleh tokoh2 PRRI, namun di daerah gerilya Permesta sendiri seperti di perbatasan Minahasa - Bolaang Mongondow, masih dilaksanakan Upacara Peringatan HUT Republik Indonesia secara resmi yang dihadiri oleh tokoh2 militer dan sipil Permesta.

Keppres No.200/Th.1960 dan No.201/Th.1960 tanggal 17 Agustus 1960, tentang pembubaran partai politik Masjumi [Majelis Sjuro Muslimin Indonesia] dan PSI, karena "organisasi itu melakukan pemberontakan, karena pemimpin2nya turut serta dengan pemberontakan apa yang disebut dengan 'PRRI' atau 'RPI' atau telah jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan". Dalam pidato peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-15, Presiden Soekarno memaklumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda, yang merupakan tanggapan atas sikap Pemerintah Belanda yang dianggap tidak menghendaki penyelesaian secara damai mengenai pengembalian wilayah Irian Barat kepada Indonesia.

Awal Oktober 1960

Setelah Kepala Pemerintahah Sipil Permesta, Kol. J.F. "Joop" WAROUW ditangkap oleh Batalyon 7/Brigade 999 pimpinan Kapten Robby Parengkuan, maka KSAD Permesta/PRRI Ventje Sumual memanggil Jan Timbuleng, Komandan Brigade 999. Timbuleng berkenan, asal Joop Warouw juga diajak secara resmi. Maka Sumual pun membuat surat panggilan yang digunakan Jan Timbuleng untuk mencegah Joop Warouw untuk meninggalkan wilayah kekuasaannya.

Padahal, secara diam2 melalui Kapten J.Lisangan, Komandan Batalyon 1/Brigade 999, Sumual berhasil mengumpulkan informasi tentang diri Warouw. Ternyata, selain Joop Warouw, juga telah ditahan sejumlah menteri kabinet. Dari Jan Timbuleng diketahui, penangkapan itu dilakukan karena melihat Joop Warouw telah memihak dan mendukung tokoh2 Permesta di wilayah utara Minahasa.

8 Oktober 1960

KSAD Permesta [/PRRI] Ventje Sumual mengadakan rapat di Markas Besar Permesta di perkebunan Lindangan[?] - Tompaso Baru. Jan Timbuleng, Komandan Brigade 999 [Triple Nine] datang dengan Batalyon 3 dengan komandannya Mayor Hans Korua [KOROWA] dan Batalyon 4 dengan komandannya Benny Pandeiroth. Ketika itu, Timbuleng dan pasukannya tanpa sadar, jika sebetulnya pertemuan itu merupakan suatu taktik untuk menahannya. Ia juga tidak curiga, kalau Komandan Batalyon 1 - J. Lisangan dan Komandan Batalyon 2 - Gerson Sangkaeng dan seluruh pasukannya tidak lagi setia mendukungnya. Karena itu, sementara Ventje Sumual membuat pertemuan dengan Jan Timbuleng dan perwira2ya, satuan Gerson Sangkaeng melakukan pelucutan senjata atas pasukan2 Jan Timbuleng yang tengah menunggu di luar. Mereka tidak mencurigai Gerson, karena mereka pikir, ia salah satu dari mereka juga. Dan sebagai akhir dari pelucutan itu, Gerson Sangkaeng memberi isyarat dengan menembakkan sebuah senapan mesin. Ketika itu juga, Sumual mengakhiri rapatnya, dan begitu Jan Timbuleng serta perwira2nya melewati depan gardu pos, pasukan Sumual pun menawannya.

Semula niat Ventje Sumual hendak membawa Jan Timbuleng dan sejumlah perwira Brigade 999 ke pengadilan militer. Namun

sebelum itu terjadi, Jan Timbuleng yang tengah ditawan di tingkat atas sebuah rumah panggung, berhasil merebut senjata dari seorang pengawal dan melompat keluar jendela dan terbang ke atas rumpun pohon bambu di dekat situ [dengan ilmu/jimat terbangnya] sembari berteriak minta bantuan. Kemudian seorang tentara CTP asal Ambon diperintahkan untuk melepaskan tembakan ke tubuh Jan Timbuleng [dengan prosedur adat] yang tengah mengudara. Jan Timbuleng yang dikenal kebal peluru, pada saat itu juga tewas. Dari saku celananya berhasil didapat sebetuk cincin, sebuah arloji milik Joop Warouw, foto2 keluarga Warouw dan sejumlah surat dari J.P. Mongula, Walikota Manado yang juga diketahui beraliran kiri/ komunis.

Kematian Timbuleng membuat sejumlah perwira bawahannya mencoba untuk melarikan diri dari markas Sumual. Beberapa diantaranya, seperti Robby Parengkuan dan sejumlah anak buahnya berhasil melarikan diri dan kembali ke markas dimana Joop Warouw ditawan.

Sadar akan hal itu, Ventje Sumual pun mengirim pasukan untuk menyelamatkan Joop Warouw. Namun usaha tersebut sia2 karena Joop Warouw telah dihabisi terlebih dahulu oleh anak buah Robby Parengkuan.

15 Oktober 1960

Kepala Pemerintah Sipil Peremesta/Kepala Pemerintahan PRRI di Sulawesi, Kol. J.F. "Joop" WAROUW dieksekusi di daerah Tombatu oleh anak buah Kapten Robby Parengkuan bernama Hemanus Jus dari Batalyon 7/Brigade 999, atas perintah lisan Jan Timbuleng sebagai Komandan Brigade 999.

Hal ini dikarenakan Joop Warouw tidak mau menandatangani naskah surat perintah tentang pengangkatan Jan Timbuleng menjadi Panglima KDM-SUT [Komando Daerah Militer Sulawesi Utara-Tengah] menggantikan D.J. Somba [selain atas sebab lain yaitu Jan Timbuleng yang tewas].

[Jenasahnya dicari2 atas perintah Presiden Soekarno, lalu Gubernur Sulut H.V. Worang, dan Presiden Soeharto, namun gagal. Baru ditemukan tanggal 20 Agustus 1962 oleh Tim bentukan ketua Sinode GMIM, Pdt. K.H. Rondo].

13 Desember 1960

Melihat pertumbuhan yang pesat disegala bidang baik di sektor pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Pusat menganggap perlu mengubah sebutah Propinsi Sulawesi Utara Tengah menjadi Daerah Tingkat I [Dati I atau Daerah Swantara tingkat Pertama] Sulawesi Utara Tengah dengan dikeluarkannya Undang2 Darurat No. 47 Prp. Tahun 1960.

Gubernur Sulawesi Utara [Sulutteng] yang baru -pertama kali [versi Pemerintah Pusat] adalah Arnold Achmad Baramuli, SH. yang dijabat dari tanggal 23 September 1960 sampai 15 Juni 1962 yang adalah gubernur termuda di Indonesia saat itu [30 tahun]. Sebelumnya ia adalah Jaksa Distrik Militer provinsi Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur dengan pangkat Letkol Tituler.

Awal tahun 1961

Wakil Gubernur Sulutteng B. Tumbelaka, berkunjung ke desa Malenos untuk menugaskan Victor Adoelf Tutu sebagai Hukum Tua [Kades] Desa Malenos untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan pasukan Permesta, dan mencari lokasi yang aman untuk tempat mengadakan perundingan.

Perundingan pertama, diadakan di perkebunan Ritey, dekat hulu Sungai Malenos. Pihak pemerintah diwakili B. Tumbelaka sebagai wakil Gubernur Sulutteng, sedangkan pihak Permesta diwakili oleh Johan Tambajong. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan perundingan lanjutan di desa Malenos dan akan mempertemukan pimpinan pasukan Permesta dan TNI.

Perundingan lanjutan diadakan di gedung Gereja GMIM Malenos, yang dihadiri utusan pemerintah RI adalah Wagub B. Tumbelaka dan Perwira Staf Kodam XIII Merdeka, Kol. Supangat. Sedangkan utusan Permesta diwakili oleh Johan Tambajong dan Wem Tenges selaku Komandan Brigade WK III. Selama perundingan berlangsung, keamanannya dijaga ketat oleh pasukan Batalion A/Kompi Buaya di bawah pimpinan Kapten Permesta Anthon Tenges. Perundingan berjalan baik dimana masing2 pihak saling memahami dan berjabat tangan, maka lahirlah persetujuan perdsamaan untuk mengakhiri perang saudara. Dalam perundingan tersebut, telah diputuskan bersama untuk mengadakan gencatan senjata dan upacara pembuatan naskah perdamaian antara pemerintah RI dengan pasukan Permesta, dan disepakati diadakan di Desa Malenos Baru yang sekarang ini sudah jadi pemukiman penduduk. Jarak dari Desa Malenos ke Desa Malenos Baru cukup dengan menempuh kira2 1.500 meter.

4 Maret 1961

Di Jakarta dilangsungkan penandatanganan perjanjian pembelian senjata dari Uni Soviet kepada Pemerintah Pusat Indonesia atas dasar kredit jangka panjang. Pembelian senjata tersebut adalah pembelian senjata terbesar yang pernah dilakukan dari luar negeri sampai saat itu. antara lain: 275 tank, 560 kendaraan militer untuk Angkatan Darat; lebih dari 150 pesawat berbagai jenis untuk Angkatan Udara; 4 corvet, 24 kapal torpedo, 2 kapal selam dan lain2 untuk Angkatan Laut.

Bantuan perlengkapan senjata dari Blok Uni Soviet dan Eropa Timur dalam jumlah begitu besar, menyebabkan pemerintah Amerika Serikat meninjau kembali politik permintaan senjata Amerika Serikat oleh Indonesia.

April 1961

Kolonel [Permesta] D.J. Somba dan pasukannya memimpin suatu aksi pemberontakan.

[Kelak setelah mendapat amnesti serta dikarantinakan politik selama 10 hari di Jakarta, kemudian menerima kembali pangkat resmi sebagai Mayor TNI dan pensiun dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel].

2 April 1961

Pertemuan pendahuluan di desa Lopana/Tumpaan [dimana Permesta diwakili oleh Panglima Besar Permesta Mayjen Permesta Alex Kawilarang serta Pemerintah Pusat diwakili oleh Deputi I KSAD, Brigjen TNI Ahmad Yani] guna menjajaki rapat "Penyelesaian Permesta".

Juga pertemuan serupa diadakan di rumah Keluarga Hans Tular di Tomohon antara Panglima Besar Permesta Mayor Jenderal [Permesta] Alexander Evert Kawilarang dengan Kepala Staf TNI-AD Letnan Jenderal [TNI] Abdul Haris Nasution.

3 April 1961

Pasukan Zeni Kodam XIII/Merdeka membuat suatu lapangan untuk tempat upacara pertemuan pendahuluan penyelesaian Permesta. Tempat itu sekarang yakni sekitar rumah Gereja GMIM Eben Haezer Malenos Baru.

4 April 1961

Penyelesaian masalah Pergolakan Permesta di Malenos Baru, Amurang. Pihak TNI diwakili Panglima Kodam XIII Merdeka, Kolonel Soenandar Priosudarmo, dan pihak Permesta diwakili oleh Panglima Besar Mayjen [Permesta] Alex E. KAWILARANG dan Kolonel [Permesta] Daniel J. SOMBA, serta Letkol. [Permesta] Lendy R. Tumbelaka. Selain itu tak lupa dicatat bahwa A.C.J. Mantiri - Assisten IV/Logistik KSAD PRRI dan Permesta [bekas direktur Pelayaran Rakyat Indonesia di Manado, yang tak lain adalah suami dari sepupu Alex Kawilarang] juga termasuk salah satu perunding utama Permesta dengan Pemerintah Pusat. Hasil dari pertemuan ini bahwa ribuan pasukan Permesta akan mendapat amnesti pemerintah.

Penandatanganan naskah Overste D.J. Somba yang berisi pernyataan untuk kembali ke pangkuan RI.

11 April 1961

Gencatan senjata [cease-fire] antara pasukan Permesta dan Tentara Pusat [TNI] dilakukan hari ini.

14 April 1961

Perdamaian Permesta dan Pemerintah Pusat.

Upacara defile "Penyelesaian" penyambutan kembalinya Permesta ke pangkuan RI diadakan di Susupuan, yaitu perbatasan kota Tomohon dengan Desa Woloan, yang mana GMIM selaku fasilitator yang mempersiapkan lahan upacara pertemuan.

Sekitar 30.000 tentara Permesta di Sulawesi Utara saat itu keluar dari hutan2 setelah KSAP PRRI / Panglima Besar Permesta Mayor Jenderal Permesta Alexander Evert Kawilarang melakukan perundingan dengan KASAD TNI Letnan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Mereka sepakat untuk bersama2 menghadapi kekuatan komunis di pulau Jawa.

Dalam upacara ini juga WAKASAD [Wakil KSAD] Letjen TNI Hidayat menerima Mayjen Permesta Alex Kawilarang sebagai seorang teman lamanya.

Alex Kawilarang sulit menyembunyikan kekesalannya terhadap Bung Karno. Hal itu tersirat dari percakapan awal pertemuannya dengan JJ Pitoy yang dihadiri wartawan S.E.Panggey, begitu berjabat tangan, langsung membuka percakapan dengan kata2: "Bagaimana dengan Soekarno-mu?". Ia terus melanjutkan kata2 yang bernada sindiran terhadap Bung Karno begitu berjabat tangan dengan S.E.Panggey yang oleh Mr J.J.Pitoy diperkenalkan sebagai wartawan Permesta yang baru saja keluar bui [penjara] [sekitar 2 tahun berada dalam tahanan karena sebagai wartawan, S.E.Panggey telah ikut mendarat ke Morotai dengan Permesta pimpinan Mayor Nun Pantouw.

Panglima Tertinggi Permesta, Brigjen. Permesta Ventje Sumual saat itu belum menyerahkan diri. Kemudian dengan bantuan para bekas perwira Permesta yang telah menyerah, menyerahkan diri dengan menghadap KSAD Letjen TNI A.H. Nasution di rumah dinas dan secara tertulis menyatakan "menyerah, ulangi menyerah tanpa syarat", serta dengan tegas menyatakan bahwa ia memikul diatas pundaknya seluruh tanggung jawab bagi segenap jajaran pasukan tentara dan sipil Permesta baik di dalam maupun di luar negeri.

Alex Kawilarang kemudian menjadi tokoh PRRI dan Permesta satu2nya yang mendapat rehabilitasi nama dari Presiden Soekarno [yang notabene dulunya tak lain adalah anak mas Presiden tersebut].

[Tetapi belakangan Kawilarang kecewa pada Nasution yang tidak menepati janjinya:

Sejumlah perwira Permesta ditahan dan yang lainnya diturunkan pangkat. Ribuan pasukan Permesta setiba mereka di pulau Jawa tanpa diduga dilucuti senjatanya dan dimasukkan ke kamp2 konsentrasi/rehabilitasi. Sebagian lagi dikirim ke perbatasan Kalimantan Utara dan berperang melawan tentara Inggris Gurka / Dwikora].

29 Mei 1961

Secara resmi Ahmad Husein melaporkan diri dengan pasukannya, disusul oleh tokoh2 PRRI yang lain, baik sipil maupun militer.

22 Juni 1961

Permesta mendapat amnesti dan abolisi dari Presiden Soekarno melalui KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 322 TAHUN 1961 Tentang "Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Para Pengikut Gerakan `Permesta` Dibawah Pimpinan Alex Kawilarang, Laurens Saerang, dan D.J. Somba yang Memenuhi Panggilan Pemerintah Kembali Kepangkuan Ibu Pertiwi".

Amesti ini dinyatakan kepada mereka "yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi".

Amnesti dan abolisi ini tidak disetujui oleh PKI.

Hanya Kolonel [Purn.TNI] Alex Kawilarang yang langsung direhabilitasi namanya oleh Presiden Soekarno, sedangkan yang lainnya diberi komentar "Revolusi belum selesai dan tuan2 ini adalah penghalang roda revolusi," kata Bung Karno kepada para bekas perwira Permesta yang lainnya dan kemudian ditahan tanpa melalui proses pengadilan.

Dari Manado, Sumual dan para pemimpin Permesta lainnya diterbangkan ke Jakarta untuk dikarantinakan [ditahan] di kawasan Megamendung - Jawa Barat, padahal sebelumnya telah dijanjikan amnesti bagi para ex. perwira Permesta. Di sini mereka bertemu dengan para tokoh2 politik PSI/Masyumi yang berpihak pada PRRI dan Permesta yang sudah ditahan.

Bekas tentara Permesta yang dilatih di Minahasa selama beberapa minggu kemudian dikirim ke Kamp Rehabilitasi/Latihan di daerah Jawa Timur untuk persiapan dikirim untuk Operasi Pembebasan Irian Barat, Operasi Dwikora, dll.

Mereka naik kapal angkut pasukan ADRI "Aronda" dan tiba di Tanjung Perak Surabaya tanggal 1 September 1961, kemudian ditampung di Kamp Konsentrasi Dinoyo. Mereka di sana selama masa rehabilitasi diperlakukan dengan baik. Mereka menerima sabun mandi, rokok dan sedikit uang saku.

Setelah selesai masa rehabilitasi kami diberikan 3 pilihan yaitu kembali ke bangku sekolah, kembali ke masyarakat dan masuk TNI. Setelah dites ternyata hanya sedikit yang tembus. Sedangkan sebagian besar kembali ke masyarakat.

Sebagian bekas pasukan Permesta [eks-Meta] diterima menjadi tentara APRI atau kembali kekesatuannya.

Beberapa perwira Permesta, seperti D.J. Somba dan Lendy R. Tumbelaka ditarik ke Bakin [Badan Koodinasi Intelejen Negara], juga beberapa diantaranya yang mendapat tugas di MBAD [Mabes TNI-AD].

Para pemuda Permesta lainnya menempuh Sekolah Lanjutan Peralihan di Manado yang disediakan Pemerintah Pusat, setelah Penyelesaian PRRI dan Permesta [Kelak mereka mendirikan sebuah organisasi yang dianggap sebagai forum pembinaan dengan nama Ikaselanpe [Ikatan Alumni Sekolah Lanjutan Menengah Peralihan] di Jakarta].

PERMESTA tidak mati!

Masa Usai Permesta [Rehabilitasi]

17 Agustus 1961

Panpres No.449/Th.1961 Tentang Amnesti dan Abolisi secara luas, selain kepada PRRI dan Permesta, juga kepada pemberontak DI/TII Daud Beureuh, Republik Maluku Selatan [RMS], DI/TII Kahar Mudzakkhar, dll, dengan syarat harus melapor selambat2nya tanggal 5 Oktober 1961 sudah harus melapor diri. Bekas KSAU AUREV Petit Muharto Kartodirdjo pergi ke Kuala Lumpur untuk kemudian menghadiri penandatanganan pernyataan untuk kembali ke pangkuan RI. Setelah penandatanganan itu, dia menerima sebuah perintah dari Alex Kawilarang untuk menyusun kepulauan keluarga2 Permesta yang tetap berada di luar negeri. Sesudah konflik berakhir, Petit tetap tinggal di Singapura bersama keluarganya, baru pada tahun 1967 dia kembali ke Indonesia untuk jangka waktu yang pendek, untuk mengunjungi relasinya. Petit baru pulang kembali ke Indonesia tahun 1969.

18 Oktober 1961

Panpres No.568/Th.1961 tentang berbagai keringanan bagi mereka yang tertangkap dalam medan pertempuran.

19 Desember 1961

Dalam rapat raksasa di Yogyakarta, dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat [TRIKORA]. Dalam Operasi Trikora, banyak pasukan eks Permesta yang diikutsertakan. Diantaranya adalah Pasukan Jonkhy Kumontoy yang bergerilya di Maluku Utara. Karena sulitnya perhubungan, Kumontoy tidak menerima instruksi Sumual pada 1961 agar semua pasukan Permesta menghentikan permusuhan. Karena itu sampai awal 1962 pasukan ini terus bergerilya. Namun pada awal 1962, Kumontoy dihubungi Komandan Kodim Maluku Utara dan dianjurkan agar pasukannya dialihkan secara utuh kedalam TNI untuk merebut Irian Barat. Sekitar 158 anggotanya lalu direhabilitasi dan dijadikan Pasukan Gerly 500 [PG 500] dan ditugaskan di Pulau Waigeo dan Manokwari. Demikian mengagumkan perjuangan mereka sehingga ketika perintah cease-fire dikeluarkan PBB, pasukan itu dijadikan inti pasukan baru yang merupakan gabungan antara PG 100 sampai PG 600. Mayor Ali Mertopo menamakan pasukan baru itu "Detasemen Kumontoy" dengan Jonkhy R. Kumontoy sebagai komandannya.

Sebagian pasukan eks-Permesta yang pada 1961 dikirim ke berbagai kota di Jawa untuk direhabilitasi, akhirnya disusun dalam kesatuan2 Arhanud [Artileri Pertahanan Udara] TNI

Angkatan Darat dalam rangka pelaksanaan Dwikora. Mereka dipersiapkan untuk dikirim ke perbatasan Indonesia-Malaysia. Di Banda Aceh terdapat satu baterai [kOMPI] pimpinan Kapten Daan Piay, demikian juga peranan mereka di Banjarmasin dan tempat lainnya, antara lain infiltrasi ke istana Raja Brunei Darussalam di Bandar Seri Begawan.

30 Desember 1961

Panpres No.659/Th.1961 tentang mekanisme penyaluran bagi mereka yang tertangkap dalam medan pertempuran dan menyerah.

2 Januari 1962

Brigjen Andi M.Jusuf [deklarator Piagam Permesta no.42] menjadi Menteri Perindustrian Ringan dalam Kabinet Dwikora I.

15 Juni 1962

F.J. Tumbelaka menjadi Gubernur Sulawesi Utara [Sulutteng] hingga tanggal 18 Juni 1962.

22 Juni 1964

Surat Keputusan TNI-AD No.Pelak-II/6/1965 tanggal 22 Juni 1964 tentang Petunjuk Pelaksanaan Panpres No.659/Th.1961 tanggal 30 Desember 1961.

27 Agustus 1964

Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Operasinya dilakukan antara bulan Maret dan Agustus 1962, dimana dalam setiap peristiwa besar yang menyangkut pengerahan pasukan TNI, tercatat partisipasi "eks-Meta" [bekas tentara Permesta].

Desember 1964

Bekas tokoh2 PRRI dan Permesta seperti Wilhem Pesik [ex Menpen PRRI yang menggantikan Saleh Lahede yang ditahan di Makassar], Daan E. Mogot, dan Des Alwi dalam suatu operasi khusus [Opsus] menuju perdamaian dengan Malaysia melalui jalur intelejen KOSTRAD.

23 September 1964

Sistem Pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara [Sulutteng] dikembangkan lagi sesuai potensi alam maupun manusianya serta perkembangan sistem pemerintahan yang perlu ditangani secara terpadu dibawah suatu daerah otonom yang mempunyai ruang lingkup wewenang dan tugas; dengan dikeluarkannya UU Drt. No. 13 Tahun 1964 tertanggal 23 September 1964 menjadi dua daerah otonom masing2: Daerah Tingkat I Sulawesi Utara [Sulut] dan Daerah Tingkat I Sulawesi tengah [Sulteng].

1 Oktober 1965

Peristiwa G-30-S/PKI meletus, dengan menculik 7 Jenderal AD,

membuka mata Indonesia bahwa apa yang diperingatkan Permesta tentang komunis yang adalah musuh dalam selimut terbukti benar.

11 Maret 1966

Brigjen Andi M. Jusuf [penandatanganan deklarasi Piagam Permesta no.42] bersama M. Panggabean dan Amir Machmud menerima Super Semar dari Presiden Soekarno untuk diserahkan kepada Mayjen Soeharto sebagai Pangkokamtib.

Surat Perintah ini kemudian disalahgunakan oleh pihak yang mengembannya.

12 Maret 1966

Pembubaran PKI dan ormas2nya dan dianggap sebagai organisasi terlarang di wilayah RI.

26 Juli 1966

Sehari setelah Soeharto menjadi pejabat Presiden, para tahanan militer dan sipil yang ditahan di tahanan militer Setiabudi, seperti Ventje Sumual, Maluddin Simbolon, Achmad Husein, Syafruddin Prawiranegara, Mr. Asaat, dan Anak Agung Gede Agung dibebaskan dengan surat pembebasan yang dibacakan seorang jaksa bernama Adnan Buyung Nasution.

1967

Setelah dibebaskan dari Rumah Tahanan Militer, Ventje Sumual, Achmad Husein, Maluddin Simbolon, M. Saleh Lahede, R. Soetarno, Bing Latumahina, A.N. Nusjirwan, M. Biga, dll mendirikan PT Konsultasi Pembangunan dengan usaha di bidang jasa, kosultan, hukum, rekayasa dan kontraktor.

Letkol Hi.Rauf Mo'o [deklarator Piagam Permesta no.37] menjadi Walikota Manado [sampai 20 Maret 1971].

Walikota Manado era awal dekade 1990-an, Ir. Najoan Habel Eman dahulunya juga adalah bekas pelajar Permesta.

Di Sulawesi Selatan, Mayor [Purn.] Daeng Patompo, seorang pendukung cita2 Permesta, pernah menjabat sebagai Walikota Makassar / Ujung Pandang dan berhasil meraih "Sam Karya Nugraha".

20 Februari 1967

Presiden republik Indonesia, Dr.I. Soekarno hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal TNI Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966. Penyerahan secara sederhana ini dilakukan secara sederhana dan dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Ampera.

12 Maret 1967

Pelantikan Jenderal TNI Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia, berdasarkan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967.

2 Maret 1967

Mayjen. Hein Victor Worang dilantik menjadi Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan SK Presiden No. UP 6/1/28-212 tanggal 23 Februari 1972. Jabatan gubernur dijalankan hingga tanggal 6 Juni 1978 dan digantikan oleh Brigjen Welly Lasut G.A.

8 Agustus 1967

ASEAN [Association of South East Asian Nations] / Perbara [Persatuan Bangsa2 di Asia Tenggara] dideklarasikan di Bangkok dalam Deklarasi Bangkok oleh para Menteri Luar Negeri negara Filipina, Indonesia, Malaysia, Muangthai [Thailand], dan Singapura.

Ventje Sumual ikut berperan aktif membantu pimpinan Orde Baru bersama Aspri - Presiden RI bidang Khusus Keamanan & Politik [OPSUS] dalam penjajakan pembentukan ASEAN ini.

25 Oktober 1967

Pejabat Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Soeharto, memulai rangkaian kunjungan kerja ke berbagai daerah. Daerah Sulawesi Utara/Minahasa adalah kunjungan pertamanya atas saran seorang Staf Ahli Presiden, Daan E. Mogot.

19 Maret 1968

Danny A. Maukar, yang menembaki Istana Presiden di Jakarta tanggal 9 Maret 1960, resmi dilepaskan dari hukuman mati atas permintaan grasi dari KSAU Oemar Dhani dan pengacaranya Hadeli Hasibuan kepada Presiden Soekarno serta kemudian kepada Presiden Soeharto.

27 Maret 1968

Pelantikan Jenderal TNI Soeharto, pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, sebagai Presiden Republik Indonesia.

6 Juni 1968

Prof.Soemitro Djojohadikusumo [Mantan Menhub PRRI/Permesta] menjadi Menteri Perdagangan dalam Kabinet Pembangunan I.

1969

Prof.Mr.G.M.A. Inkiriwang,SH [mantan Ketua Parlemen & Menteri Kehakiman Permesta] menjadi caretaker Rektor UNSRAT Manado sampai tahun 1973.

Selain itu beberapa universitas lainnya yang dapat dicatat di sini yang bekas Rektor Universitasnya dari pemuda Permesta adalah Universitas Tadulako di Palu - Sulteng, Universitas Kendari - Sultra serta Universitas Nusa Cendana di Kupang - NTT.

Abdul Muis, seorang Guru Besar Universitas Hassanudin dan Universitas Terbuka, adalah bekas pemimpin harian Permesta.

1972

ex. Letkol.dr. Oscar E. Engelen [bekas Ketua Ikatan Perwira TT-VII dan deklarator Piagam Permesta no.33], menjadi Rektor Universitas Kristen Djaya [UKRIDA] sampai tahun 1987.

Ny. Mathilda Towoliu-Hermanses [deklarator Piagam Permesta no.5] yang pernah menjadi dosen di Unhas, pada awal dekade 90-an menjadi Rektor Universitas Kristen Paulus di Ujung Pandang.

1974

Prof.Mr.G.M.A. Inkiriwang, SH terpilih menjadi Rektor IKIP Negeri Manado sampai tahun 1977.

23 Desember 1976

Pemancar TVRI pertama di Sulawesi Utara yang terletak di puncak Tikala Manado, diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Utara waktu itu Mayjen H.V. Worang. Untuk pertama kalinya masyarakat Sulawesi Utara khususnya kota Manado dapat menonton Siaran TVRI dalam hal ini Siaran yang direlay dari TVRI Jakarta [melalui Satelit Palapa]. Tanggal 28 Agustus 1978 TVRI Stasiun Manado mulai melaksanakan siaran percobaan [siaran hitam/putih], yang operasional siarannya dilaksanakan oleh 25 orang lulusan Training Center TVRI Jakarta.

Nanati pada tanggal 7 Oktober 1978 TVRI Stasiun Manado diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan, Sutikno Lukitodisastro.

29 Maret 1978

Jenderal Andi M. Jusuf [deklarator Piagam Permesta no.42] menjadi Panglima ABRI/ Menhankam dalam Kabinet Pembangunan III.

Masa Reuni eks-Permesta [neo-Permesta]

12 Februari 1984

IKASELANPE [Ikatan Persaudaraan Alumni Sekolah Peralihan Permesta / Ikatan Persaudaraan Alumni Pejuang Permesta] didirikan dengan Ketua Umumnya adalah Benny Tengker.

4 Mei 1985

Kodam VII/WIRABUANA resmi berdiri di Ujung Pandang yang mencakup Pulau Sulawesi, setelah diadakan reorganisasi daerah militer TNI-AD - ABRI dalam bulan Maret-Mei 1985 dengan melikuidasi/membubarkan Kodam XIII/Merdeka [Sulawesi Utara-Tengah] dan Kodam XIV/Hassanudin [Sulawesi Selatan-Tenggara]. Pada tahun ini, TNI-AD memiliki kekuatan 278.100 orang.

1989

Kol.[Purn] Hi. Rauf Mo'o [deklarator Piagam Permesta no.37] menjadi Rektor IAIN [Institut Agama Islam Nasional] Sulut.

15 Februari 1989

Mr. Sjarifuddin Prawiranegara, bekas Perdana Menteri PRRI dan mantan Perdana Menteri RI, meninggal dunia hari ini.

1990

Prof. Octavianus Rondonuwu, MSc. [mantan anggota Pasukan Pengawal Barter Permesta] terpilih menjadi Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon [UKIT] sampai tahun 1998.

8 September 1992

Kerangka Kolonel Joop Warouw [Waperdam PRRI/Permesta dan Kepala Pemerintahan Sipil Permesta] ditemukan di perkebunan desa Bunag, Tombatu, kemudian dikebumikan tanggal 20 September di kampungnya, di desa Leleko - Remboken, setelah sebelumnya disemayamkan di Bukit Inspirasi.

Kol. Joop Warouw dibunuh oleh pasukan Bn.7/Robby Parengkuan atas perintah komandannya, Jan Timbuleng [Brigade 999/Triple Nine] karena menolak pengangkatannya menggantikan Kolonel D.J. Somba sebagai Panglima KDM-SUT, dan juga atas kematian Jan Timbuleng sendiri di markas besar Ventje Sumual.

25 Februari 1995

Mayjen. TNI Evert Ernst Mangindaan [alias Lape] terpilih sebagai Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara menggantikan Mayjen Cornelis Johan Rantung.

Sebelumnya Mayjen. E.E. Mangindaan adalah Gubernur Sekolah Staf Komando Angkatan Darat [SESKOAD] di Bandung.

Dalam berbagai organisasi reuni Permesta, E.E. Mangindaan duduk sebagai penasihat organisasi. Selain itu, E.E.

Mangindaan juga menyumbangkan sebidang tanah di Amurang untuk dijadikan lokasi berdirinya Universitas Permesta [Sekolah Tinggi].

20 Mei 1998

Bertepatan dengan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan hari libur nasional Hari Kenaikan Isa Al-masih [Yesus Kristus], Presiden Soeharto menyatakan mundur dari kursi kepresidenan, dan digantikan oleh Wakil Presiden, Prof.Ing. Bachruddin Jusuf Habibie, menandai [mulai] tumbangnya Orde Baru.

2 Maret 1999

Yayasan Permesta didirikan di Tondano oleh Generasi Ke-3 Permesta [Generasi Muda Permesta].
Ketua Umum Periode 1999-2004 adalah Johny R. Singkoh, BSc., Sekretaris Umum Drs. Dolfie J. Kotambunan dan Direktur Eksekutif adalah Pdt. Renata Ticonuwu, STh.

15 April 1999

Kolonel [Purn?] Alex.E.Kawilarang [Panglima Besar Tentara Permesta] dalam rangka HUT Kopassus ke-47 di Markas Komando Kopassus di Cijantung Jakarta Timur, setelah 47 tahun sejak ia mendirikan Kopassus, [akhirnya] dianugerahi Topi Baret Merah dan Pisau Komando sebagai Warga Kehormatan Kopassus Tahun 1952 Kol. Alex Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Territorium III/Siliwangi [Kesko Terr-III] saat ia menjadi Panglima TT-III/Siliwangi. Kemudian Kesko tersebut diambil alih oleh Mabes AD [MBAD] kemudian menjadi KKAD, RPKAD, Palu RPKAD, Kopassandha, dan terakhir menjadi Kopassus sekarang ini.

20 Oktober 1999

Pelantikan Presiden Republik Indonesia Kyai Haji Abdurrachman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa /PKB.

31 Oktober 1999

Deklarasi Perjuangan Semesta [Permesta] yang dikemas dalam wahana Front Permesta oleh eksponen Minahasa yang berdomisili di Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi-Depok pada hari Minggu di Hotel Pondok Sawangan, Depok, Jawa Barat.

"Bahwa realitas pluralitas bangsa Indonesia yang diikrarkan sebagai potensi pemersatu dan potensi pembangun telah mengalami politisasi dan komersialisasi yang bermuara pada diskriminasi, pengucilan dan peminggiran, baik dalam kategori suku, etnis, dan bahkan agama. Realitas pluralitas kita harus selamanya disadari sebagai benih disintegrasi, sepanjang budaya politik masyarakat kita masih sangat mudah dikotak2kan secara ideologis dan penuh purbasangka atau masih jauh dari kondisi ideal masyarakat terbuka [open society]". Demikian salah satu diktum dari Deklarasi Perjuangan Semesta [Permesta].

"Dengan kesadaran penuh sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia yang senantiasa berperan terdepan dalam setiap tahapan sejarah perjuangan maka Front Permesta akan Berjuang

untuk menegakkan keadilan, pemberdayaan, dan pemerdekaan masyarakat Kawanua sesuai dengan prinsip The right of self determination," demikian akhir butir deklarasi tersebut.

Deklarasi Perjuangan Semesta ini ditandatangani oleh :

- . Willy H. Rawung
[Sekretaris Dewan Pembina Kerukunan Keluarga Kawanua / KKK],
- . Johny A. Rumokoy
[Sekjen Angkatan Muda Reformasi Semesta / AMARTA],
- . Jopie Lasut [Wartawan Radio Hilversum],
- . Benny Matindas
[Presidium Forum Masyarakat Minahasa untuk Reformasi],
- . Otje R. Sumampouw [Ketua Umum AMARTA],
- . Charlie Sondakh [Mantan Sekjen Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Minahasa di Djakarta / IPPMMD],
- . Dr. Bert Supit [Purnawirawan TNI-AD /
Mantan Bupati Minahasa saat Pergolakan Permesta],
- . Wailan E. Langkay [Aktivis Pemuda],
- . Audy L. Punuh [Aktivis Pemuda / Pilot Merpati],
- . Audy WMR Wuisang [Kepala Biro Pemuda, Persekutuan Gereja2
di Indonesia / PGI],
- . Boy MW Saul [Sekretaris KKK],
- . Max Wilar [Sekjen Masyarakat Kawanua Indonesia / MKI], dan
- . Marsma [Purn] F. Pontohkukus
[Penasihat Badan Perjuangan 14 Pebruari 1946].

Front Permesta yang dipimpin oleh presidium dengan ketua Willy H. Rawung, Sekjen Audy W.M.R. Wuisang dan Sekretaris Boy W.M. Saul, sehari2 berkantor di Jl. Bekasi Timur IV No. 3-A, Jatinegara, Jakarta Timur, Tel +62.21.850.3924. Diketahui juga sebagai kantor HN Ventje Sumual.

6 Juni 2000

Kolonel Purn? TNI [Mayjen Permesta] Alexander Evert KAWILARANG meninggal dunia dalam usia 80 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung.

5 Agustus 2000

Kongres Minahasa Raya I dilaksanakan untuk memberi ultimatum kepada MPR dalam Sidang Tahunan yang dimulai tanggal 7 Agustus, yang akan mengamandemen UUD 1945 pasal 29 . Forum Kongres Minahasa Raya sepakat mengultimatum MPR bahwa jika ST itu mengamandemen UUD '45 dengan memasukan Piagam Jakarta ke dalamnya, tanah Toar Lumimuut akan merdeka. Dalam tiga butir Deklarasi Inspirasi itu disebutkan: Jika keinginan untuk membatalkan komitmen Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus dan UUD 1945 diluluskan atau bahkan dikompromikan sedikit pun, maka pada saat yang sama eksistensi NKRI [Negera Kesatuan Republik Indonesia] berakhir. Pada saat itu juga rakyat Minahasa terlepas dari seluruh ikatan dengan ke-Indonesia-an dan berhak membatalkan komitmen ke-Minahasa-an dalam ke-

Indonesia-an. Dengan demikian, maka rakyat Minahasa berhak menentukan nasibnya sendiri untuk masa depannya. Hadir pada KMR tersebut sedikitnya 2000 rakyat Minahasa dari berbagai kalangan, yaitu dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tua2 adat, tua2 kampung dari 7 pakasaan sub etnis di Minahasa, generasi muda dan masyarakat Minahasa baik yang tinggal di daerah ini, maupun yang tinggal di luar daerah. Forum Kongres Minahasa itu turut dihadiri Wakil Gubernur FH Sualang, Bupati Minahasa Drs Dolvie Tanor, mantan walikota dan walikota Manado Ir LH Korah dan Wempie Fredrik, pejabat sementara Walikota Bitung Drs L Gobel, dan pejabat penting lainnya.

Kongres yang berlangsung hampir sembilan jam itu dipandu tujuh tokoh pemuda dari Minahasa, yaitu Ketua Pnt Marhanny VP Pua, Pdt David Tulaar, Pdt Feybe Lumanauw, Ir Vicktor Rompas, Pastor DR John Montolalu, Pdt Narwasty Karundeng dan Pdt Wempy Kumendong.

Tim ini didampingi utusan2 mewakili 7 sub-etnis yang ada di Minahasa. Ke tujuh utusan itu adalah Tombulu, Tonsea, Tolour, Tonsawang, Tontemboan, Ratahan dan Bantik. Mereka itu yakni Pdt Prof DR WA Roeroe, Mayjen Purn CJ Rantung, Prof DR EA Sinolungan, Jotje Koapaha, Drs Freddy Rorimpandey serta Dolfie Maringka.

Salah satu hal penting dalam KMR itu adalah terdapat dalam Rekomendasi Sidang Kongres Minahasa Raya butir ke-8 yang berbunyi: "Mengembalikan citra Perjuangan Semesta [Permesta] bukan sebagai gerakan pemberontakan, tetapi merupakan perjuangan luhur dari rakyat Minahasa untuk diperlakukan adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara".

Selesai kongres, para pimpinannya langsung menemui fraksi2 di MPR untuk menyerahkan hasil Deklarasi Inspirasi tersebut terutama kepada Fraksi PPP dan Bulan Bintang yang sangat keras dalam memperjuangkan Syariat Islam tersebut. Sidang Tahunan MPR tersebut akhirnya tidak mengamandemen UUD 45 pasal 29 yaitu dengan tidak memasukkan 7 kalimat Syariat Islam dari Piagam Djakarta.

Kongres Minahasa Raya II diadakan tahun berikutnya, dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, K.H. Abdurrachman Wahid.

2 Maret 2001

Korps Pembangunan Permesta Sulut/KPPS sebagai Korpsnya Permesta didirikan, dalam apel HUT Permesta di Lapangan Sario, dengan Ketua Umumnya adalah Brigjen.[Purn.] Robertus Soekandar [seorang dari etnis Jawa - yang justru pada saat Pergolakan Permesta berada di pihak Tentara Pusat dalam Kodam Siliwangi yang ikut menumpas Permesta], dan Sekretaris Umumnya adalah Johan Piet Sompie.

8 Maret 2001

Prof. Soemitro Djojohadikusumo meninggal dunia.

4 Mei 2001

Perjuangan LRRI Sulut kepada Departemen Pertahanan RI yang tertuang dalam Surat Keputusan No. B.546/07/05/01/MIN.SDM tertanggal 54 Mei 2001 meminta agar mantan Laskar Rakyat '45, Pejuang Dwikora, Pejuang Trikora serta Pejuang Permesta diberikan pensiun.

Laskar Rakyat RI [LRRI] Sulut diketahui memutuskan hubungan organisasi dengan LRRI Pusat di Jakarta dan membentuk dan mengatur organisasi veterannya sendiri di daerah ini.

5 November 2001

Dalam peringatan HUT ke-I Korps Pemuda Laskar Rakyat Republik Indonesia Sulut [KPLR RI] di Taman Kesatuan Bangsa [TKB] Bitung, ratusan anggota LRRI termasuk para veteran Permesta dari berbagai daerah di Minahasa, Manado dan Bitung menyatakan kebulatan tekadnya untuk tetap komitmen mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI].

Pimpinan Pemuda Laskar Rakyat RI, Benny Tengker juga menegaskan hal itu. Tuntutan yang diajukannya kepada para wakil rakyat di MPR yang sedang bersidang saat itu untuk tidak memasukkan 7 kata dalam Piagam Jakarta, karena sejak awal sudah ditolak oleh pendiri bangsa Indonesia.

"Kalau Piagam Jakarta diterima sama saja secara tidak langsung mereka menyetujui daerah yang tidak sependapat dengan mereka memisahkan diri dari NKRI. Dan pemisahan itu bukan oleh kita tetapi mereka sendiri."

2 Maret 2002

HUT ke-45 Proklamasi Permesta dirayakan secara besar-besaran di Sulawesi Utara. Dan dihadiri oleh Panglima Tertinggi Permesta [Pucuk pimpinan Permesta] yaitu Tonaas Wangko H.N. Ventje Sumual atau Om Ventje Sumual.

Peringatan ini diadakan di tiga tempat:

- Lapangan Sam Ratulangi Tondano, dengan pemrakarsanya adalah Laskar Rakyat Republik Indonesia/LRRI Sulut
- Lapangan KONI Sario Manado, dengan pemrakarsanya adalah Korps Pembangunan Permesta Sulut [KPPS],
- Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, dengan pemrakarsanya adalah Ikaselanpe [Ikatan Alumni Pejuang/Pelajar Permesta].

4 Maret 2002

Pengurus DPP Front Pembangunan Semesta Manguni [FPSM] dikukuhkan Pucuk Pimpinan Permesta Tonaas Wangko Ventje Sumual di Malumbo, salah satu bekas lokasi markas Permesta di desa Tounelet kecamatan Langowan. Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusatnya adalah Johny J. Saerang [putra Bupati KDM Permesta/Komandan Brigade Manguni masa Permesta Laurens Saerang] dan Pdt.S. Lumingkewas, STh.

27 Maret 2002

Deklarasi Kasuang oleh sedikitnya 9 organisasi bernuansa Permesta untuk kebulatan tekad untuk mempersatukan organisasi2 bernuansa Permesta menjadi satu wadah dalam Forum Komunikasi Permesta.

Organisasi tersebut antara lain adalah Ikaselanpe Sulut, Korps Pembangunan Permesta Sulut /KPPS, Yayasan Permesta Manguni, Front Pembangunan Semesta Manguni, Generasi Muda Permesta, Laskar Rakyat Republik Indonesia Sulut / LRRI Sulut, Generasi Penerus Perjuangan [GPP] Permesta.

9 Agustus 2002

Sekitar 300 anggota Permesta yang diketuai Ketua Generasi Muda Permesta Sammy Supit mendatangi Kantor Gubernur Sulut, menyatakan sikap menolak Piagam Djakarta dimasukkan ke dalam batang tubuh UUD 1945 [pasal 29]. Pemerintah Provinsi Sulut yang diwakili Wagub Freddy H. Sulalang juga menyatakan hal yang sama.

3 Januari 2003

Sammy Supit Mrn.Eng., terpilih sebagai Ketua Umum dan Formatur kepengurusan KPS [Korps Permesta Sulut] yang baru, yang mengubah nama organisasinya dari Korps Pembangunan Permesta Sulut/KPPS, sebagai hasil pertemuan seluruh anggota "KPS" di Pinabetengan tanggal 3 Januari 2003, dan di Bentenan tanggal 11 dan 12 Januari 2003.

Dan telah dilaksanakan perbaikan Akte baru sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pendirian "perkumpulan", dimana akte disesuaikan dengan aspirasi para anggota yaitu Organisasi Masyarakat dengan nama : KORPS PERMESTA SULUT [KPS].

5 Maret 2003

Apel besar peringatan Proklamasi Permesta diadakan di ex. Rindam Kakaskasen III - Tomohon [calon kantor Walikota Tomohon], yang juga dihadiri oleh Benny Tengker, Gubernur Sulut Drs A.J. Sondakh, Bupati & Wakil Bupati Minahasa yang baru terpilih [Drs Vreeke Runtu & Letkol Rull Kuron].

12 April 2003

Peringatan Deklarasi Permesta ke-46 di lokasi Penyelesaian Permesta [Perdamaian Permesta-Pemerintah Pusat] di desa Woloan - Tomohon.

20 Mei 2003

Dalam Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Manado hari ini, Korps Permesta Sulut [KPS] menggelar aksi unjuk rasa reli damai. Sekitar pukul 10.00 Wita, ribuan Meta [pejuang Permesta] berkumpul di Lapangan KONI Sario Manado dan melakukan long march ke Kantor Deprov [DPR Sulut] kemudian melanjutkan ke Kantor Gubernur Sulut.

Mereka menyampaikan 3 tuntutan yang diberi nama Tritura Sulut:

- [1] Naikkan harga cengkih, pala, kopra, dan jagung,
- [2] Tolak RUU Sisdiknas,
- [3] Tetap NKRI namun Sulut harus diberi otonomi khusus.

Dalam RUU Sisdiknas pasal 13 disebutkan bahwa setiap sekolah, tidak terkecuali sekolah Kristen, harus memberi pelajaran agama pada muridnya sesuai dengan agama siswa tersebut. Hal ini berarti sekolah Kristen [diwajibkan]/harus memiliki guru agama lain [ustadz] selain Guru Agama Kristen. Masalah RUU Sisdiknas ini juga didemonstrasi oleh berbagai elemen masyarakat di berbagai kota di seluruh pelosok Indonesia.

- * Bila ada tambahan data baru, serta bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, jabatan, peristiwa, waktu, dan lain-lain;
harap dapat menghubungi webmaster:
webmaster@permesta.8m.net
- * Seluruh data dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan.
- * Untuk teks yang berwarna merah/biru, maupun berupa foto-foto, silahkan klik di situ untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
- * Materi/isi dari Kronologi Permesta ini dapat berubah sewaktu2 untuk kepentingan update dan pembaharuan data yang otentik.
Bila ingin mengutip isi kronologi ini, disarankan untuk mengecek ulang data terakhir halaman ini untuk kepastian informasi terbaru [update/ralat].
- * Materi/isi dari Kronologi Permesta ini dapat berubah-ubah untuk kepentingan update dan pembaharuan data yang otentik.